



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201848975, 11 Oktober 2018

**Pencipta**

Nama : **Drs. Sukri Nyompa, S.H.,M.Si., Ph.D.**

Alamat : **Jln. Perintis Kemerdekaan 3A Lr.2/7, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Drs. Sukri Nyompa, S.H.,M.Si., Ph.D., Lembaga Penelitian UNM,**

Alamat : **Jln. Perintis Kemerdekaan 3A Lr.2/7, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Transformasi Sosial Migran**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **1 April 2017, di Makassar**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000120498**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



LAMPIRAN  
PEMEGANG

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**Drs. H. Sukri Nyompa, S.H., M.Si., Ph.D**



# **TRANSFORMASI**

## **SOSIAL MIGRAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113  
KETENTUAN PIDANA**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

# **TRANSFORMASI SOSIAL MIGRAN**

**Drs. H. Sukri Nyompa, S.H., M.Si., Ph.D**



Global Research and Consulting Institute

2017

**Judul** : Transformasi Sosial Migran  
**Penulis** : Drs. H. Sukri Nyompa, S.H., M.Si., Ph.D

---

**ISBN** 978-602-51782-8-3

Penyunting : Prof. Dr. Hamzah Upu, M.Ed.  
Perancang Sampul : Muh. Izzad Kaisar  
Penata Letak : Arfah  
Isi : Sepenuhnya tanggung jawab penulis

Diterbitkan Oleh:



**GLOBAL RESEARCH AND CONSULTING INSTITUTE**

(Global-RCI)

Jl. Poros Kompleks Perumahan BTN. Saumata Indah/  
SMAN 10 Kab GOWA, Sunggumnasa Sulsel-Selatan,  
Indonesia

Cetakan Pertama, Desember 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta ©2017 pada penulis.

Hak penerbitan pada Global RCI. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan Penerbit Global RCI.

*All Rights Reserved*

---

**Sukri Nyompa**

**Transformasi Sosial Migran: -- cetakan I**

-- Makassar: Gobal Research and Consulting Institute (Global-RCI), 2017

viii + 194 hal.; 14,8 x 21 cm

## **MOTTO**

*Takkan layu sebelum berkembang*

## PERSEMBAHAN

*Buku ini kupersembahkan untuk isteri tersayang  
Dra. Hj. Nuraeni Syam, dan anak-anakku tercinta  
A. Muk Firman Sukri, S. Kom, A. Sri Rahayu Sukri,  
SE, A. Try Setiawan Sukri, S. Pd dan A. Ria  
Islamiaty Sukri*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ini dengan judul "*Transformasi Sosial Migran*".

Buku ini disusun dengan maksud sebagai referensi untuk mendukung buku tes yang terkait dengan Transformasi sosialmigran bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami bidang tersebut, khususnya mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat.

Selama proses penyelesaian buku ini banyak yang memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya termasuk kepada Bapak Prof.Dr.H. Hamzah Upu, M.Ed.

Penulis juga menyadari sedalam-dalamnya bahwa dalam penyusunan buku ini tidak luput dari kesalahan disana sini, sehingga pada tempatnyalah penulis memohon saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan pada masa yang akan datang.



Terima kasih kepada isteri tersayang Dra.Hj.Nuraeni Syam, dan anak-anakku tercinta A.Muh Firman Sukri, S.Kom, A.Sri Rahayu Sukri, SE, A.Try Setiawan Sukri, S.Pd dan A.Ria Islamiaty Sukri yang selama ini dengan sabar menemani penulis menjalani liku-liku kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga buku ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Makaasar, Desember 2017

Penulis

# DAFTAR ISI

Halaman Judul	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	Ix
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Mobiliti Sosial	9
BAB III Proses Adaptasi Migran di Destinasi	23
BAB IV Faktor Penghijraan Migran	33
BAB V Transformasi Sosial Migran selepas Berhijrah	43
BAB VI Interaksi Sosial	57
BAB VII Penempatan Migran dan Transformasi Sosial	79
BAB VIII Peranan Pemerintah dalam Transformasi Sosial	99
BAB IX Kemudahan Sosial dan Transformasinya	117
BAB X Dampak Transformasi Sosial pada Masa Depan	129
Daftar Pustaka	141
Riwayat Hidup	143



# BAB I

## PENDAHULUAN

Proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke besar telah menjadi semakin kompleks polanya, sehingga impaknya terhadap lingkungan Kota memerlukan tindakan perancangan berkesan dan strategi (Hugo 2011). Perpindahan sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dalam perubahan demografi, sosial dan ekonomi yang terjadi di daerah asal dan tujuan (Asan Ali Galom Hassan at al. 2003; Maulien Khaerina Sari & Haryo Winarso 2007; Usman Hj. Yaakob dan Tarmiji Masron 2010).

Perbedaan antara kehidupan kota dan desa tercermin dalam taraf pembangunan, ciri kependudukan, konflik politik, menurunnya daya tampung lingkungan, kebijakan pemerintah, hubungan sejarah, dan politik antara suatu negara dengan negara lain (Chotib 2008). Oleh itu dikotomi desa – kota merupakan perbedaan harapan antara kehidupan di kota dan sebaliknya di desa. Perbedaan tersebut mendorong arah aliran migrasi penduduk, khususnya di negara sedang membangun (NSM) yang masih nampak tidak seimbangan antara desa dan kota (Renny Candradewi 2014).

Secara umumnya, daya huni kota lebih baik berbanding luar kota, maka semakin ramai penduduk untuk memperoleh

kehidupan sosial dan ekonomi di kota-kota yang membawa kepada pembesaran kota yang mendorong kepada proses perkotaan atau urbanisasi (Luh Kitty Katherina 2014). Urbanisasi masa kini sangat relevan untuk perancangan wilayah atau negara dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan penduduknya (Fitri Ramdhani Harahap 2013).

Perpindahan penduduk luar kota ke kota tetap penting dalam mempengaruhi proses perkotaan terutama di negara-negara sedang membangun seperti Indonesia sehingga kota semakin sesak (Aries Musnandar 2012), termasuk kota Makassar. Penumpuan migran yang datang dari pelbagai daerah dengan latar belakang etnik, agama dan budaya yang berbeza dengan harapan terjadi perubahan kehidupan walaupun harapan itu, memerlukan perjuangan dan kesabaran untuk berjaya.

Perpindahan ke kota Makassar juga menimbulkan isu-isu masa kini seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, kawasan kumuh, penyebaran penduduk, pengangguran, kriminal dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan tanpa diimbangi oleh peluang pekerjaan yang lebih banyak mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah, meningkatnya pekerja dalam sektor nonformal, menimbulkan perbezaan tingkat sosial ekonomi, perumahan, dan merusak infrastruktur umum dan lain-lain (Priyono Tjiptoherijanto 2000; Fazli Abd Hamid dan Ramli Dollah 2006).

Dalam teori perpindahan oleh Ravenstein (1976) dengan hukum perpindahan menjelaskan dengan sepuluh perilaku mobiliti penduduk. Zelinsky (1971) melalui lima tahap transisi mobiliti. Manakala Ida Bagus Mantra (2013), motif perpindahan

dikaitkan dengan teori migrasi Keperluan dan Tekanan. Tiap-tiap individu mempunyai keinginan perubahan status sosial dan ekonomi atau mobiliti sosial, misalnya perubahan ekonomi, sosial, psikologi dan keperluan-keperluan lainnya yang dapat memenuhi mobiliti sosial yang dicita-citakan. Jika keperluan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi tekanan sehingga menimbulkan dua kemungkinan, yaitu berpindah atau tetap tinggal di tempat kediamannya. Tekanan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan keadaan di daerah asal terutamanya keadaan alam dan budaya daerah asal yang kurang menyokong, penyempitan peluang pekerjaan dan pendapatan, keterbatasan fasiliti pendidikan, politik, keamanan dan lainya.

Menurut Lee (1976) mengatakan bahawa proses perpindahan itu dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut: pertama, faktor yang terdapat di kawasan asal; kedua, faktor yang terdapat di kawasan destinasi; ketiga, faktor rintangan antara kedua tempat asal dan destinasi; dan keempat, faktor individu. Oleh itu, pada setiap daerah terdapat faktor yang mempengaruhi seseorang individu untuk tidak berpindah dan adapula faktor yang mengekang seseorang individu untuk meninggalkan daerah asal.

Pada proses perpindahan terjadi karena faktor tolakan dan faktor tarikan. Faktor tolakan di daerah asal, diantaranya termasuklah; peluang mendapatkan pekerjaan terbatas, pendapatan yang diperoleh masih rendah, fasiliti pendidikan kurang, sumber daya alam terbatas, budaya (siri, jiwa pedagang, jiwa pelaut), politik (tekanan, konflik), sedangkan faktor tarikan di destinasi, di antaranya termasuklah; peluang mendapatkan peluang pekerjaan, peluang mendapatkan pendapatan tinggi, fasiliti pendidikan memadai, fasiliti perumahan tersedia,

maklumat dari media / keluarga /kawan di destinasi yang menjanjikan harapan kehidupan yang lebih baik di destinasi atau transformasi sosial ekonomi.

Proses perpindahan itu dengan pola perpindahan yang terjadi daripada migran dari pelbagai etnik, agama, budaya dan daerah asal dan juga tahun kedatangannyapun berbeza antara migran yang satu dengan migran yang lain dan bertaburan dalam wilayah Kota Makassar menyebabkan penduduk Kota semakin ramai, sesak dan berbeza-beza dari ciri demografi, sosial, ekonomi dan budaya dan sebagainya, sehingga menimbulkan pelbagai kesan yang nyata baik kesan positif mahupun negatif (Norimah Rambeli & Fauziah Che Leh 2010), juga menimbulkan interaksi dan adaptasi dalam bentuk kerjasama, persaingan mahupun konflik (Soerjano Soekanto 2007).

Kotadapat meningkatkan mobiliti sosial yang menjanjikan kehidupan berkualiti dan selesa bagi penduduk tempatan dan pendatang (migran), jika pembangunan lestari dan dayahuni Kotamewujudkan pembangunan berterusan sehingga muncul ruang dan peluang yang seluas-luasnya bagi penduduk dalam menjanakan pelbagai aktiviti sosial, ekonomi, pembangunan prasarana sosial, kemudahan sosial dan aset insan guna untuk menambahbaik perubahan sosial, ekonomi dan kualiti hidup penduduknya termasuk migran yang turut mengalami peningkatan mobiliti sosial agar senantiasa ceria, menarik, sihat dan selamat berjaya sepanjang hidup di KotaMakassar. Ini selari yang dikemukakan Abdul Samad Hadi (2008) dalam pemaparan pada pembangunan lestari dan dayahuni kota.

Kerangka teoritikal kajian ini dengan berpanduan penggabungan teori yang dihujah oleh Ida Bagus Mantra (2013),

Lee (1976). Fokus utama ialah transformasi sosial dan ekonomi migran di KotaMakassar setelah mengenalpasti pola migrasi yang berlaku. Selanjutnya, tumpuan kajian adalah peranan PKM dalam merancang dan membangunkan KotaMakassar dengan mengambilkira kehadiran migran.

Penghijrahan ke kota adalah suatu bidang kajian yang telah lama mendapat perhatian para sarjana sains sosial. Banyak kajian telah dijalankan mengenainya. Bab ini bertujuan untuk menghuraikan konsep migrasi yang menjadi pokok persoalan kajian. Selain menjelaskan konsep kajian, bab ini juga bertujuan untuk mengulas teori migrasi dan penemuan empiris tentang perkara tersebut. Bahagian ini akan menjadi landasan utama bagi analisis dan perbincangan dalam bab yang berikutnya nanti.

Secara umumnya, penghijrahan (migrasi) merujuk kepada pergerakan penduduk melampaui sempadan kawasan (daerah pentadbiran) dari satu tempat ke satu tempat lain sama ada di dalam atau luar negara, dalam tempoh permastautinan (bermukim/ domisil) di tempat destinasi yang relatif panjang. Pelbagai pandangan telah dikemukakan oleh berbagai-bagai pihak, baik ahli kependudukan sendiri mahupun ahli disiplin ilmu yang lain seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologi sosial, perancangan kota dan wilayah mahupun yang lainnya. Penghijrahan dalam pengertian yang umum sering disamakan dengan istilah migrasi, penghijrahan atau lebih umum digelar pergerakan. Umumnya penghijrahan ialah perpindahan penduduk dari tempat asal dan daerah pentadbiran (Abdul Samad Hadi 1989). Weeks (2005), menjelaskan bahawa migrasi iaitu penghijrahan dari satu tempat tinggal ke satu tempat tinggal lain kerana faktor ekonomi, sosial dan politik dan migrasi secara besar-besaran boleh mempengaruhi corak dan demografi penduduk sesebuah negara terbabit.



Standing Guy (1987), menekankan bahawa konsep migrasi sangat rumit kerana harus mencakup empat dimensi penting, iaitu (1) ruang; (2) tempat tinggal; (3) waktu; dan (4) transformasi migran di wilayah. Transformasi di wilayah dimaksudkan bahawa migran melakukan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat lain dengan melampaui jarak tertentu. Jarak dalam hal ini adalah meliputi (1) jarak geografi, iaitu penghijrahan penduduk harus melampaui jarak sejumlah kilometer; dan (2) jarak ekonomi, iaitu penghijrahan penduduk antara pusat-pusat pasar atau pusat pengeluaran atau pusat jenis industri khusus. Konsep sosial pula dapat dibezakan menurut jenis penghijrahan dari sudut perpisahan, iaitu perpisahan persekitaran keluarga dan kejiranan/ketetangaan yang biasa dan perpisahan daripada kelompok etnik migran di daerah asal.

Proses penghijrahan pada dasarnya berakhir dengan transformasi tempat tinggal, baik untuk sementara mahupun menetap selama hidupnya (Lee 1976). Dengan demikian proses penghijrahan merujuk kepada cara migran berpindah menuju daerah destinasi. Migran berpindah sama ada secara paksaan atau sukarela yakni secara langsung, merantau secara berperingkat atau berpusing (sirkular) dari tempat asal ke tempat destinasi terakhir; bersendirian atau berkeluarga. Maulien Khairina Sari & Haryo Winarso (2007) berpendapat bahawa penghijrahan hanya merupakan suatu proses perubahan (transformasi) tempat tinggal yang melibatkan penyesuaian kembali yang sepenuhnya atas keanggotaan individu dalam komuniti. Hal ini menunjukkan bahawa migran yang telah melakukan penghijrahan dari suatu wilayah ke satu wilayah lain secara mutlak, dalam usaha untuk dapat bertahan hidup dan lebih maju di tempatnya yang baru, maka seorang migran harus melakukan interaksi dan adaptasi dengan persekitarannya sehingga mengalami transformasi.

Penyelidikan yang lain pula mengungkapkan bahawa proses migrasi merupakan hasil mekanisme yang sangat kompleks (Haning Rosmadiati 1986). Kekompleksan tersebut tidak hanya disebabkan oleh alasan yang melatarbelakangi penghijrahan, tetapi juga berpunca daripada langkah migran dalam membuat keputusan untuk berpindah. Jadi proses penghijrahan ke kota adalah suatu penyesuaian yang dilakukan oleh migran sama ada semasa berpindah atau selepas berada di destinasi.

Penghijrahan yang terjadi secara berantai akibat keluarga atau kawan yang ada di destinasi memberikan maklumat yang menggembirakan atau menyenangkan kepada keluarga di daerah asal bahawa migran telah menunjukkan kejayaan di destinasi dalam bentuk peningkatan kualiti hidup yang lebih baik, remitans dan sebagainya. Makanya memotivasi keluarga di daerah asal untuk melakukan penghijrahan ke kota walaupun belum tentu dapat mencapai keinginan dan harapan untuk berhasil seperti yang dialami atau dirasakan oleh keluarga atau kawan terdahulu di destinasi. Oleh itu, migran memerlukan, kesabaran, ketekunan dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang kompleks di kota demi untuk mencapai keberhasilan.

Mobiliti penduduk menurut Ida bagus Mantra (2013), terbahagi kepada dua, iaitu mobiliti penduduk di atas muka bumi atau disamakan dengan penghijrahan (migrasi) dan mobiliti sosial sama ada secara menegak (transformasi sosial) atau mendatar, disebut juga sebagai mobiliti penduduk secara geografi. Mobiliti menegak merujuk kepada perubahan status pekerjaan seseorang yang misalnya dari mulanya petani kepada pebantu tadbir dan seterusnya menjadi pengurus. Sedangkan mobiliti mendatar, iaitu pergerakan penduduk yang melintasi sempadan daerah/wilayah menuju ke kawasan/daerah/wilayah

lain dalam tempoh tertentu. Disiplin ilmu geografi berdasarkan ruang dan waktu. Mobiliti melintasi sempadan ruang dan waktu, berlaku dari suatu unit geografi (tempat/kawasan) ke unit geografi yang lainnya secara relatif kekal. Unit geografi bererti unit pentadbiran sama ada negara ataupun bahagian-bahagian daripada sesebuah negara (Rusli 1994). Mobiliti yang ditakrif secara ruang ini dikenali sebagai penghijrahan atau migrasi.

## BAB II

# MOBILITI SOSIAL

Penghijrahan penduduk dari luar kota ke kota yang membawa kepada pembesaran kota yang mendorong kepada proses pemkotaan atau urbanisasi. Menurut Zainal Abidin Hashim (2003) bahawa konsep pemkotaan boleh dilihat dari tiga aspek berikut : pertama, aspek sosial iaitu proses perubahan cara hidup luar kota kepada cara hidup kota yang merangkumi perbaikan secara kualitatif dan kuantitatif dari segi perumahan, pengangkutan, komunikasi, kemudahan asas, pentadbiran dan institusi pendidikan; kedua, aspek ekonomi yang dikaitkan dengan pemindahan manusia keluar dari masyarakat pertanian kepada sebahagian besarnya kepada masyarakat bukan pertanian yang ditunjukkan adanya perubahan struktur pekerjaan di sekitar kawasan yang terlibat dalam proses pemkotaan; ketiga, aspek demografi pemkotaan yang ditakrifkan sebagai proses penumpuan penduduk.

Hal ini sama di sampaikan oleh Asan Ali Golam Hassan et al. (2003) bahawa penghijrahan adalah suatu fenomena pembangunan yang tidak dapat dielakkan yang dapat menyebabkan perubahan corak demografi, sosial, ekonomi di kawasan menerima penghijrahan. Oleh itu, penghijrahan ke kota atau urbanisasi merupakan laluan untuk mencapai mobiliti sosial. Mobiliti sosial merupakan perubahan atau peningkatan taraf sosial dan ekonomi migran. Harapan inilah yang diinginkan oleh

para migran sehingga secara berterusan berlaku penghijrahan selama ada perbezaan faedah antara desa dan kota.

Kota dapat meningkatkan mobiliti sosial, menjanjikan kehidupan nyaman, selesa bagi penduduk dan pembangunan daya huni kota yang dijalankan secara berterusan dan memberi ruang dan peluang kepada penduduk untuk menjalankan aktiviti sosial, ekonomi, kemudahan asas yang lebih baik untuk di gunakan menambah baik mobiliti sosial bagi penduduk kota.

### **Proses Adaptasi**

Adaptasi adalah salah satu proses interaksi antara organisme dengan persekitarannya. Secara lebih khusus Haviland (2010), mendefinisikan adaptasi sebagai kaedah bagaimana manusia mengatur hidupnya untuk menghadapi pelbagai kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari atau keperluan dan tekanan memaksa manusia mengubah kehidupannya untuk menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Penyesuaian itu merupakan unsur adaptasi. Penyesuaian diri dengan keadaan persekitarannya yang baru dilakukan agar tetap seseorang itu dapat bertahan hidup, sesuai dengan budaya yang melatarinya tanpa memilah jenis pekerjaan, baik sektor formal mahupun sektor informal.

Usman Pelly (1994) mengungkapkan strategi adaptasi dalam bermigrasi sebagai cara-cara yang digunakan perantau untuk mengatasi rintangan yang mereka hadapi dan untuk memperoleh suatu keseimbangan positif dengan keadaan latar belakang perantauan. Perspektif di atas dapat kita lihat pada sikap perantauan orang Minangkabau dalam melakukan adaptasi sebagai suatu strategi migran di kota Medan.

Kaplan & Albert (2002) mendeskripsikan konsep adaptasi sebagai “proses yang menghubungkan sistem budaya dengan persekitarannya, sehingga berdasarkan konsep tersebut diandaikan bahawa mustahil kita berfikir tentang konsep adaptasi tanpa menghubungkannya pada realiti persekitaran tertentu”. Andaian tersebut memberikan gambaran bahawa suatu proses adaptasi sentiasa dipengaruhi oleh keadaan persekitaran, baik persekitaran sosial, ekonomi, budaya mahupun persekitaran fizikal. Oleh itu, bahagian dari proses budaya, adaptasi akan sentiasa mengalami timbal balik antara budaya dan persekitaran, makanya manusia dikatakan dapat beradaptasi ketika dia secara kebudayaan dapat bekerjasama dengan potensi dalam persekitaran sehingga mewujudkan keseimbangan yang akan melahirkan kelestarian budaya. Sejar di huraikan oleh Haviland (2010), bahawa adaptasi mengacu pada proses interaksi dengan persekitaran dengan menggunakan medium kebudayaan.

Kehadiran migran di suatu kawasan memerlukan para migran memiliki suatu kaedah yang sesuai sebagai strategi untuk mereka berinteraksi. Strategi ini diperlukan agar mereka dapat bertahan hidup atau hidup lebih baik di persekitaran yang baru. Migran perlu membina suatu pola perhubungan yang serasi antara sesama migran dan dengan penduduk tempatan, sehingga tidak terjadi konflik dan pertikaian sosial lainya. Coale (1973) dalam Salahuddin Muhidin (2003). Ia adalah seorang ahli ilmu demografi sosial mengatakan bahawa terdapat tiga komponen yang digunakan untuk mengukur berhasilnya proses adaptasi terhadap perubahan pola sikap. Tiga-tiga komponen yang dimaksudkan ialah SIMAMA, iaitu Siap (Ready), Mahu (Willing) dan Mampu (Able). Selanjutnya dikatakan bahawa kejayaan beradaptasi kepada pola sikap yang baru dari seseorang individu atau kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh kesiapan,

kemauan dan kemampuan individu atau kelompok masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi Coale (1973) menjelaskan bahawa komponen “Siap” (Ready) banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, ertinya seseorang dalam menerima suatu perubahan akan cenderung melihat ada atau tidaknya manfaat terhadap diri mereka. Sementara komponen “Mahu” (Willing) dalam beradaptasi terhadap suatu perubahan banyak terkait erat dengan pertimbangan dan pengakuan secara normatif dari nilai-nilai keagamaan, sosiobudaya dan etnik para pelakunya. Sedangkan komponen “Mampu” (Able). berkaitan erat dengan mudah atau tidaknya akses terhadap perubahan. Adaptasi terhadap perubahan yang baru akan dipengaruhi oleh tersedianya kemudahan yang membantu percepatan proses adaptasi tersebut.

Nilai kejayaan setiap individu sangat berbeza-beza. Hal ini ditentukan oleh kombinasi tiga komponen yang wujud dalam sesuatu komuniti yang sangat berkait rapat dengan gabungan dari nilai semua individu yang menjadi anggota komunitinya. Bahkan faktor individu dan faktor persekitaran sangat berpengaruh dan menentukan tingkat keberhasilan proses adaptasi terhadap perubahan pola sikap seseorang individu.

Adaptasi para migran memberi kesan terhadap daerah destinasi kerana harus mengadakan adaptasi dalam perhubungan dengan sesama migran, sesama pekerja dan juga dengan penduduk tempatan, agar dapat bertahan hidup atau tingkat kehidupannya dapat lebih baik di persekitaran yang relatif baru atau lebih baik taraf hidupnya jika dibandingkan dengan daerah asalnya. Para migran perlu melakukan penyesuaian diri dengan persekitarannya, sama ada persekitaran sosial, ekonomi, budaya

atau politik. Di Jakarta ini dilakukan dengan cara melakukan mobilti sosial dalam mencapai kesetaraan dan kualiti hidup dengan komuniti lainnya yang telah lebih awal bertahan hidup di wilayah yang sama (Chotib 2008). Seperti halnya migran dari Indonesia di Malaysia, para migran ini dapat bertahan hidup kerana dapat menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi dengan persekitaran di mana mereka berada (Abdul Samad Hadi 2000).

Bruner (1972), mengatakan bahawa apabila terdapat sekumpulan masyarakat yang dominan di suatu wilayah, maka para migran cenderung untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat tempatan. Misalnya migran suku etnik Batak di Bandung yang memasuki komuniti yang didominasi orang Sunda, maka orang Batak yang minoriti menyesuaikan diri. Sebaliknya apabila di suatu wilayah tidak ada masyarakat yang dominan, maka para migran cenderung untuk mempertahankan budaya atau memperkuat daerah asal (Bruner (1972). Sama halnya di Jakarta dan Medan, kerana tidak ada masyarakat yang dominan, maka orang Batak cenderung mempertahankan budayanya dengan tujuan untuk merawat rasa kesukuan yang berfungsi ekonomi dan politik, sehingga memudahkan migran baru dalam beradaptasi, serta tetap menjaga dan menghargai tradisinya.

## **Kerjasama dan Persaingan**

Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang di dalamnya terdapat aktiviti tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktiviti masing-masing. Soerjono Soekanto (2007) mengatakan bahawa timbul kerjasama apabila seseorang menyadari bahawa mereka mempunyai kepentingan yang sama



dan pada saat yang sama mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman terhadap diri sendiri untuk kepentingan tersebut. Kesedaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, Soerjono Soekanto (2007), mengatakan ada lima bentuk kerjasama, iaitu sebagai yang berikut:

1. kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong;
2. tawar-menawar, iaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan cukai antara dua organisasi atau lebih;
3. kooptasi (cooptation), iaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabiliti organisasi yang bersangkutan;
4. koalisi (coalition), iaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu kerana dua organisasi atau lebih kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, kerana maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif;
5. kerjasama, iaitu kerjasama dalam mengusahakan projek tertentu, misalnya perlombongan arang batu, menggerudi minyak, perhotelan, perfilman dan sebagainya.

Persaingan pula merupakan suatu kegiatan yang berupa perjuangan sosial untuk mencapai tujuan dengan bersaing terhadap yang lain, namun secara damai atau setidaknya saling menguntungkan (Abdulsyani 2007). Bentuk kegiatan ini biasanya didorong oleh motif untuk mendapat status sosial, memperoleh jodoh, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan nama baik, dan mendapatkan kekayaan. Abdulsyani (2007) mengatakan bahawa persaingan itu dilakukan dalam beberapa hal, iaitu untuk mencapai tujuan ekonomi yang timbul kerana langkah dan terbatasnya persediaan barang; persaingan kebudayaan dapat terlihat pada usaha daripada kelompok untuk memperbesar pengikut kelompok, sama ada dalam bidang ekonomi, politik mahupun dalam bidang lainnya; persaingan kedudukan dan peranan di mana setiap orang atau kelompok selalu mempunyai keinginan untuk mendapatkan peranan yang disanjung tinggi oleh masyarakat; dan persaingan ras di mana lebih spesifik berlaku dalam konteks perbezaan warna kulit, rambut dan bentuk tubuh.

### **Pertikaian dan Akomodasi**

Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Ertinya di satu pihak bermaksud untuk menjatuhkan satu pihak yang lain atau saling berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya. Hal ini merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Menurut Abdulsyani (2007), pertikaian juga adalah suatu bentuk interaksi sosial yang mana satu pihak berusaha menjatuhkan pihak yang lain atau berusaha menghalau yang menjadi pesaingnya. Hal ini terjadi, mungkin kerana perbezaan

pendapat antara pihak-pihak tersebut. Pertikaian ini berpunca daripada masalah ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.

Pertikaian boleh berakhir dengan penyesuaian kembali, jika fungsi norma-norma sosial dan toleransi antara peribadi masih cukup kuat dan dapat pula memperkuat kembali norma-norma sosial yang hampir tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pertikaian merupakan proses penyesuaian antara norma sosial yang baru dengan kepentingan masyarakat pada saat tertentu. Jika pertikaian dapat diselesaikan, maka keseimbangan akan ditemukan kembali atau ada pihak yang mampu meleraikan pertikaian untuk sementara. Pertikaian dapat diselesaikan apabila pihak yang bertikai dapat melakukan semakan diri dan berusaha menyedari kesalahan masing-masing.

Akomodasi pula adalah sesuatu bentuk hubungan antara kedua-dua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial yang terdapat dalam masyarakat. Akomodasi bererti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok manusia (Soerjono Soekanto 2007). Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan keperibadian. Tujuan akomodasi boleh jadi berbeza-beza sesuai dengan situasi yang dihadapi, iaitu: untuk mengurangkan pertentangan antara individu atau kelompok manusia akibat perbezaan fahaman; mencegah daripada meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu; untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor sosial, psikologi dan budaya; dan mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.

Keempat-empat bentuk interaksi sosial tersebut di atas dapat membentuk suatu kesinambungan dengan contoh dari kehidupan antara migran dan penduduk tempatan. Beberapa daerah migran ditemukan beberapa kes, bahawa konflik yang terjadi pada awalnya dimulai dengan persaingan. Persaingan itu antara lain ekonomi, budaya dan politik. Persaingan tersebut lambat laun berhasil diatasi dan tercapai suatu keadaan akomodasi yang kemudian menjadi dasar dari suatu kerjasama. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh persaingan di segala aspek kehidupan. Persaingan ini juga tidak menutup kemungkinan munculnya konflik-konflik yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Faktor sosial yang mempengaruhi penghijrahan sangat berkait dengan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu motif yang tidak boleh diabaikan sebagai faktor untuk individu berhijrah. Menurut Todaro (1983), dan La Ode Syafiuddin (1985) penghijrahan boleh dipandang sebagai respons manusia terhadap keadaan ekonomi yang tidak menyenangkan di daerah asal serta respons manusia terhadap sistem pemilihan tanah yang tidak menguntungkan. Selain itu menurut Nur Hadi Wiyono (1994), penduduk berhijrah terutama disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, baik teknologi media cetak, mahupun teknologi pandang-dengar. Hampir setiap hari masyarakat disajikan dengan pelbagai macam informasi, keperluan seperti makanan, minuman, pakaian, motosikal moden baharu, apartemen, gaya hidup, peluang pekerjaan dan keperluan komsumtif lain. Informasi ini mendorong penduduk untuk berhijrah, baik mencari kehidupan lebih baik mahupun untuk memperoleh kemudahan tertentu.

Laporan penyelidikan yang dilakukan oleh Lembaga Kependudukan dan Penyelidikan UNHAS dan Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Han Redmana 1977), menyimpulkan tentang alasan-alasan berpindah antara lain meliputi:

1. Alasan dalam bidang ekonomi, yaitu kurangnya peluang pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang cukup walaupun bekerja keras, kurangnya kemungkinan dapat memiliki tanah usaha tani yang cukup luas, kurangnya peluang kerja di luar sektor pertanian.
2. Alasan dalam bidang sosial, yaitu tingkat pendidikan yang dirasakan tidak sesuai dengan peluang pekerjaan yang tersedia, adanya pertentangan pendapat dan pertikaian.
3. Alasan dalam bidang budaya, yaitu sikap dan cara berfikir penduduk yang berpendapat bahawa beberapa norma sosial yang berlaku dalam masyarakat merupakan faktor penghambat kemajuan.
4. Alasan dalam bidang politik, yaitu pelaksanaan dasar percukaaian yang memberatkan penduduk, atau sistem pengeralahan massa yang kurang menguntungkan penduduk kerana menghalangi pekerjaan sehari-hari mereka.

Secara umumnya, kebanyakan kajian tentang penghijrahan antarbangsa berorientasikan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Fokus perspektif kajian berorientasikan ekonomi mikro ialah tingkah laku individu dalam membuat keputusan, dan juga tingkah laku mereka dalam keinginan memperbaiki peluang hidup sebagai reaksi ketidakseimbangan penyediaan peluang ekonomi dengan berhijrah ke tempat lain. Sedangkan fokus perspektif ekonomi makro, iaitu proses ekonomi makro menghasilkan ketidakseimbangan sosiospatial dan memaksa transformasi hidup individu. Individu dianggap sebagai

anggota dalam kelas-kelas sosial yang khusus di tempat yang tertentu. Penghijrahan dilihat bukan sebagai satu keputusan individu-individu yang melakukan rasional tetapi sebagai satu akibat daripada ketidakseimbangan ruang sosial yang diwujudkan semula secara sistematik dalam ekonomi global dan nasional (Lee Yok Fee (1999)).

### **Ciri Adaptasi Dan Transformasi Sosial Migran: Bukti Empiris**

Banyak kajian empiris tentang migrasi telah dijalankan di seluruh dunia. Pelbagai bukti telah dikemukakan sama ada untuk menyokong atau menolak teori migrasi sebelum ini. Bukti tersebut berkisar di sekitar corak migrasi - jarak penghijrahan dan ciri migran yang terlibat, hubungan dengan kawasan asal melalui remitans, proses adaptasi dan transformasi sosial ke arah meningkatkan status sosial seperti yang diinginkan oleh migran semasa mereka membuat keputusan untuk berpindah. Bahagian ini membincangkan bukti tersebut.

Hukum penghijrahan Ravenstein menyatakan bahawa pada tahap awal penghijrahan cenderung untuk melibatkan kawasan yang tidak begitu jauh dari destinasi. penghijrahan berlaku pada jarak yang dekat. Migran juga cenderung memilih daerah tujuan yang paling dekat. Sejalan dengan hukum penghijrahan tersebut, Chotib (2008) membuktikan bahawa faktor kedekatan lokasi menjadi penentu sama ada besar atau kecilnya isipadu penghijrahan yang berlaku seperti di kota Depok Jawa Barat. Hal ini sejajar penjelasan Asan Ali Golam Hassan et al. (2003), bahawa semakin jauh jarak yang di tuju, semakin kurang penghijrahan kerana jarak mempengaruhi kos langsung penghijrahan dan semakin sukar dan mahal mendapat maklumat pasaran tentang peluang pekerjaan yang ada. Lebih lanjut Asan Ali

Golam Hassan menghuraikan bahawa kos pengangkutan dan perbelanjaan lain untuk memindahkan keluarga dan kelengkapan rumah meningkat dengan jarak dan nilai kini bersih daripada penghijrahan semakin rendah apabila semakin jauh jarak yang di tuju di sebabkan maklumat pasaran yang terbatas tentang perbezaan upah dan peningkatan kos psikik.

Jarak antara satu kawasan dengan kawasan lain dengan sistem pengangkutan lancar dan tertib, dan laluan yang lebar dan elok akan memudahkan terjadinya penghijrahan. Sebagaimana di katakan oleh Norimah Rambeli dan Fauziah Che.Leh (2010), bahawa perkembangan sistem pengangkutan juga mempunyai kesan tersendiri dalam mempengaruhi penghijrahan dengan mendekatkan dua kawasan yang terlibat iaitu, pertama. mempercepat berlakunya penghijrahan keluar kota ke kota, kedua. mengakibatkan orang berulang-alik antara kota dan kawasan sekitarnya, makanya istilah penghijrahan terkandung makna iaitu, pergerakan dalam jarak dan perubahan dalam tempat tinggal biasa. Mukhtar Amal (2004) dari hasil kajiannya di Kota Makassar membuktikan bahawa; (1). terdapat pengaruh jarak terhadap kehadiran penghijrahan di Kota Makassar, semakin dekat jarak kabupaten dengan Kota Makassar, peluang untuk menjadi migran di Kota akan semakin besar; (2). terdapat perbezaan ciri demografi maupun sosial budaya antara migran risen dengan bukan risen; (3). keberadaan migran asal dari kabupaten berdampak terhadap aspek demografi dan sosial penduduk Kota Makassar.

Dari segi ciri demografi, migran yang masuk ke kawasan destinasi mempunyai ciri yang berbeza dengan penduduk yang sedia menempati kawasan berkenaan. Dalam jumlah besar migran tersebut akan membentuk ciri yang dapat berimpak

terhadap penduduk di daerah destinasi. Secha Alatas (1993) menjelaskan bahwa penghijrahan merupakan salah satu pemboleh ubah demografi yang tidak hanya mempengaruhi saiz penduduk suatu daerah, tetapi juga memberikan pengaruh yang cukup bererti dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, persekitaran fizikal mahupun komposisi penduduk. Berkaitan dengan ciri migran, penduduk yang berhijrah biasanya mempunyai ciri-ciri khas yang membezakan mereka daripada penduduk asal di tempat destinasi. Menurut Lucas (1995), ciri-ciri yang paling umum adalah jantina, umur dan pendidikan atau keterampilan. Para migran umumnya terdiri daripada kalangan lelaki, berusia relatif muda, berpendidikan tinggi, sehingga penghijrahan mereka mampu merubah struktur sosial demografi sama ada di daerah asal mahupun di destinasi.

Sulaeman Abdul Kahar (2001) mendapati dari hasil kajiannya bahawa; (1). migran usia muda cenderung melakukan migrasi untuk pekerjaan dan sekolah; (2). semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula peluang untuk melakukan migrasi; (3). laki-laki cenderung melakukan penghijrahan yang jauh; (4). perempuan cenderung melakukan penghijrahan jarak pendek tetapi yang sudah berkahwin mempunyai kecenderungan sama dengan lelaki; (5). peluang penghijrahan dengan tujuan bekerja dan melanjutkan pendidikan mempunyai hubungan positif di destinasi.

Rogers (1984) mendapati bahawa penghijrahan banyak berlaku dalam kalangan penduduk umur awal duapuluhan dan yang terendah awal atau pertengahan umur belasan. Kecenderungan ini dapat dihubungkan dengan kenyataan bahawa pada umur tersebut individu biasanya sudah tamat bersekolah, pencari pekerjaan, mulai mandiri, memperoleh anak



yang dapat menyebabkan penduduk melakukan penghijrahan. Penemuan Badan Pusat Statistik ( BPS 1999b) dalam kajian di Kota Makassar menunjukkan tentang umur migran, iaitu kumpulan umur terbesar (87.4 peratus) yang berhijrah masuk ke kota tersebut adalah pada umur muda (10-29 tahun).

Abdullah (1996) dari hasil penyelidikan di Provinsi Lampung mendapati bahawa, pertama perbezaan kumpulan umur yang besar terjadi pada jangkaan probabiliti dua kali lebih besar daripada penduduk tua; kedua. migran yang masuk sebahagian besar berpendidikan sekolah dasar ke bawah; ketiga. expected probabiliti migran menurut pendapatan perkapita tidak berbeza, tapi menurut nilai Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) sektor industrialisasi terdapat perbezaan menurut perkembangan industri daerah asal yang rendah mempunyai kemungkinan penghijrahan ke provinsi Lampung lebih besar di bandingkan dengan mempunyai industrialisasi lebih tinggi dari provinsi Lampung.

## BAB III

# PROSES ADAPTASI MIGRAN DI DESTINASI

Ida Bagus Wirawan (2012) dan Ambo Upe (2012), memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekadar melaksanakan tetapi juga menempatkan diri dalam persekitaran berpikir dan perilaku dengan bermotif pada matlamat yang hendak di capai atau dicita-citakan. Oleh itu, migran semasa berada di destinasi perlu berinteraksi, menyesuaikan diri dan beradaptasi demi mencapai cita-cita asal mereka berhijrah, iaitu untuk memperbaiki status sosial ekonomi diri dan kemudian keluarganya.

Interaksi adalah stimulasi dan tanggapan antara manusia atau hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi pihak-pihak tertentu. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamik yang menyangkut hubungan antara seorang individu dengan seorang individu yang lain, antara kelompok manusia mahupun antara individu dengan kelompok manusia (Soerjono Soekanto 2007). Pola-pola hubungan manusia yang berbeza menurut situasi, keadaan dan kepentingan masing-masing individu atau kelompok dapat diwujudkan dalam proses hubungan sosial yang boleh berdampak positif atau negatif bagi

migran atau penduduk tempatan. Sehubungan dengan hal ini. Pendershot (1970) mengemukakan teori segregasi dengan menyatakan bahawa para migran akan memilih tempat tinggal di mana para jiran-tetangga atau kawan-kawan di daerah asalnya telah menetap. Mereka berusaha mencari perlindungan dengan memilih tempat tinggal yang sama atau sekurang-kurangnya berhampiran dengan tempat tinggal orang-orang yang mereka kenali sebelumnya, iaitu mereka yang berasal dari daerah yang sama, budaya atau agama, norma dan nilai yang sama (Ida Bagus Mantra 1985).

Soerjono Soekanto (2007) membahagikan proses interaksi sosial kepada dua jenis, iaitu: proses asosiatif, dan proses disosiatif. Proses-proses yang sifatnya asosiatif lebih cenderung kepada terciptanya suatu keseimbangan dalam interaksi sosial yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Proses asosiatif ini boleh berbentuk akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses disosiatif cenderung kepada terciptanya suatu keadaan yang tidak seimbang. Dalam kehidupan masyarakat masa kini, interaksi seperti ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan dan konflik yang disertai dengan ancaman dan tindakan kekerasan yang kadangkala berpanjangan. Bagi Abdulsyani (2007) pula, interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik antara individu dan golongan dalam usaha mereka memecahkan persoalan yang dihadapi dan di dalam mereka mencapai matlamatnya, Bahkan interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam bentuk fikiran dan tindakan. (Wila Huky 1985).

Dalam proses sosial, terjadi interaksi sosial apabila berlaku perhubungan sosial dan komunikasi sosial. Menurut

Soerjono Soekanto (2007), kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu: pertama, antara individu; kedua, antara individu dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya; dan ketiga antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. Lebih jauh Soerjono Soekanto (2007), mengatakan bahwa komunikasi sosial adalah seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang terwujud pembicaraan, pergerakan jasmani atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Dengan adanya komunikasi sosial antara orang perseorangan atau antara kelompok dengan bersikap dan perasaan saling memahami dengan maksud dan matlamat masing-masing (hubungan timbal balik) dapat tercapai, berarti terjadi kontak sosial. Oleh itu sangat penting interaksi sosial sebagai kunci daripada semua perhubungan sosial, kerana tanpa interaksi sosial yang harmonia dalam pergaulan, maka tak mungkin ada kehidupan bersama secara damai.

Menurut Soerjono Soekanto (2007), dikatakan bahawa secara umum bentuk-bentuk interaksi sosial adalah kerjasama, persaingan, pertikaian atau pertentangan dan akomodasi. Bentuk-bentuk sosial tersebut terjadi secara berantai berterusan, malahan dapat berlangsung tanpa berujung. Interaksi sosial tersebut boleh bermula persaingan, pertikaian mahupun akomodasi, kemudian dapat lagi menjadi kerjasama, apabila persaingan ini memuncak, maka akan terjadi pertikaian.

## **Remitans**

Remitans ialah kiriman, lazimnya wang tunai, yang dilakukan oleh migran kepada keluarganya yang ditinggalkan di kampung. Menurut Arief Nasution (1998), pendapatan migran

adalah salah satu aspek penting yang sering dibahas dalam kajian mobilti penduduk dan menganggap hal ini sebagai salah satu faktor dorong atau tarikan yang biasanya mewujudkan penghijrahan penduduk dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Lebih jauh Arief Nasution (1998), menyatakan bahawa daripada hasil penyelidikannya di Kuala Lumpur diketahui bahawa migran Indonesia yang bekerja di sektor pembinaan memperoleh pendapatan cukup tinggi jika berbanding dengan jumlah gaji yang mereka terima di Indonesia. Ini membolehkan migran menghantar wang untuk keluarga di kampung. Justeru, remitans adalah salah satu impak positif mobiliti. Pada hakikatnya orang yang merantau ke luar daerah mahupun ke negara sebahagian besarnya mempunyai hasrat mahu mengekalkan ikatan kekeluargaan dan rohani dengan keluarga mereka di kampung (desa) halaman. Ikatan kerohanian tersebut biasanya dinyatakan melalui arus kiriman atau remitans berupa wang atau barang lain yang diperoleh di destinasi. Beberapa penyelidikan yang telah dilakukan menunjukkan bahawa walaupun migran telah meninggalkan kampung halamannya, tetapi mereka tetap manjalin perhubungan baik secara sosial mahupun ekonomi dengan keluarganya di daerah asal melalui remitans (Abdul Samad Hadi 1989).

Perhubungan migran dengan kawasan asal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat sosial ekonomi, pendidikan, status perkahwin, jumlah tanggungan, lama merantau dan jarak antara daerah asal dan destinasi migran. Biasanya perhubungan itu berupa kunjungan, hantar wang, barang ataupun sekedar hantar salam sahaja (Ida Bagus Mantra 1987). Juga pertukaran informasi atau idea-idea ke daerah asal. Selanjutnya Ida Bagus Mantra, menjelaskan bahawa selain remitans berupa wang dan barang yang bernilai ekonomi, remitans dapat juga berupa

gagasan atau idea-idea, pengetahuan, pengalaman baru yang diperoleh selama bekerja di kota. Inilah yang selanjutnya disebut sebagai remitans sosial. Remitans sosial menurut Levitt 1996 dalam Tyas Retno Wulan (2007), adalah idea-idea, perilaku, identiti dan aset sosial yang mengalir dari negara pengirim ke negara penerima migran.

Remitans ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah asal terutama keluarga atau sanak saudara yang ditinggalkan. Tahir Kasnawi (1994) dalam penyelidikannya tentang mobiliti tenaga kerja ke Timur Tengah menyimpulkan bahawa migran yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing menghantarkan 70 peratus dan 80 peratus penghasilannya kepada keluarga mereka di daerah asal. Sedangkan migran yang berasal dari Yogyakarta mencapai sekitar 85 peratus sebahagian besar wangnya disimpan selama di Timur Tengah. Hal ini dapat mencerminkan perbezaan latar belakang beban tanggungjawab mereka dengan keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Nur Hadi Wiyono (1994) di desa-desa di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mendapati bahawa remitans yang dihantar oleh migran dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penemuan lain yang menarik daripada penyelidikan ini adalah sebahagian pendapatan yang diperoleh migran digunakan untuk mengembangkan atau memperluas usaha ekonomi sama ada dalam bidang pertanian, perikanan, penternakan atau perniagaan.

Hugo (1978) dalam kajiannya tentang mobiliti penduduk di Jawa Barat mendapati bahawa sekitar 74 peratus migran menghantar wang ke kampung halamannya. Selanjutnya

dijelaskan terdapat 57 peratus daripada jumlah pendapatan mereka digunakan untuk membiayai kehidupan di kota, 11 peratus untuk perbelanjaan pengangkutan dan 32 peratus dihantar ke kampung halaman. Hal yang serupa ditemui oleh Forbes (1981) dalam kajiannya dalam kalangan penarik beca di Ujungpandang (Kota Makassar). Hugo (1978) turut mencadangkan supaya remitans dibahagikan kepada dua kategori: pertama, remitans keluar, iaitu wang yang berasal dari rumah tangga migran yang dikeluarkan untuk tambang semasa perjalanan, perbelanjaan selama mencari pekerjaan serta kos hidup selama belum mendapatkan pekerjaan di destinasi. Untuk migran jarak dekat, nilai remitans relatif kecil, sedangkan migran jarak jauh nilai remitans keluar agak banyak; Kedua, remitans masuk, iaitu sama ada barang, wang atau idea yang dihantar atau dibawa pulang oleh migran ke daerah asal. Besarnya remitans masuk ditentukan oleh ciri migran sebagai pekerja, kemahiran yang dimiliki, lamanya kontrak kerja, perhubungan migran dengan keluarganya, serta keperluan asas di destinasi. Kajian empiris tentang remitans yang lain termasuk yang dilakukan oleh Effendi (1992) di Jatinom, Indonesia. mendapati bahawa remitans masuk telah banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif seperti aset usaha untuk memajukan perdagangan, pertanian dan perniagaan lain. Usaha tersebut berskala kecil, tetapi mempunyai impak positif kepada perusahaan tersebut selain menjana peluang pekerjaan di desa.

Begitu kuatnya perhubungan antara migran dengan aspek sosiobudaya dan ekonomi di daerah asal, serta tingginya nilai budi dan tanggungjawab migran dalam membantu saudara atau anggota keluarga migran di daerah asal, menjadikan remitans sangat penting malahan menjadi instrumen dalam pemeliharaan dan penerusan perhubungan sosial antara mereka. Menurut Hugo

dan Renard (1994) dalam Astinah Adnan (2004) di Asia dan negara-negara Afrika remitans memberi manfaat yang sangat positif. Penggunaan remitans antara lain termasuklah untuk kos sekolah, memperbaiki kemudahan pendidikan, kos kesihatan selain memenuhi keperluan makanan. Paling penting remitans telah banyak membantu membebaskan keluarga daripada belenggu kemiskinan. Lebih lanjut perlu dinyatakan juga bahawa remitans juga mempunyai impak negatif seperti menggalakkan sifat kepenggunaan yang boros dalam kalangan penduduk desa. Perbelanjaan secara yang berlebihan memberikan tekanan inflasi di desa. Namun impak negatif tidak menyeluruh dan hanyak berlaku dalam kes tertentu sahaja. Secara umumnya remitans lebih berdampak positif kepada keluarga migran. Oleh itu penghijrahan dan remitans di Indonesia hampir tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya perlu dilihat secara integral dalam konteks pembangunan masyarakat seperti yang berlaku di Indonesia.

Penghijrahan ke kota merupakan satu fenomena yang berlaku sejak dahulu sehingga masa kini. Keadaan yang sama turut berlaku pada Kota Makassar. Keadaan yang berlaku ini adalah disebabkan oleh peningkatan pembangunan kota terutamanya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, prasarana dan sarana, kemudahan fasiliti lainya. Transformasi sosial dan ekonomi migran merupakan daya tarikan kepada masyarakat untuk bertumpu di kota, terutama di kota utama yang berdayahuni.

Secara keseluruhan huraian bab ini telah mengetengahkan tentang proses penghijrahan ke kota yang mempengaruhi ciri demografi, sosial, ekonomi, budaya, dan politik penduduk sesebuah wilayah, negeri atau negara yang



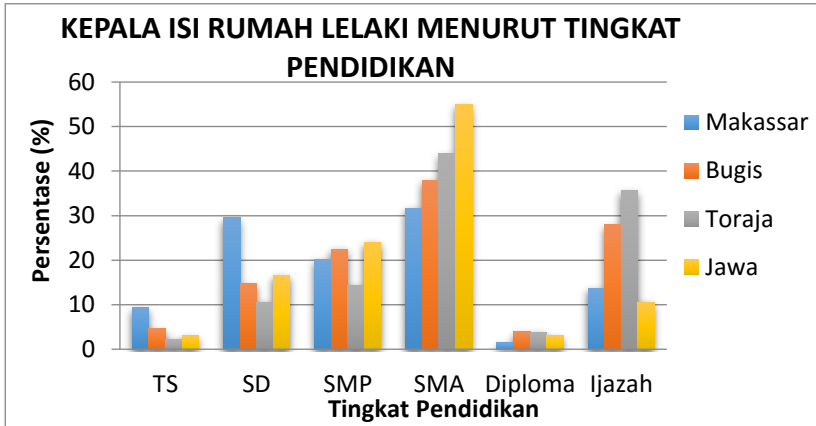
terbabit. Urbanisasi pada dasarnya berakhir dengan transformasi sosial dan ekonomi migran di destinasi dan proses adaptasi dan akomodasi dengan persekitarannya perlu ditingkatkan secara berterusan untuk kelangsungan hidup aman dan damai.

### **Tingkat Pendidikan**

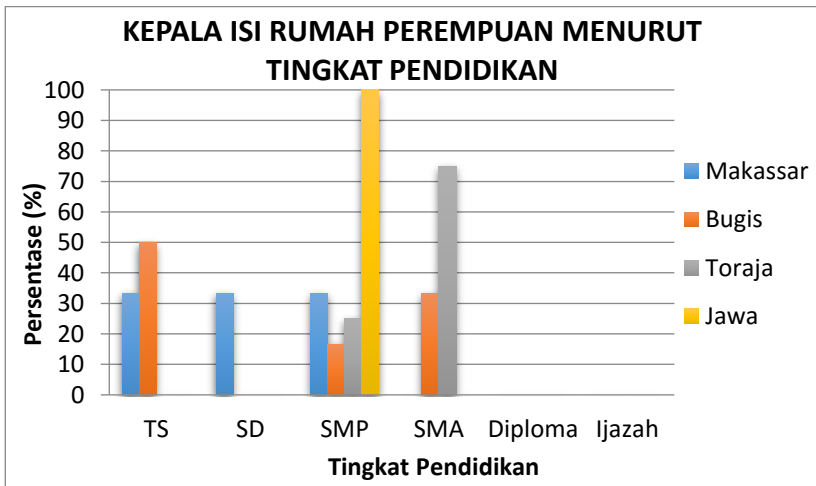
Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahawa tingkat pendidikan KIR migran secara keseluruhan majoriti migran berpendidikan peringkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA) seramai 56.9 peratus, seterusnya peringkat Diploma dan Ijazah seramai 22.00 peratus dan yang paling rendah tingkat pendidikan adalah migran yang Tidak Sekolah (TS) hanya 5.00 peratus (Gambar 3.1).

Dari segi lain menunjukkan bahawa tingkat pendidikan migran lelaki terutama pendidikan peringkat SMA lebih ramai dari etnik Jawa, kemudian pendidikan peringkat SMP hampir sama ramai antara etnik Jawa, Bugis dan Makassar, sebaliknya migran lelaki berpendidikan peringkat Sekolah Dasar atau Sekolah Rendah (SD) lebih ramai dari etnik Makassar, sedangkan etnik Toraja lebih ramai berpendidikan ijazah di bandingkan dengan etnik lainnya (Gambar 3.1)

Berasaskan Gambar 3.2 didapati bahawa migran perempuan lebih ramai berpendidikan peringkat SMP terutamanya daripada etnik Jawa. Sementara etnik Toraja lebih ramai berpendidikan peringkat SMA manakala etnik Bugis lebih ramai berpendidikan TS. Sebaliknya etnik Makassar hampir sama ramainya yang berpendidikan TS, SD dan SMP tetapi pada pendidikan peringkat Diploma dan Ijazah tidak ada daripada keempat-empat etnik yang berpendidikan tersebut.



Gambar 3.1 Tingkat pendidikan KIR migran lelaki menurut etnik di Kota Makassar



Gambar 3.2 Tingkat pendidikan KIR migran perempuan menurut etnik di Kota Makassar



## BAB IV

# FAKTOR PENGHIJRAAN MIGRAN

Proses penghijrahan dapat terjadi kerana berbagai-bagai faktor yang terbahagi kepada faktor tolakan sosial dan ekonomi di daerah asal dan faktor tarikan sosial dan ekonomi di destinasi. Munculnya kedua-dua faktor ini kerana adanya perbezaan antara desa dan kota dari berbagai aspek kehidupan. Ramai para sarjana berpendapat bahawa terjadinya penghijrahan kerana berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, persekitaran, keamanan, perkhidmatan dan sebagainya (Maulien Khaerina sari & Haryo Winarso 2007; Noraziah Ali & Mohd Azlam Abdullah 2009; Usman Hj.Yaakab & Tarmiji Masron 2010; Nitithan 2011)

### **Faktor Sosial**

Pada bahagian ini dibincangkan faktor tolakan termasuklah sokongan keluarga, fasiliti pendidikan yang terbatas, keamanan dan perhubungan keluarga. Manakala faktor tarikan dibincangkan juga tentang ikut keluarga/kawan, pendidikan dan fasiliti yang lebih baik.

#### **a) Faktor Tolakan**

Faktor tolakan yang berasal dari daerah asal berbeza-beza bagi setiap migran yang melakukan penghijrahan. Jika faktor

tolakan lebih kuat maka akan terjadi penghijrahan, walau bagaimanapun tidak boleh diabaikan faktor-faktor lainnya.

Tabel 4.1 menunjukkan bahawa faktor tolakan keempat-empat etnik di daerah asal majoriti adalah faktor sokongan keluarga (63 peratus). Hal ini kerana keadaan di daerah asal yang kurang menyokong kehidupan mereka mengakibatkan keluarga memberikan sokongan untuk berhijrah ke kota dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Di antara faktor sokongan yang paling ketara adalah etnik Bugis (75 peratus), diikuti Toraja (65.2 peratus) dan Makassar (60 peratus). Disamping itu faktor fasiliti pendidikan yang terbatas turut memberikan sumbangan sebagai faktor tolakan migran terutamanya etnik Jawa (40.5 peratus), walaupun Pulau Jawa dikenal banyak tersedia perkhidmatan fasiliti pendidikan tetapi di daerah asal migran peluangnya terbatas. Hal ini merupakan salah satu alasan bagi etnik Jawa terutamanya dari Jawa Timur (Surabaya). Migran dari Jawa Timur ke Kota Makassar dengan menggunakan pengangkutan jalan laut sangat lancar dan murah. Selain itu keluarga etnik Jawa sudah tinggal dan sekolah lebih awal di Kota Makassar yang dapat dijadikan sebagai titik awal migran untuk tinggal di Kota Makassar.

Demikian juga halnya dengan etnik Toraja, faktor pendidikan merupakan salah satu faktor tolakan di daerah asal iaitu, seramai 28.3 peratus. Hal ini kerana keterbatasan fasiliti pendidikan yang diinginkan oleh para migran di daerah asal, di samping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas yang dapat diperoleh di Kota Makassar. Keadaan ini menyokong migran etnik Toraja berhijrah ke Kota Makassar.

Manakala faktor gangguan keamanan menyokong migran berhijrah ke Kota Makassar. Gangguan keamanan di daerah asal seperti gangguan jenayah, seringkali terjadi perbezaan atau pertengkaran dengan jiran tetangga sehingga menjadikan faktor ini sebagai salah salah faktor tolakan terutamanya etnik Jawa dan etnik Makassar. Sedangkan faktor lainnya kurang senang dengan keluarga hanya berlaku untuk etnik Toraja (2.2 peratus).

Tabel 4.1 Faktor tolakan sosial migran dari daerah asal engikuti etnik

Faktor Tolakan	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
Sokongan keluarga	27	60,0	42	75,0	30	65,2	17	45,9	116	63,0
Fasiliti pendidikan terbatas	12	26,7	10	17,9	13	28,3	15	40,5	50	27,2
Gangguan keamanan	6	13,3	4	7,1	2	4,3	5	13,5	17	9,2
Kurang senang dengan keluarga	0	0	0	0	1	2,2	0	0	1	0,5

Nota : Bil adalah Bilangan

Sumber: Kerja lapangan 2011

## b) Faktor Tarikan

Penghijrahan terjadi selain kerana faktor tolakan juga faktor tarikan yang sangat penting dalam menarik migran ke destinasi, Jika kota itu menjanjikan ruang dan peluang yang seluas-luas untuk beraktiviti di bidang sosial dan perkhidmatan

yang baik dan lancar sehingga dapat meningkatkan kualiti hidup penduduknya pada masa hadapan.

Tabel 4.2 menunjukkan bahawa faktor tarikan keempat-empat etnik didominasi faktor ikut keluarga/kawan (64.1 peratus), diikuti fasiliti pendidikan yang memadai (27.2 peratus) dan fasiliti lain yang lebih baik (8.7 peratus). Di antara faktor tarikan ikut keluarga/kawan, majoriti etnik Bugis (71.4 peratus), diikuti etnik Jawa (67.6 peratus), kemudian etnik Toraja (58.5 peratus) dan etnik Makassar (57.8 peratus).

Tabel 4.2 Faktor tarikan sosial migran ke Kota Makassar mengikut etnik

Faktor Tarikan	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
Ikut keluarga/kawan	26	57,8	40	71,4	27	58,7	25	67,6	118	64,1
Pendidikan yang baik	14	31,1	12	21,4	12	26,1	12	32,4	50	27,2
Fasiliti yang lebih baik	5	11,1	4	7,1	7	15,2	0	0	16	8,7
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>184</b>	<b>100</b>

Nota : Bil adalah Bilangan.

Sumber : Kerja lapangan 2011

Berasaskan hasil kajian bahawa migran keempat-empat etnik ini sangat ketara perhubungan yang erat antara sesama migran dari daerah asal yang sama. Keadaan ini memberi peluang dan sokongan kepada keluarga migran di wilayah asal untuk berhijrah ke Kota Makassar. Selain karena pengangkutan dari wilayah asal etnik sangat lancar ke Kota Makassar termasuklah

etnik Makassar, Bugis dan Toraja. Manakala daerah asal etnik Jawa, jaraknya jauh dari Kota Makassar tetapi perhubungan jalan laut sangat lancar. Hal ini sama yang disampaikan oleh Jones (1981) bahawa semakin meningkatnya kemudahan pengangkutan dan komunikasi akan meningkatkan aliran migrasi antar wilayah. Selain faktor ikut keluarga/kawan, faktor berikutnya adalah faktor pendidikan. Faktor ini memberi ruang dan peluang kepada migran keempat-empat etnik untuk berhijrah ke Kota Makassar kerana Kota Makassar merupakan kota yang memiliki fasiliti pendidikan yang sangat memadai dan kompleks untuk kawasan Provinsi Sulawesi Selatan bahkan untuk kawasan Indonesia Timur.

Demikian juga fasiliti yang lebih baik di Kota Makassar merupakan salah satu faktor tarikan sosial bagi migran terutama migran etnik Toraja (15.2 peratus), diikuti migran etnik Makassar (11.1 peratus). Manakala migran etnik Jawa hanya (0.0 peratus). Hal ini bagi etnik Jawa tidak terpengaruh kerana di Pulau Jawa termasuk memiliki fasiliti yang lebih baik.

### **Faktor Ekonomi**

Bagian ini membincangkan faktor tolakan dan faktor tarikan ekonomi migran. Faktor tolakan terutama peluang bekerja terbatas, pendapatan rendah dan pindah tugas kerja. Manakala faktor tarikan termasuklah diantaranya peluang bekerja banyak, pendapatan tinggi dan faktor pindah tugas kerja.



## a) Faktor Tolakan

Faktor tolakan yang berasal dari daerah asal berbeza-beza bagi setiap migran yang melakukan penghijrahan. Jika faktor tolakan lebih kuat maka akan terjadi penghijrahan. Bagi Daryanto (1996) menjelaskan bahawa faktor ekonomi merupakan alasan individu melakukan penghijrahan.

Berasaskan Tabel 4.3 faktor majoriti di daerah asal yang menjadi faktor tolakan migran adalah faktor peluang kesempatan bekerja terbatas, menyusul pendapatan rendah. Ini menunjukkan bahawa migran berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup kerana di daerah asal kurang mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik.

Tabel 4.3 Faktor tolakan ekonomi migran dari daerah asal mengikuti etnik

Faktor Tolakan	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
Peluang bekerja terbatas	63	60,0	64	68,1	82	78,8	39	34,5	248	59,6
Pendapatan rendah	39	37,1	22	23,4	12	11,5	63	55,8	136	32,7
Pindah tugas kerja	3	2,9	8	23,4	10	9,6	11	9,7	32	7,7
Jumlah	105	100	94	100	104	100	113	100	416	100

Nota : Bil adalah Bilangan

Sumber :Kerja lapangan 2011

Daripada segi faktor tolakan keempat-empat etnik, didapati faktor peluang bekerja terbatas di daerah asal. Di antara keempat empat etnik itu, etnik Toraja yang paling ramai 78.8 peratus berbanding dengan etnik lainnya, paling sedikit etnik Jawa 34.5 peratus. Manakala faktor pendapatan, etnik Jawa yang paling ramai 55.8 peratus, etnik Toraja yang paling sedikit hanya 11.5 peratus. Selain daripada itu, faktor pindah tugas kerja turut memberikan sumbangan terhadap migran untuk melakukan penghijrahan, walaupun jumlahnya kecil hanya 7.7 peratus.

## **b) Faktor Tarikan**

Penghijrahan terjadi selain kerana faktor tolakan juga faktor tarikan yang sangat penting dalam menarik migran ke destinasi, apatalagi jika kota itu menjanjikan ruang dan peluang yang seluas-luas untuk beraktiviti di bidang ekonomi, dan perkhidmatan yang baik dan lancar sehingga dapat meningkatkan kualiti hidup penduduknya pada masa hadapan yang lebih baik.

Tabel 4.4 menunjukkan bahawa faktor tarikan tidak berbeza dengan faktor tolakan tetap didominasi faktor peluang bekerja, pendapatan dan pindah tugas. Pola ini berlaku untuk keempat-empat etnik. Dapatan ini selari hasil penyelidikan di Malaysia oleh Norimah Rambeli & Fauziah Che Leh 2010 bahawa faktor tarikan yang paling berpengaruh terjadinya penghijrahan adalah peluang pekerjaan.

Tabel 4.4 Faktor tarikan ekonomi migran ke Kota Makassar mengikuti etnik

Faktor Tarikan	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
<b>Peluang bekerja banyak</b>	63	60,0	64	68,1	82	78,8	39	34,5	248	59,6
<b>Pendapatan tinggi</b>	39	37,1	22	23,4	12	11,5	63	55,8	136	32,7
<b>Pindah tugas kerja</b>	3	2,9	8	23,4	10	9,6	11	9,7	32	7,7
<b>Jumlah</b>	105	100	94	100	104	100	113	100	416	100

Nota : Bil adalah Bilangan

Sumber : Kerja lapangan 2011

Daripada kedua-dua faktor yang mempengaruhi penghijrahan sama ada faktor tolakan mahupun faktor tarikan, ternyata menunjukkan bahawa faktor ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) yang masih dominan dalam melakukan penghijrahan, namun terjadi pertukaran, dulunya faktor pendidikan selalu menempati urutan kedua, sesudah faktor ekonomi, tetapi masa kini faktor keluarga/kawan yang menjadi faktor kedua terjadinya penghijrahan di Kota Makassar, sehingga tidak hairan jika migran itu ada tempat pemukiman etnik yang berasal dari daerah yang sama di Kota Makassar.

Dalam bab ini menghuraikan ciri-ciri dan faktor migran, termasuklah di antaranya latar belakang responden yang berkait jumlah migran keempat-empat etnik yang paling ramai tinggal di Kota Makassar, iaitu etnik Makassar, Bugis, Toraja dan Jawa. Dihuraikan juga umur dan jantina migran yang dipersembahkan dalam bentuk gambar dan piramid. Selain daripada itu status

perkahwinan, majoriti sudah berstatus berkahwin, diikuti belum berkahwin selebihnya status balu dan duda.

Bab ini turut dibincangkan tingkat pendidikan. Majoriti tingkat pendidikan KIR migran peringkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Manakala jenis pekerjaan utama lebih ramai terbabit sebagai perniagaan dan usahawan, Selebihnya bertaburkan pada jenis pekerjaan lainnya. Walaupun dalam pekerjaan sambilan mojoriti bekerja sebagai supir/ojek/beca. Daripada segi pendapatan utama KIR migran 75.5 peratus berpendapatan antara 1.1 hingga 3.0 juta rupiah (RM 333 – 9,000).

Pada bab ini juga dihuraikan tentang ketibaan KIR migran mula dari tempoh 1950-an hingga tempoh 2009. Pada tempoh 1980-an mulai ramai ketibaan migran hingga berterusan pada tempoh 2000-an. Mula ketibaan KIR migran secara sendirian, bersama isteri dan bersama isteri dan anak, tetapi mojoriti bersama isteri. Maklumat tentang Kota Makassar terutama di peroleh dari keluarga/kawan yang lebih awal tinggal di Kota Makassar, selebihnya melalui maklumat surat akbar, televisyen dan datang sendiri ke Kota Makassar.

Selain daripada itu daerah asal KIR migran dari pelbagai kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mahupun dari luar provinsi Sulawesi Selatan. KIR migran yang paling ramai ke Kota Makassar dari dalam kawasan Provinsi Sulawesi Selatan terutamanya dari tiga kabupaten iaitu, Kabupaten Tanah Toraja (etnik Toraja), diikuti Kabupaten Jeneponto (etnik Makassar), Kabupaten Bone (etnik Bugis), dan etnik Jawa terutamanya dari Provinsi Jawa Timur.

Hal ini dapat difahami bahawa keriga-tiga kabupaten daerah asal migran yang memiliki faktor tekanan bagi migran berhijrah. salah satu faktor tekanan di daerah Tanah Toraja bagi etnik Toraja melakukan penghijrahan kerana adanya upacara recam yang menuntut penduduk yang memiliki kasta atau tingkatan sosial dalam masyarakat etnik Toraja untuk menyediakan wang membeli hewan seperti kerbau atau babi untuk disumbangkan pada ucapan recam sehingga mereka perlu mencari pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Selanjutnya Kabupaten Jeneponto merupakan daerah kering lebih banyak mendapat musim kemarau daripada musim hujan sehingga penduduknya terbatas dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada. Ini merupakan tekanan bagi migran etnik Makassar dari Kabupaten Jeneponto kerana keadaan alamnya. Manakala Kabupaten Bone potensi lahan pertanian tersedia tetapi penduduk kurang terlibat dalam bidang pertanian, lebih banyak dalam bidang lain seperti perniagaan, supir dan lainnya sehingga menjadi tekanan penduduknya untuk mengembangkan usahanya yang lebih baik dengan cara berhijrah.

Dalam bab ini dibincangkan juga faktor tolakan dan faktor tarikan KIR migran, terutamanya faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial sama ada faktor tolakan mahupun faktor tarikan. Majoriti faktor sokongan ikut keluarga/kawan yang mempengaruhi KIR migran melakukan penghijrahan, diikuti faktor fasiliti pendidikan. Manakala faktor ekonomi sama ada faktor tolakan mahupun faktor tarikan. Majoriti faktor pekerjaan dan pendapatan yang mempengaruhi KIR migran melakukan penghijrahan dari daerah asal ke destinasi.

# BAB V

## TRANSFORMASI SOSIAL MIGRAN SELEPAS BERHIJRAH

Penghijrahan merupakan satu proses penting dalam perancangan pembangunan. Penghijrahan telah membawa banyak perubahan dan kesan kepada tempat yang dituju dan dapat menghasilkan mobiliti sosial dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan penduduk, termasuklah migran. Oleh itu, bab ini membincangkan transformasi sosial migran yang berhijrah ke Kota Makassar yang berkait rapat dengan perubahan demografi migran, pendidikan, interaksi, peranan dan tanggungjawab NGO etnik migran terhadap pembangunan, dan impak transformasi sosial migran sama ada impak positif mahupun negatif.

Pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan transformasi sosial KIR migran ialah dengan mengkaji perubahan yang terjadi kepada KIR migran berdasarkan etnik antara daerah asal dengan di destinasi terutama yang berkait rapat dengan transformasi sosial. Untuk menunjukkan transformasi sosial itu, data kuantitatif dipersembahkan dengan menggunakan statistik deskriptif yang dipersembahkan dalam bentuk taburan kekerapan, tabel silang dan gambar.

Pada bahagian ini dibahas komposisi penduduk yang telah berubah baik daripada segi jumlah migran keempat-empat etnik dan juga jumlah penduduk Kota Makassar. Selain itu di huraikan juga saiz kelahiran dan kematian, struktur umur dan jantina, status perkahwinan di Kota Makassar.

## **Perubahaan Kependudukan**

Berasaskan data daripada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar menunjukkan bahawa jumlah penduduk Kota Makassar berasaskan banci pada tahun 2000 tercatat seramai 1,100,019 orang meningkat kepada 1,179,023 orang tahun 2005 berterusan meningkat kepada 1,352.136 orang pada tahun 2012. Ini bererti ada peningkatan penduduk seramai 252,117 orang atau 22.20 peratus selama tempoh 12 tahun dari tempoh 2000 – 2012. Purata penambahan penduduk setiap tahun seramai 21,019 orang termasuk diantaranya sumbangan daripada jumlah migran yang ada di Kota Makassar masa kini.

Jika disemak semula pola kedatangan KIR migran keempat-empat etnik ke Kota Makassar seramai 39.17 peratus datang bersendirian, 44.84 peratus datang bersama isteri, dan 16.00 peratus datang bersama-sama isteri dan anak. Keadaan ini jika dikira secara keseluruhan migran ke Kota Makassar seramai kira-kira 1061 orang. Masa kini sudah meningkat seramai 2662 orang yang terdiri daripada lelaki 50.12 peratus mewakili 1,334 orang, perempuan 49.88 peratus mewakili seramai 1,328 orang. Daripada jumlah migran secara keseluruhan memberikan kontribusi penumpuan penduduk Kota Makassar yang semakin berterusan dan sesak dari tahun ke tahun kerana ketibaan migran

dari pelbagai daerah sama ada di dalam mahupun di luar kawasan provinsi Sulawesi Selatan ke Kota Makassar.

Dari segi pertambahan penduduk kerana kelahiran daripada isi rumah migran juga turut menambah jumlah penduduk Kota Makassar (Tabel 5.1).

Berasaskan Tabel 5.1 didapati bahawa secara keseluruhan jumlah kelahiran daripada isi rumah migran seramai 1007 orang yang terdiri daripada perempuan sebanyak 52.04 peratus berbanding kelahiran lelaki 47.96 peratus atau nisbah jantina 92. Di antara keempat-empat etnik yang paling banyak kelahiran perempuan dari etnik Makassar seramai 173 orang, diikuti etnik Bugis 131 orang, manakala kelahiran lelaki lebih banyak dari etnik Makassar, diikuti etnik Toraja. Bagi etnik Jawa sama ada kelahiran lelaki mahupun perempuan kedua-duanya lebih sedikit berbanding dengan kelahiran daripada etnik lain kerana etnik Jawa lebih fokus kepada kawalan kelahiran dan perancang keluarga. Hal ini sama dengan etnik Cina di Malaysia dalam pembatasan jumlah kelahiran secara terkawal (Saad Mohd Said 2003; Usman Hj.Yaakob & Tarmiji Masron 2010; dan Aishah@Eshah Haji Mohamed 2013).

Tabel 5.1. Jumlah kelahiran di Kota Makassar mengikut etnik

Kelahiran	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
<b>Lelaki</b>	153	46.93	115	46.75	123	51.04	92	47.42	483	47.96
<b>Perempuan</b>	173	53.07	131	53.25	118	48.96	102	52.58	524	52.04
<b>Jumlah</b>	326	100	246	100	241	100	194	100	1007	100

Nota : Bil adalah Bilangan

Sumber : Kerja lapangan 2011



Dari segi kematian didapati bahawa jumlah kematian secara keseluruhan daripada keempat-empat etnik ialah seramai 64 orang. Faktor kematian kerana penyakit ialah sebanyak 79.7 peratus jauh lebih banyak berbanding kematian kerana kemalangan sebanyak 20.3 peratus (Tabel 5.2)

Tabel 5.2. Faktor kematian di Kota Makassar mengikuti etnik

Faktor Kematian	Sebab Kematian Menurut Etnik dan Jantina														
	Makassar			Bugis			Toraja			Jawa			Jumlah		
	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
Kemalangan	5	1	6	2	2	4	0	3	3	0	0	0	7	6	13
Penyakit	10	9	19	8	0	8	8	6	14	4	6	10	30	21	51
Jumlah	15	10	25	10	2	12	8	9	17	4	6	10	37	27	64

Nota : L : Lelaki, P : Perempuan, J : Jumlah

Sumber : Kerja lapangan 2011

Tabel 5.2 menunjukkan bahawa jumlah kematian di antara keempat-empat etnik, majoriti kematian dari etnik Makassar seramai 25 orang mewakili daripada 64 orang, selanjutnya diikuti daripada etnik Toraja seramai 17 orang. Bagi etnik Jawa sama ada kematian kerana tak sihat mahupun kecelakaan kedua-duanya lebih sedikit berbanding dengan kematian daripada etnik lainnya. Jumlah kematian ini hanya 6.36 peratus daripada jumlah kelahiran secara keseluruhan seramai 1007 orang. Ertinya kecil jumlah kematian berbanding dengan sumbangan jumlah kelahiran terhadap jumlah penduduk migran. Hal ini juga terbukti, berasaskan data daripada BPS Kota Makassar (2012) mendapati bahawa data kematian pada tahun 2008 seramai 3.262 orang telah turun menjadi 3.136 orang pada tahun 2011.

Kadar pertumbuhan penduduk Kota Makassar bagi tempoh 1990 – 2000 ialah 1.55 peratus meningkat kepada 1.63 peratus pada tempoh 2000 – 2009. Pada masa tempoh inilah nisbah migran ke Kota Makassar sebanyak 37.49 peratus daripada keseluruhan migran yang ada di Kota Makassar. Kedua-dua tempoh pertumbuhan penduduk Kota Makassar ini kecil jika berbanding dengan pertumbuhan penduduk Metropolitan Lembah Klang Malaysia yang mengalami pertumbuhan 4.52 peratus setahun pada tempoh 1991 – 2000 (Katiman Rostam 2010). Seterusnya kadar pertumbuhan penduduk turun sebanyak 1.56 peratus bagi tempoh 2001 – 2011. Bagi Kota Makassar bahawa kadar pertumbuhan penduduk semulajadi menurun kerana penurunan kadar kelahiran dan kematian. Walau bagaimanapun kadar migrasi masih ketara di Kota Makassar berbanding dengan 24 kota/kabupaten di kawasan provinsi Sulawesi Selatan. Pada tempoh 2000, migran ke Kota Makassar sebanyak 38.2 peratus meningkat kepada 43.62 peratus pada 2010 (Sukri Nyompa et al .2012a).

### **Struktur Umur dan Jantina**

Struktur umur dan jantina penduduk merupakan asas yang berkait rapat dengan penghijrahan ke kota Makassar. Kajian menunjukkan bahawa kumpulan umur KIR migran yang ramai melakukan penghijrahan adalah kumpulan umur 30 – 49 seramai 65 peratus mewakili 390 orang daripada 600 responden, selebihnya kumpulan umur 20 – 29, kumpulan umur 50 – 64, dan kumpulan umur lebih 65 tahun masing-masing 7.8 peratus, 23 peratus dan 4.2 peratus. Temuan ini tidak jauh berbeza daripada hasil kajian Norimah Rambeli & Fauziah Che Leh (2010), di Proton City Perak Tanjong Malim, bahawa yang ramai melakukan penghijrahan adalah kumpulan umur 21 – 37 tahun. Olahan data

migran banci penduduk 2000 bahawa yang ramai melakukan penghijrahan ke Kota Makassar pada kumpulan umur 15 – 44 tahun (Sukri Nyompa at al. 2012a). Di Malaysia penghijrahan sebahagian besar berumur antara 15 - 34 tahun sama ada bagi penghijrahan antara negeri atau antara daerah (Asan Ali Golam Hassan et al. 2003).

Penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 terdiri daripada lelaki 677,682 orang dan perempuan 684,454 dengan nisbah jantina seramai 98. Maknanya purata setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat lelaki sebanyak 98 orang. Nisbah jantina Kota Makassar, lebih rendah berbanding nisbah jantina migran 1 : 1. Ini bererti lebih tinggi daripada nisbah jantina Kota Makassar. Pola nisbah ini berlaku kepada keempat-empat etnik yang ada di Kota Makassar.

### **Status perkahwinan**

Perkahwinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempermudah proses perubahan penduduk dalam suatu keluarga. Perkahwinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri daripada suami isteri dan anak dengan adanya perhubungan darah. Namun kerana suatu hal, adakalanya keluarga hanya terdiri daripada suami isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak dan seterusnya. Oleh kerana itulah pada bahagian ini di huraikan status perkahwinan migran sebagai bujang, berkahwin, balu dan duda.

Hasil kajian mendapati bahawa KIR migran keempat-empat etnik secara keseluruhan majoriti sudah berkahwin 94.33 peratus mewakili seramai 566 orang daripada 600 responden,

sementara bujang 3.33 peratus mewakili 20 responden dan balu hanya 2.17 peratus mewakili 13 responden. Pola status perkahwinan ini, berlaku kepada keempat-empat etnik, walaupun saiznya berbeza-beza antara satu etnik dengan etnik lainnya. Manakala status duda hanya berlaku untuk etnik Toraja 0.17 peratus mewakili satu orang responden.

Secara keseluruhannya status perkahwinan migran menunjukkan bahawa yang sudah berkahwin lebih ramai melakukan penghijrahan berbanding dengan status perkahwinan lainnya. Temuan ini sama dengan hasil olahan data migran pada banci penduduk 2000 bahawa status berkahwin yang melakukan penghijrahan lebih tinggi berbanding dengan status perkahwinan lainnya (Sukri Nyompa et al. 2011). Hal ini menyebabkan bahawa status berkahwin memiliki tanggungjawab yang besar dalam memenuhi keperluan hidup keluarga. Selaras yang dijelaskan Sukri Nyompa et al. (2012a) bahawa status perkahwinan merupakan faktor tolakan bagi migran untuk menentukan keputusan sama ada berhijrah atau tidak berhijrah kerana mempengaruhi besar kecilnya keperluan yang harus dipenuhi. Orang yang sudah berkahwin pada umumnya mempunyai keperluan dan tanggungjawab yang lebih besar berbanding dengan yang belum berkahwin, apatahlagi daerah asal dianggap kurang menyokong dalam memenuhi keperluan hidup keluarga yang semakin bertambah sehingga mencari peluang dan kesempatan berhijrah ke daerah lain yang dapat menguntungkan dan bermanfaat. Keadaan ini berbeza jika dihubungkan dengan hukum Ravenstein yang menyatakan bahawa penduduk yang masih muda dan bujang lebih banyak melakukan penghijrahan daripada mereka yang sudah berkahwin. Hal ini selaras hasil kajian Asan Ali Golam Hassan et al. (2003) bahawa taraf perkahwian, sebahagian penghijrahan adalah mereka yang

belum berkahwin dan mempunyai taraf pendidikan peringkat diploma.

Dari segi perbezaan status perkahwinan jantina terutamanya berkahwin dan bujang, menunjukkan bahawa KIR migran lelaki yang sudah berkahwin 96.6 peratus, sementara bujang 3.2 peratus, selebihnya duda 0.2 peratus. Manakala KIR migran perempuan sudah berkahwin tetapi masa kini berubah menjadi status balu seramai 93 peratus mewakili 13 orang daripada 14 responden, selebihnya gadis hanya seramai 7 peratus mewakili 1 orang daripada 14 responden. Ini menunjukkan bahawa laki-laki lebih ramai melakukan penghijrahan daripada perempuan. Sama yang disampaikan Idrus Abustam (1999) dan Norimah Rambeli & Fauziah Che Leh (2010) bahawa kaum lelaki lasimnya lebih banyak berhijrah keluar dari daerah asalnya berbanding dengan perempuan.

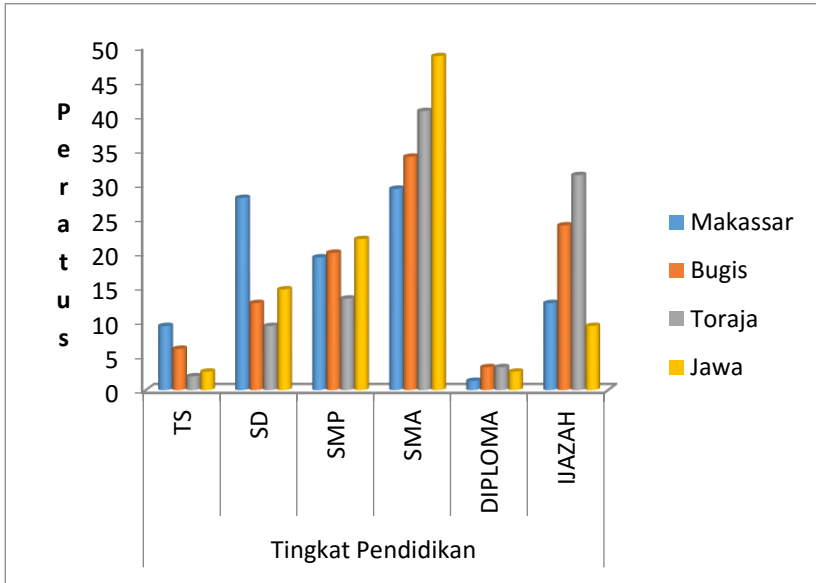
### **Transformasi Pendidikan**

Bahagian ini dihuraikan tingkat pendidikan KIR migran keempat-empat etnik berasaskan tingkat pendidikan sebelum dan selepas berhijrah ke Kota Makassar. Disamping itu dilihat juga pencapaian tingkat pendidikan isi rumah migran hingga masa kini di Kota Makassar.

Faktor pendidikan memegang peranan yang amat penting bagi mempertingkatkan dan memperkembangkan pengetahuan, kejayaan dan kecemerlangan hidup hari ini dan di masa hadapan. Di era globalisasi yang penuh dengan pelbagai cabaran dan dugaan ini perlu membentuk manusia atau individu tidak sahaja cergas tetapi berkualiti yang berlandaskan kepada agama.

Pendidikan merupakan faktor yang amat penting. Ini tercantum dengan tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tersurat sebagai satu di antara tujuan Negara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dimaksudkan oleh pembukaan UUD 1945 itu, hanya dapat dicapai melalui program Pendidikan Nasional. Disinilah tercermin fungsi dan peranan yang dimainkan oleh pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa dan negara, oleh kerana melalui pendidikan kualiti manusia dapat dipertingkatkan dan diperkembangkan. Oleh itu perkhidmatan pendidikan penduduk sangatlah penting kerana pendidikan akan menentukan cepat atau lambatnya proses pembangunan kemajuan bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dapatlah mengenalpasti peringkat pendidikan responden yang diperolehnya selama ini.

Berasaskan 5.1 didapati bahawa tingkat pendidikan KIR migran keempat-empat etnik paling banyak berpendidikan peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak (38.17 peratus), diikuti Ijazah 19.33 peratus, paling sedikit diploma hanya seramai 2.67 peratus. Di antara keempat-empat etnik, pendidikan peringkat SMA paling banyak etnik Jawa 48.67 peratus, diikuti etnik Toraja sebanyak 40.67 peratus, sementara yang paling sedikit etnik Makassar hanya seramai 29.33 peratus.



Gambar 5.1 Tingkat pendidikan KIR migran di Kota Makassar menurut etnik 2011

Dari segi tingkat pendidikan dikelompokkan dalam tiga bahagian, iaitu; 1) Tidak Sekolah (TS) dan Sekolah Dasar (SD); 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA); 3) Diploma dan Ijazah. Di antara ketiga kelompok itu, migran yang mempunyai tingkat pendidikan yang paling banyak, iaitu pendidikan peringkat SMP dan SMA sebanyak (56.83 peratus), diikuti diploma dan ijazah seramai (22.0 peratus), paling sedikit pendidikan peringkat TS dan SD seramai (21.17 peratus). Ini menunjukkan bahawa tingkat pendidikan KIR migran di Kota Makassar secara keseluruhan berada pada tingkat menengah (SMP dan SMA). Walau bagaimanapun sebahagian KIR migran melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi selepas

berhijrah terutamanya peringkat pendidikan diploma dan ijazah (Tabel 5.3).

Dari segi perubahan atau peningkatan taraf pendidikan keempat-empat etnik sebelum dan selepas berhijrah ke Kota Makassar menunjukkan bahawa Pendidikan peringkat SD hingga SMP tidak ada perubahan, manakala pendidikan peringkat SMA ke peringkat diploma dan ijazah terjadi perubahan atau peningkatan sebanyak 12.5 peratus daripada keseluruhan KIR migran di Kota Makassar (Tabel 5.3)

Berasaskan Tabel 5.3 didapati bahawa perubahan pendidikan KIR migran keempat-empat etnik selepas berhijrah ke Kota Makassar yang amat ketara, ialah perubahan tingkat pendidikan etnik Toraja sebanyak (19.3 peratus), diikuti Bugis (14.0 peratus) dan paling sedikit etnik Jawa hanya (6.7 peratus). Sementara pendidikan peringkat ijazah yang amat ketara perubahannya, ialah etnik Toraja (40.3 peratus), diikuti etnik Bugis (28.4 peratus), paling kecil etnik Jawa (9.0 peratus), namun dari segi perubahan pendidikan peringkat diploma yang amat ketara, iaitu etnik Jawa banyak (50.0 peratus) diikuti etnik Bugis dan Toraja masing-masing (25.00 peratus). Manakala etnik Makassar tidak ada perubahan pendidikan diploma sebelum dan selepas berhijrah ke Kota Makassar. Walau bagaimanapun perubahan tingkat pendidikan ijazah lebih banyak berbanding perubahan pendidikan diploma.



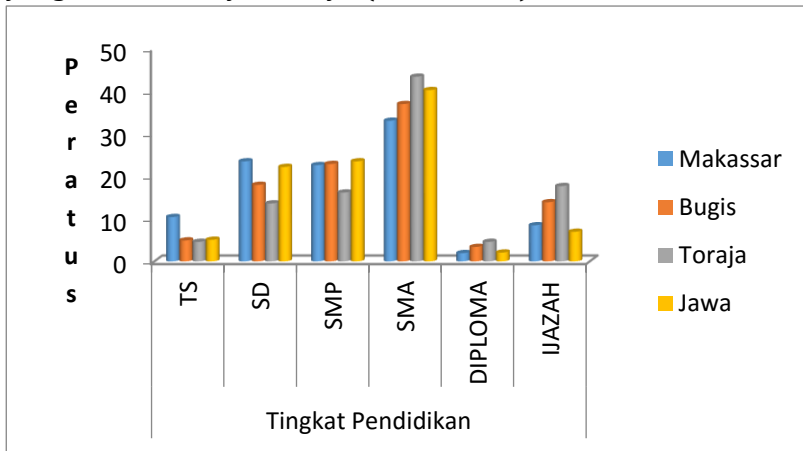
Tabel 5.3 Perubahan tingkat pendidikan KIR migran sebelum dan selepas berhijrah ke Bandar Makassar menurut etnik

Etnik	Perubahan Tingkat Pendidikan										
	Diploma			Ijazah			Diploma + Ijazah			Jmlh	Perubahan
	Jmlh	Sblm	Slps	Jmlh	Sblm	Slps	Jmlh	Sblm	Slps	Etnik	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12 = (10:11x100)
<b>Makassar</b>	2	2	0	19	4	15	21	6	15	150	10
<b>Bugis</b>	5	3	2	36	17	19	41	20	21	150	14
<b>Toraja</b>	5	3	2	47	20	27	52	23	29	150	19.3
<b>Jawa</b>	4	0	4	14	8	6	18	8	10	150	6.7
<b>Jumlah</b>	16	8	8	116	49	67	132	57	75	600	12.5

Nota: Jmlh = Jumlah, Sblm = sebelum berhijrah, Slps = selepas berhijrah

Sumber : Kerja lapangan 2011

Dari segi tingkat pendidikan isi rumah migran, hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti berpendidikan peringkat SMP mahupun SMA. Pola ini turut berlaku untuk keempat-empat etnik yang berbeza hanya saiznya (Gambar 5.2).



Gambar 5.2 Tingkat pendidikan isi rumah migran di Kota Makassar menurut etnik 2011

Dari segi tingkat pendidikan isi rumah keempat-empat etnik, tingkat pendidikan SMA paling banyak dicapai oleh etnik Toraja, diikuti etnik Jawa, Bugis dan Makassar. Manakala pendidikan peringkat SMA bercampur dengan diploma dan sarjana, akan seramai 53.34 peratus berbanding dengan peringkat tidak sekolah (TS) bercampur dengan SD dan SMP hanya seramai (46.66 peratus). Ini menunjukkan bahawa tingkat pendidikan isi rumah migran lebih ramai berpendidikan SMA hingga ijazah. Ini bermakna bahawa pendidikan yang diperolehi isi rumah migran berpendidikan tinggi atau berjaya di Kota Makassar. Faktor pendidikan ini merupakan salah satu yang mempengaruhi terjadinya penghijrahan keempat-empat etnik ke Kota Makassar. Ini selari hasil kajian Sukri Nyompa et. al (2012a), bahawa alasan berhijrah ke Kota Makassar untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Hukum migrasi Ravenstein (1976) menyebut bahawa golongan berpendidikan tinggi lebih ramai melaksanakan mobiliti berbanding dengan golongan berpendidikan rendah. Ini maknanya bahawa faktor pendidikan memainkan peranan penting dan berkait rapat dengan pelbagai segi kehidupan seseorang. Kejayaan dan kecemerlangan akan ditentu pula oleh peringkat pendidikan yang diperolehi.



## BAB VI

# INTERAKSI SOSIAL

Manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan sesama mereka. Interaksi manusia merupakan suatu keperluan asas bagi manusia kerana manusia sebagai mahluk sosial, tidak dapat hidup tanpa melakukan interaksi terhadap sesama manusia sama ada secara individu mahupun secara kumpulan sehingga manusia selalu hidup dalam satu kumpulan. Bagi Soerjano Soekanto (2007) proses interaksi melahirkan budaya yang mencakup beberapa unsur, iaitu: pertama, manusia selalu hidup berkumpul; kedua, bercampur untuk masa yang cukup lama; ketiga, mereka menyedari bahawa ia adalah satu kesatuan; dan keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama.

Kehadiran migran di destinasi biasanya membentuk asosiasi atau perkumpulan yang menjadi bentuk interaksi untuk saling berkomunikasi dalam menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Perkumpulan ini dibentuk, melahirkan kumpulan-kumpulan etnik yang diberi nama Kerukunan Keluarga Etnik. Kerukunan ini diciptakan untuk memelihara rasa persaudaraan dan kehormatan dalam perhubungan sesama etnik mahupun dengan etnik lain dalam pelbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, budaya, politik dan persekitaran.

Pada bahagian ini akan dibahas interaksi KIR migran dengan, (1) sesama migran; (2) sesama pekerja; dan (3) penduduk tempatan yang berkait rapat dengan kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, organisasi kemasyarakatan dan persekitaran sama ada daerah asal mahupun di Kota Makassar. Selain daripada itu dibincangkan juga interaksi migran dengan persekitarannya dan keluarga di daerah asal bagi keempat-empat etnik di Kota Makassar.

### **Kerjasama migran**

Kerjasama merupakan suatu proses sosial yang sifatnya asosiatif untuk mencapai matlamat bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktiviti masing-masing, atau dengan kata lain kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kumpulan secara bersama-sama mewujudkan suatu kegiatan untuk mencapai matlamat. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahawa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mereka mempunyai pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut (Soerjano Soekanto 2007).

Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan migran di daerah asal mahupun di Kota Makassar (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Bentuk-bentuk kerjasama KIR migran

Bentuk Kerjasama		Keterangan
<b>Pinjam Wang</b>	<b>Meminjam</b>	Saling membantu meminjamkan wang bagi sesiapa yang memerlukan terutama migran.
	<b>Maklumat Pekerjaan</b>	Memberikan maklumat kepada sesama migran tentang adanya peluang pekerjaan yang diperlukan oleh perseorangan atau institusi.
	<b>Menyewah Rumah</b>	Penduduk tempatan memberikan peluang kepada migran yang memerlukan rumah untuk di sewa.
	<b>Majlis Perkahwinan</b>	Menghadiri majlis perkahwinan yang dilaksanakan oleh migran mahupun penduduk tempatan.
	<b>Majlis Kematian</b>	Menghadiri majlis kematian yang dilaksanakan oleh migran mahupun penduduk tempatan kerana adanya keluarga yang terkena musibah kematian.
	<b>Majlis Syukuran</b>	Menghadiri majlis syukuran seperti berjaya dalam pendidikan, kelahiran anak, naik pangkat, naik rumah baru, naik haji ke Makkah dan lain-lain.
<b>Ucapara (Resam)</b>	<b>Adat</b>	Melaksanakan aktiviti kerana berjaya dalam meningkatkan hasil pertanian penduduk, memperingati hari kematian atau persiapan penguburan orang mati terutama ini berlaku bagi etnik Toraja.

<b>Kerukunan/NGO</b>	Perkumpulan yang terdiri daripada sejumlah orang atau keluarga yang didasarkan kepada etnik atau kedaerahan.
	bersambung...
<b>...sambungan</b>	
<b>Majlis Taklim</b>	Kumpulan beberapa orang perempuan Islam berjumpa setiap bulan dengan kegiatan mendapatkan ceramah agama.
<b>Kutu</b>	Berkumpulnya beberapa orang berasaskan etnik ataupun pelbagai etnik setiap bulan dengan membawa wang untuk dirawak kepada sesiapa yang beruntung mendapatkan wang tersebut.
<b>Sukan</b>	Melaksanakan pertandingan sukan dalam memperingati pelbagai peristiwa seperti ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia mahupun aktiviti lainya.
<b>Gotong Royang</b>	Bersama-sama melakukan aktiviti seperti membersihkan longkang, surau, masjid, pejabat dan lain-lain.
<b>Jaga Malam</b>	Orang yang tugasnya mengawasi atau menjaga keamanan pada malam untuk menghalau terjadinya jenayah, pencurian, perampokan dan lain-lain.

Sumber : Kerja lapangan 2011

Tabel 6.1 menunjukkan bahawa bentuk-bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh migran baik di daerah asal mahupun selepas berhijrah ke Kota Makassar. Bentuk kerjasama ini tidak secara keseluruhan dilaksanakan, disesuaikan dengan keadaan migran. Sehubungan dengan itu, hasil kajian mendapati bahawa KIR migran keempat-empat etnik sebelum berhijrah ke Kota Makassar, terjadi perhubungan dalam bentuk kerjasama migran di daerah asal yang sama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, organisasi masyarakat dan persekitaran (Tabel 6.2)

Tabel 6.2 Kerjasama KIR migran dengan penduduk di daerah asal yang sama

Bentuk Kerjasama	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
<b>EKONOMI</b>										
-Pinjam meminjam wang	5	20.8	7	29.2	4	16.7	8	33.3	24	2.99
<b>SOSIAL BUDAYA</b>										
-Majlis Perkahwinan	51	24.9	53	25.9	49	23.9	52	25.4	205	25.53
-Majlis Kematian	25	23.2	28	25.9	29	26.9	26	24.1	108	13.45
-Majlis Syukuran	21	28.8	22	30.1	17	23.3	13	17.8	73	9.09
-Upacara Resam	10	17	11	18.6	20	33.9	18	30.5	59	7.35
<b>ORGANISASI MASYARAKAT</b>										
-Majlis taklim/Kutu	18	22.5	23	28.8	14	17.5	25	31.3	80	9.96
<b>PERSEKITARAN</b>										
-Gotong royong	50	23.9	56	26.8	51	24.4	52	24.9	209	26.03
-Jaga malam	15	33.3	10	22.2	11	24.4	9	20.0	45	5.60
<b>Jumlah</b>	195	-	210	-	195	-	203	-	803	100

\*Jawapan lebih daripada satu setiap responden

Sumber : Kerja lapangan 2011

Berasaskan Tabel 6.2 didapati bahawa hasil kajian menunjukkan bahawa perhubungan KIR migran keempat-empat etnik di daerah asal yang sama dalam kerjasama, terutamanya



dalam kerjasama gotong royong (26.0 peratus). diikuti pada majlis perkahwinan (25.5 peratus), paling sedikit kerjasama di bidang ekonomi, iaitu pinjam meminjam wang (2.99 peratus). Hal ini dapat dipahami bahawa gotong royong di daerah asal amat rapat dan ada kemudahan bagi penduduk dalam menjalankan kegiatan yang di perlukan banyak tenaga kerja, tambahan pula di daerah asal ada waktu rehat yang panjang untuk dapat di gunakan melaksanakan pekerjaan yang memerlukan gotong royong secara bersama-sama. Demikian pula halnya dengan majlis perkahwinan, setiap dijemput pasti mereka datang untuk menyampaikan tahniah atas keberhasilan menjalankan perkahwinan sebagai wujud mempererat perhubungan sesama keluarga atau sesama sekampung. Dari segi kerjasama ekonomi dalam hal pinjam meminjam wang memangnya kurang menjalankan kegiatan ini kerana mereka tidak begitu banyak keperluan yang harus disiapkan dalam memenuhi keperluan makanan, terutamanya bukan makanan berbanding di kota. Pola ini turut berlaku kepada keempat-empat etnik di daerah asal atau di kampung.

Selain itu bentuk kerjasama sosial budaya terutama majlis kematian perhubungan sangat ketara diantara keempat-empat etnik, manakala dari segi majlis taklim/kutu etnik Jawa paling sebanyak (31.25 peratus) terbabit pada kegiatan itu berbanding dengan etnik lainnya, namun dari segi upacara resam, majoriti etnik Toraja (33.90 peratus). Hal ini dapat di pahami bahawa penduduk etnik Toraja di daerah asal, majoriti non Islam, makanya ramai penduduk etnik Toraja menjalankan kegiatan upacara resam di daerah asal terutama berkait dengan kematian.

Dari segi perhubungan dalam bentuk kerjasama antara sesama migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan di Kota

Makassar, saiznya berbeza-beza kerana setiap KIR migran terbabit dalam menjalankan kerjasama daripada pelbagai bidang seperti kerjasama bidang ekonomi, terbabit juga dalam kerjasama bidang sosial budaya, begitu juga di bidang organisasi masyarakat dan persekitaran (Tabel 6.3 hingga Tabel 6.5).

Berasaskan Tabel 6.3. didapati bahawa KIR migran kerjasama dengan sesama migran keempat-empat etnik di Kota Makassar majoriti bidang gotong royong (20.9 peratus), diikuti majlis perkahwinan (19.4 peratus). Pola ini sama berlaku di daerah asal. Ini menunjukkan bahawa perhubungan dengan kedaerahan dan kekerabatan di daerah asal sangat ketara, masih turut berlaku selepas berhijrah. Manakala kegiatan kutu-kutu keempat-empat etnik di Kota Makassar semakin ramai (15.6 peratus).

Selain itu didapati bahawa wujud perhubungan KIR migran dengan sesama migran dalam bidang ekonomi terutamanya pinjam meminjam wang. Hal ini terjadi kerana migran saling bantu membantu dalam berusaha untuk meningkatkan aktiviti migran dalam bidangnya masing-masing agar dapat berubah kualiti hidup yang lebih di Kota Makassar. Di samping itu wujud kerjasama dalam bidang sosial dan budaya adalah majoriti majlis perkahwinan. Bagi migran yang di jemput hadir dalam mejlis ini sebagai tanda ikut berbahagia dan saling mempererat perhubungan antara sesama migran (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Kerjasama KIR migran dengan migran di Bandar Makassar mengikuti etnik

Bidang	Makassar		Bugis		Tator		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
<b>EKONOMI</b>										
Pinjam meminjam wang	7	24.1	10	24.5	7	24.1	5	17.2	29	3.77
Maklumat perniagaan	0	0	0	0	4	100	0	0	4	0.53
<b>SOSIAL BUDAYA</b>										
Majlis Perkahwinan	46	30.9	47	31.5	25	16.8	31	20.8	149	19.40
Majlis kematian	1	7.7	3	23.1	8	61.5	1	7.7	13	1.69
Majlis Syukuran	26	27.7	33	35.1	18	19.2	17	18.1	94	12.22
Upacara Resam	3	10.0	5	16.7	12	40.0	10	33.3	30	3.90
<b>ORGANISASI MASYARAKAT</b>										
NGO	13	18.3	7	9.9	35	49.3	16	22.5	71	9.22
Kutu	19	15.8	20	16.7	45	37.5	36	30.0	120	15.60
Majlis Taklim	14	18.0	20	25.6	0	0	44	56.4	78	10.10
<b>PERSEKITARAN</b>										
Gotong royong	43	26.7	51	31.7	27	16.8	40	24.8	161	20.90
Jaga Malam	7	33.3	4	19.1	3	14.3	7	33.3	21	2.73
<b>Jumlah</b>	179	-	200	-	184	-	207	-	770	100

\*Jawapan lebih daripada satu setiap responden

Sumber : Kerja lapangan 2011

Dari segi kerjasama dalam bidang organisasi masyarakat yang sangat ketara adalah kutu-kutu. Kegiatan ini juga merupakan salah satu intensiti perhubungan sesama migran dan saling mengunjungi rumah satu dengan rumah lainnya. Selain itu wujud kerjasama berikutnya dalam bidang persekitaran terutama gotong royong. Kegiatan ini dilakukan pada waktu tidak kerja atau cuti kerana selain waktu cuti tidak ada peluang untuk gotong royong kerana aktiviti migran cukup banyak dan padat di kota berbanding dengan di daerah asalnya.

Tabel 6.4 menunjukkan kerjasama KIR migran dengan sesama pekerja keempat-empat etnik, majoriti dalam majlis perkahwinan (22.5 peratus) diikuti kutu (22.1 peratus), gotong royong (19.4 peratus), paling sedikit sukan (0.5 peratus).

Dari sudut lain menunjukkan terdapat kerjasama KIR migran dengan sesama pekerja dalam bidang ekonomi, budaya, organisasi masyarakat dan persekitaran. Polanya ini hampir sama dengan pola yang turut berlaku kepada sesama migran dan penduduk tempatan keempat-empat etnik, yang berbeza hanya saiznya. Walau bagaimanapun interaksi kerjasama di bidang ekonomi, terutamanya maklumat perniagaan jauh lebih tinggi (5.39 peratus) berbanding dengan sesama migran (0.5 peratus) dan penduduk tempatan (0.19 peratus). Ini menunjukkan bahawa antara migran dengan sesama pekerja tanpa mengira perbezaan etnik, bahasa, dan agama masih tetap tinggi perhatiannya kepada sesama pekerja. Mereka saling bantu membantu dalam hal pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka bersama di kota kerana mereka berprinsip bahawa mereka adalah bersaudara, maka mereka menjaga dan memelihara persatuan dan persahabatan.

Selain itu dalam bidang organisasi masyarakat terutama kerukunan, iaitu kumpulan dari daerah asal etnik atau kedaerahan seperti; (1). Kerukunan etnik Makassar dengan nama Kerukunan Keluarga Turatea; (2). Kerukunan etnik Bugis dengan nama Kerukunan Masyarakat Wajo; (3). Kerukunan etnik Toraja dengan nama Kerukunan Rama; dan (4), Kerukunan etnik Jawa dengan nama Kerukunan Keluarga Klaten dan Kerukunan Keluarga Sragen Jawa. Kerukunan keempat-empat etnik ini boleh dikatakan sama dengan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

Tabel 6.4 menunjukkan kerjasama KIR migran dengan sesama pekerja keempat-empat etnik di Kota Makassar dalam aktiviti NGO hanya (4.17 peratus) adalah kurang berbanding kerjasama KIR migran dengan sesama migran seramai (9.22 peratus). Namun demikian keterlibatan migran di NGO sangat penting. Ini dibuktikan keempat-empat etnik turut terlibat dalam kegiatan ini, walaupun saiznya kecil. Keempat-empat etnik paling banyak terlibat dalam aktiviti NGO adalah etnik Makassar dan Bugis masing-masing (35.3 peratus), diikuti etnik Jawa (17.7 peratus) dan paling sedikit etnik Toraja (11.8 peratus).

Tabel 6.4 Kerjasama KIR migran dengan sesama pekerja di Kota Makassar mengikut etnik

Bidang	Makassar		Bugis		Tator		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
EKONOMI										
<b>Pinjam meminjam wang</b>	8	16.7	9	18.8	14	29.2	17	35.4	48	11.8
<b>Maklumat perniagaan</b>	16	72.7	1	4.6	1	4.6	4	18.2	22	5.39
SOSIAL BUDAYA										
<b>Majlis Perkahwinan</b>	18	19.6	29	31.5	25	27.2	20	21.7	92	22.5
<b>Majlis Kematian</b>	0	0	0	0	5	100	0	0	5	1.23
<b>Majlis Syukuran</b>	8	21.1	17	44.7	4	10.5	9	23.7	38	9.31
<b>Upacara Resam</b>	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	5	1.23
ORGANISASI MASYARAKAT										
<b>NGO</b>	6	35.3	6	35.3	2	11.8	3	17.7	17	4.17
<b>Kutu</b>	15	16.7	23	25.6	27	30.0	25	27.8	90	22.1
<b>Majlis Taklim</b>	3	30.0	2	20.0	0	0	5	50.0	10	2.45

<b>Sukan</b>	0	0	2	100	0	0	0	0	2	0.49
<b>PERSEKITARAN</b>										
<b>Gotong royong</b>	17	21.5	27	34.2	15	19.0	20	25.3	79	19.4
<b>Jumlah</b>	92	-	117	-	95	-	104	-	408	100

\*Jawaban lebih daripada satu

Sumber : Kerja lapangan 2011

Berasaskan Tabel 6.5 didapati bahawa KIR migran bekerjasama dengan penduduk tempatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, organisasi masyarakat dan persekitaran. Pola dalam bidang ini sama dengan pola yang turut berlaku kepada kerjasama migran dengan migran mahupun kerjasama migran dengan sesama pekerja, adalah majoriti gotong royong (37.4 peratus), diikuti majlis perkahwinan (18.4 peratus) dan kutu (15.1 peratus).

Sementara itu kerjasama migran dengan penduduk tempatan di bidang ekonomi adalah kurang, terutama pinjam meminjam wang hanya sebanyak (1.43 peratus) daripada keseluruhan saiz dalam bidang kerjasama ekonomi. Hal ini dapat di pahami bahawa pinjam meminjam wang itu sangat perlu hati-hati kerana meminjam wang itu adalah mudah tetapi mengembalikan kadangkala tertanggung atau tertunda bahkan tidak terbayar makanya penduduk tempatan selektif dalam meminjamkan wang kepada orang yang memerlukan. Selain itu migran merasa malu meminjam wang kepada penduduk tempatan jika intensiti perhubungan kurang mesra.

Tabel 6.5. Kerjasama KIR migran dengan penduduk tempatan di Kota Makassar mengikuti etnik

Bidang	Makassar		Bugis		Tator		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
EKONOMI										
Pinjam meminjam wang	4	26.7	3	20.0	4	26.7	4	26.7	15	1.43
Maklumat perniagaan	0	0	0	0	1	50.0	1	50.0	2	0.19
Menyewa Rumah	0	0	0	0	4	100	0	0	4	0.30
SOSIAL BUDAYA										
Majlis Perkahwinan	63	32.5	52	26.8	36	18.6	43	22.2	194	18.4
Majlis Kematian	6	40.0	3	20.0	4	26.7	2	13.3	15	1.43
Majlis Syukuran	29	36.3	27	33.8	5	6.3	19	23.8	80	7.61
Upacara Resam	1	12.5	0	0	7	87.5	0	0	8	0.76
ORGANISASI MASYARAKAT										
NGO	8	47.1	4	23.5	0	0	5	29.4	17	1.62
Kutu	49	30.8	42	26.4	31	19.5	37	23.7	159	15.1
Majlis Taklim	40	33.1	40	33.1	0	0	41	33.9	121	11.5
Sukan	0	0	5	83.3	1	16.7	0	0	6	0.57
PERSEKITARAN										
Gotong royong	107	27.2	117	28.9	66	16.8	103	26.2	393	37.4
Jaga Malam	13	33.3	16	41.0	4	10.3	6	15.4	39	3.71
Jumlah	320	-	309	-	163	-	260	-	1052	100

\*Jawapan lebih daripada satu.

Sumber : Kerja lapangan 2011

Selanjutnya kerjasama dalam bidang sosial dan budaya masih tetap ketara, utamanya majlis perkahwinan (18.40

peratus). Selain itu kerjasama dalam bidang organisasi masyarakat dalam hal ini adalah kudu masih tetap tinggi (15.10 peratus). Manakala kerjasama dalam bidang persekitaran, iaitu gotong royong cukup tinggi (37.40 peratus). Kerjasama yang terakhir ini memang ramai kerana migran harus bergotong royong bercampur dengan pelbagai etnik dalam zon yang sama untuk meningkatkan intensiti perhubungan agar hidup rukun dan damai tanpa membezakan asal usul mereka.

Dari sudut kerjasama KIR migran dengan migran di daerah asal yang sama sebelum berhijrah mahupun kerjasama antara migran dengan sesama migran, sesama pekerja, dan penduduk tempatan di Kota Makassar, menunjukkan bahawa pola kerjasama secara keseluruhan keempat-empat etnik adalah hampir sama, sama ada di kota mahupun di daerah asal yang membezakan saiznya. Ini mencerminkan bahawa kehidupan KIR migran selama ini terjadi intensiti perhubungan yang harmonia dan mesra antara sesama migran, antara sesama pekerja dan antara penduduk tempatan di Kota Makassar.

### **Perhubungan migran**

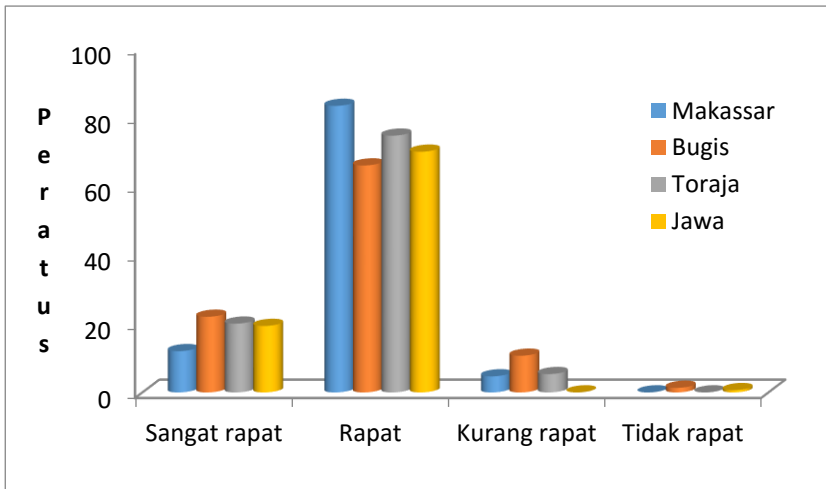
Bahagian ini membincangkan intensiti perhubungan KIR migran keempat-empat etnik antara sesama migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan di Kota Makassar yang berkait rapat intensiti perhubungan migran yang sangat rapat, rapat, kurang rapat dan tidak rapat (Gambar 6.1 hingga Gambar 6.3).

Berasaskan Gambar 6.1 didapati bahawa KIR migran keempat-empat etnik mempunyai berhubungan rapat secara mengikat majoriti lebih (70,5 peratus) diikuti sangat rapat (20,5



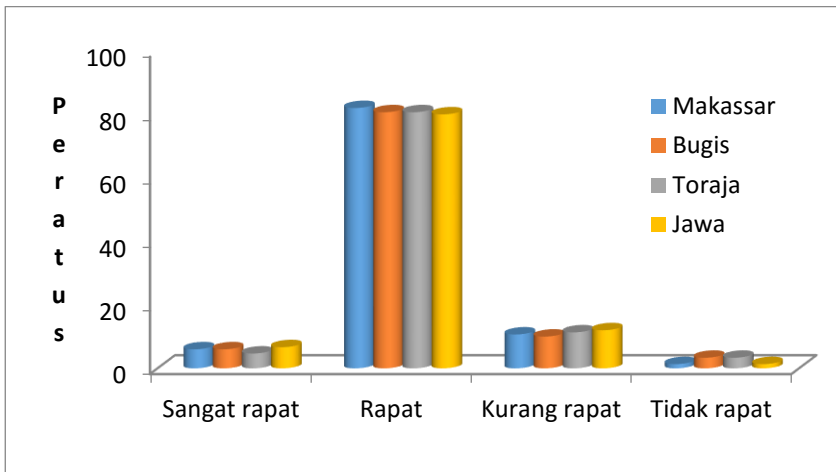
peratus), paling rendah hubungan tidak rapat seramai (0,5 pertatus).

Di antara keempat-empat etnik, etnik Makassar paling tinggi perhubungan rapat sesama migran iaitu, sebanyak 83.33 peratus, diikuti etnik Toraja (74.67 peratus), paling rendah hubungan etnik Bugis hanya sebanyak 66.00 peratus. Sebaliknya etnik Bugis paling tinggi hubungan sangat rapat sebanyak 22.00 peratus, paling rendah etnik Makassar hanya sebanyak 12.00 peratus. Ini bererti intensiti perhubungan KIR migran rapat dengan sesama migran malahan sangat rapat. Maksudnya bahawa intensiti perhubungan sosial budaya migran tinggi. Sebagai pendatang mereka perlu menciptakan keadaan yang selesa dan mesra kepada sesiapa orang yang di jumpai terutama sesama migran di Kota Makassar.



Gambar 6.1 Intensiti perhubungan KIR migran dengan sesama migran di Kota Makassar 2011

Gambar 6.2 menunjukkan bahawa KIR migran dengan sesama pekerja keempat-empat etnik berhubungan rapat dengan nisbah lebih 80.00 peratus secara keseluruhan daripada migran yang ada di Kota Makassar, paling rendah perhubungan tidak rapat hanya 2.33 pertatus.

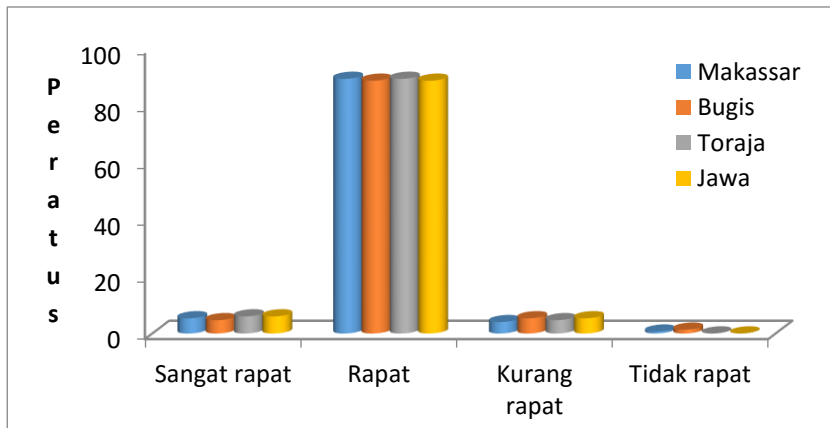


Gambar 6.2 Intensiti perhubungan KIR migran dengan sesama pekerja di Kota Makassar 2011

Di antara keempat-empat etnik sesama pekerja yang paling tinggi tingkat intensiti perhubungan rapat adalah etnik Makassar sebanyak (82 peratus), etnik lainnya hampir sama (80 peratus). Manakala hubungan kurang rapat mahupun tidak rapat hanya seramai 13.33 peratus. Ini bererti intensiti perhubungan KIR migran dengan sesama pekerja majoriti tingkat hubungannya rapat. Maksudnya bahawa perhubungan sosial budaya migran dengan sesama pekerja tinggi (baik). Walau bagaimanapun, persaingan dalam pekerjaan tetap ketara kerana pekerja itu

berusaha untuk berprestasi lebih baik berbanding dengan pekerja lain. Sebagai pendatang mereka perlu mempererat intensiti perhubungan dengan sesama pekerja agar tercipta keadaan persekitaran yang mesra dalam hidup berdampingan dengan pelbagai perbezaan asal daerah, etnik, agama, bahasa, dan sebagainya di dalam bekerja. Hal ini dapat di pahami bahawa bekerja sangat memerlukan kerjasama yang baik dan saling membantu untuk meningkatkan kejayaan bekerja.

Gambar 6.3 juga menunjukkan bahawa KIR migran dengan penduduk tempatan keempat-empat etnik berhubungan rapat mencapai nisbah lebih (90.00 peratus) Manakala perhubungan sangat rapat dan kurang rapat hampir sama (5.67 peratus), dan tidak rapat hanya (0.5 pertatus).



Gambar 6.3 Intensiti perhubungan KIR migran dengan penduduk tempatan di Kota Makassar 2011

Perhubungan KIR migran dengan penduduk tempatan yang sangat ketara, iaitu hubungan rapat mencapai 90 peratus. Ini

turut berlaku untuk keempat-empat etnik. Manakala hubungan sangat rapat dan kurang rapat masing-masing rendah. Ini bererti perhubungan KIR migran dengan penduduk tempatan majoriti tingkat hubungannya rapat. Ini bermakna bahawa hubungan sosial budaya migran dengan penduduk tempatan meningkat. Sebagai pendatang mereka perlu mempererat hubungan persaudaraan dengan penduduk tempatan agar tercipta keadaan persekitaran yang mesra dalam hidup berdampingan dengan migran dari pelbagai daerah, etnik, agama, bahasa, dan sebagainya.

Dari sudut perhubungan KIR migran antara sesama migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan secara keseluruhan menunjukkan bahawa pola perhubungannya rapat bahkan sangat rapat. Berbeza di daerah asal perhubungan migran juga rapat tetapi saiznya kecil. Ini bermakna bahawa perhubungan migran di Kota Makassar lebih erat dan lebih luas berbanding dengan di daerah asal kerana di kota ramai penduduk dari pelbagai daerah dan etnik.

### **Perhubungan migran dengan keluarga di daerah asal**

Perhubungan sangat penting dalam kehidupan di kota sehingga tidak lagi menjadi halangan tidak berkomunikasi dengan sesiapa sahaja termasuk keluarga di daerah asal kerana komunikasi dan pengangkutan dari Kota Makassar ke daerah lain sangat lancar sama ada jalan darat, laut mahupun udara. Oleh kerana itu, jarak yang jauh terasa dekat, masa menjadi singkat. Inilah salah satu kelebihan dengan lancarnya komunikasi dan pengangkutan di kota dengan di luar kota

Dari sudut lain, KIR migran bersama isi rumah semasa kini tinggal di Kota Makassar, komunikasi dengan keluarga di daerah asal sangat lancar, terutamanya melalui telefon bimbit (79.24 peratus), migran pulang ke daerah asal (17.88 peratus), selebihnya melalui surat laju pos dan melalui orang lain (2.88 peratus). Ini bererti bahawa KIR migran tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga di daerah asal kerana kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih.

Dengan majunya teknologi komunikasi dan lancarnya pengangkutan darat, laut dan udara antara kota dan di luar kota, maka perhubungan KIR migran dengan keluarga di daerah asal tidak terputus.

## **Penempatan Migran**

Penduduk yang melakukan penghijrahan ke destinasi melalui bererapa tahap untuk memutuskan berhijrah atau tidak (Ida Magus Mantra 2013). Seperti yang di huraikan pada Bab IV bahagian pola migrasi ke Kota Makassar bahawa migran mendapatkan maklumat tentang Kota Makassar mulanya maklumat itu daripada keluarga, kawan atau orang lain, melalui televisyen, surak akhbar dan melakukan pelancongan sendiri ke Kota Makassar. Daripada maklumat yang diperolehi itulah, migran menentukan pilihan, Kota Makassar sebagai destinasi migran dengan pertimbangan bahawa Kota Makassar menjanjikan kehidupan yang lebih baik, apatah lagi sudah banyak keluarga atau kawan lebih awal berada di Kota Makassar yang dianggap sukses dan berjaya.

Selain daripada itu, membincangkan mula ketibaan migran di Kota Makassar. Hasil kajian menunjukkan bahawa KIR migran pada mula ketibaannya di Kota Makassar sebanyak 57 peratus mewakili 341 responden, menumpang tinggal di rumah keluarga/kawan di Kota Makassar, sebahagian menyewa rumah seramai 38.0 peratus mewakili 228 responden bahkan ada migran membeli rumah sebagai tempat tinggal seramai 4.1 peratus mewakili 25 responden, selebihnya tinggal di kolej kerajaan dan lain-lain hanya 1.0 peratus.

Sehubungan dengan itu, tergambar dengan jelas bahawa migran yang datang ke Kota Makassar, tinggal sama ada di rumah keluarga, menyewa rumah, beli rumah atau tinggal di rumah dinas kerajaan. Kesemuanya itu merupakan kawasan petempatan tempat tinggal migran. Dengan kata lain bahawa migran akan berjiran tempat tinggal dengan sesama migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan. Kesemuanya itu merupakan keluarga kejiiran, walaupun berbeza daerah asal, berbeza etnik, bahasa, agama dan lainnya tetap mempererat perhubungan saling memahami, keharmonian dan mesra sehingga keluarga kejiiran itu bersatupadu dalam mengatasi problem yang ada di kawasan kejiiran. Ini terbukti dengan adanya kerjasama dengan baik antara migran dengan migran, antara sesama pekerja dan penduduk tempatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, organisasi kemasyarakatan dan persekitaran.

## **Akomodasi**

Akomodasi adalah suatu penyesuaian perhubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Akomodasi merupakan bentuk proses sosial yang

merupakan perkembangan dari bentuk pertikaian, di mana masing-masing pihak melakukan penyesuaian dan berusaha mencapai kesepakatan untuk tidak saling bertentangan /berkonflik.

Berasaskan hasil kajian menunjukkan bahawa 100 peratus KIR migran keempat-empat etnik tidak ada persaingan ataupun konflik antara sesama migran, sesama pekerja mahupun penduduk tempatan di mana pun migran berada. Walau bagaimanapun persaingan/konflik di Kota Makassar masih ketara, terutamanya antara kelompok kampung dengan kelompok kampung lain yang padat penduduknya yang dilakukan oleh penduduk muda (remaja) kerana persaingan kelompok. Namun demikian peristiwa ini menunjukkan penurunan (BPS Makassar 2011).

Dari segi persaingan dan konflik bagi KIR dan isi rumah migran bukan merupakan masalah kerana tidak terbabit di dalamnya, makanya mereka merasa selesa tinggal di Kota Makassar. Hasil kajian menunjukkan bahawa KIR migran seramai (86.50 peratus) merasakan selesa tinggal di Kota Makassar, (9.67 peratus) merasakan sangat selesa, hanya sedikit, iaitu seramai (0.67 peratus) mewakili 4 orang responden yang tidak selesa tinggal di Kota Makassar. Migran terakhir inilah kurang berhasil meningkatkan kualiti hidupnya yang lebih baik berbanding dengan migran yang lain. Manakala migran yang tidak selesa tinggal di kota tetapi tidak berkeinginan tinggalkan Kota Makassar seramai (75.00 peratus) mewakili 3 orang responden, selebihnya (25.00 peratus) mewakili 1 orang responden berkeinginan hijrah keluar dari kota jika ada ruang dan peluang di daerah lain yang lebih menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya migran.

Selain daripada itu, didapati pula hasil kajian, menunjukkan bahawa migran yang selesa atau sangat selesa tinggal di Kota Makassar dengan alasan; 1) banyak hiburan atau keramaian atau pelancongan; 2) mereka merasa bangga atau hebat tinggal di ibu kota; 3) menambah wawasan dan kawan dari berbagai-bagai daerah, etnik, bahasa, agama, budaya dan sebagainya.

Walau bagaimanapun sebahagian KIR migran menghadapi pelbagai masalah semasa tinggal di kota, termasuklah diantaranya kos hidup yang tinggi (6.00 peratus); mahalunya perumahan yang disediakan oleh swasta (2.17 peratus), banjir pada musim hujan (3.33 peratus) kerana saluran longkang tidak lancar; persaingan dalam berusaha (5.00 peratus); jenayah (2.17 peratus) yang sering mengganggu ketenangan penduduk kota. Ini merupakan cabaran bagi migran dan pihak PKM dalam mengatasi dan mengurangi masalah tersebut sehingga memerlukan strategik yang tepat.





## BAB VII

# PENEMPATAN MIGRAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL

Peranan dan tanggungjawab merupakan dua konsep sikap yang mesti ada pada seseorang. Tanggungjawab amat berpengaruh dalam menentukan kecemerlangan kerjaya dalam mencapai matlamat hidup organisasi. Oleh itu dalam huraian ini untuk mengenalpasti peranan dan tanggungjawab kerukunan etnik terhadap migran di Kota Makassar terutamanya migran etnik Makassar, Bugis, Toraja dan Jawa.

Kerukunan etnik jika boleh dikatakan sama dengan pertubuhan bukan kerajaan /Non Government Organisation (NGO) walaupun peranan dan tanggungjawab kerukunan tidak seberat dengan NGO. NGO merupakan lembaga bukan kerajaan yang ditubuhkan dengan matlamat untuk membangun kemandirian masyarakat.

Menurut Teuku Erwansyah (2011) ada tiga strategi pendekatan yang mustinya dilakukan NGO, iaitu : (1). pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) atau pendekatan pada pemberian bantuan kepada kumpulan tertentu yang terkena musibah seperti kelaparan, bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk

memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses kemiskinan rakyat dan bukan memberikan kekuatan atau kemampuan dalam mengumpulkan dana bantuan; (2). pendekatan pembangunan (the developmental approach) memusatkan program kegiatan pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, dan kemandirian masyarakat; (3). pendekatan dalam konteks pemberdayaan pembangunan (the empowerment approach) yang melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberi kekuatan atau melatih rakyat untuk mengatasi kekurangupayaannya.

Dalam perbincangan ini pengkaji menggunakan istilah menggunakan NGO walaupun KIR migran keempat-empat etnik lebih sering menggunakan istilah kerukunan keluarga sehingga mereka memberi nama kerukunan keluarga etnik. Kerukunan keluarga merupakan perkumpulan yang anggota-anggotanya terdiri daripada sejumlah orang atau keluarga yang didasarkan pada perhubungan kekerabatan atau orang-orang yang berasal dari daerah yang sama. Pembentukan kerukunan keluarga matlamatnya untuk merangkumi kerabat atau orang yang berasal dari daerah asal yang sama di Kota Makassar. Selari yang disampaikan Bruner (1972) bahawa migran di destinasi biasanya membentuk perkumpulan-perkumpulan berdasarkan daerah. Selain daripada itu ruang lingkup kerjayanya pun terbatas sifatnya hanya kekeluargaan dan masa tak terikat, bergantung pada situasi dan keadaan kerukunan itu sendiri dan persekitarannya.

Perkumpulan NGO pelbagai etnik di Kota Makassar cukup banyak jumlahnya dan hampir setiap etnik dari wilayah asal mempunyai kerukunan keluarga. Namun yang dijadikan sasaran hanyalah kerukunan yang terlibat sebagai sampel penyelidikan,

itupun dibatasi, dipilih salah satu kerukunan yang mewakili kawasan daripada setiap etnik, diantaranya. (1), Etnik Bugis dengan nama *Kerukunan Masyarakat Wajo* (Kewama). Wajo adalah salah satu nama kabupaten yang ada didalam kawasan kerajaan provinsi Sulawesi Selatan dengan penduduknya majoriti etnik Bugis; (2), *Kerukunan Keluarga Turatea* Kabupaten Jeneponto. Jeneponto adalah salah satu nama kabupaten yang ada didalam kawasan kerajaan provinsi Sulawesi Selatan dengan penduduknya majoriti etnik Makassar; (3), *Kerukunan Rama* Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja adalah salah satu nama kabupaten yang ada didalam kawasan kerajaan provinsi Sulawesi Selatan dengan penduduknya majoriti etnik Toraja; dan (4), *Kerukunan Keluarga Klaten dan Kerukunan Keluarga Sragen Jawa*. Jawa adalah salah satu pulau yang ada ddalam kawasan Indonesia Barat terutamanya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Keempat-empat NGO daripada tiap-tiap etnik mempunyai matlamat yang hampir sama dalam menjalankan kegiatan, walaupun masa dan keaktifannya berbeza-beza, disesuaikan situasi dan keadaan daripada kerukunan keluarga itu (Tabel 7.1).

Berasaskan Tabel 7.1 didapati bahawa keempat-empat etnik dalam kegiatan kerukunan keluarga di Kota Makassar terdiri daripada tiga bahagian kegiatan utama, iaitu kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan persekitaran. Daripada ketiga kegiatan utama kerukunan keluarga masing-masing terdiri daripada sub-sub kegiatan dan semua kegiatan itu hampir sama antara keempat-empat etnik tersebut.

Kegiatan sosial misalnya, zikir dan doa, kegiatan ini selalu dijalankan satu kali seminggu atau satu kali sebulan, termasuk juga pada 10 Muharram bagi etnik yang beragama Islam. Dengan

harapan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan keselamatan dunia akhirat kepada rakyat, bangsa dan negara dan juga kejayaan pada masa hadapan yang lebih baik. Kegiatan inipun juga dilaksanakan oleh etnik Toraja yang majoriti beragama Kristian (non Islam) dengan cara kebaktian yang dijalankan setiap minggu secara bergilir antara satu tempat dengan tempat lain yang diisi dengan ceramah agama oleh pastor atau pendeta. Selain daripada itu dijalankan ibadah secara keseluruhan bagi ummat Kristian di gereja-gereja.

Kegiatan lainya kerukunan keluarga dalam bidang sosial, iaitu majlis taklim dengan diisi majlis ceramah agama untuk menambah dan meningkatkan wawasan keagamaan dan mempertebal iman. Kegiatan ini dijalankan kadang satu kali seminggu atau satu kali sebulan. Hal ini sama dengan kegiatan kutu-kutu yang dilaksanakan satu kali sebulan, diisi dengan ceramah agama. Kedua-dua kegiatan ini merupakan salah satu strategi yang diperankan oleh NGO untuk mempererat intensiti perhubungan antara seluruh anggota yang kadang diikuti oleh anggota seramai 30 – 50 orang setiap kegiatan yang dijalankan, bahkan mencapai ratusan orang anggota kerukunan mahupun diluar anggota kerukunan menghadiri kegiatan Maulid dan Isra'Miraj itu dijalankan. Selain daripada itu, kegiatan yang lainnya seperti kunjungan ke kolej panti asuhan, iaitu tempat berkumpulnya orang-orang lansia (lanjut usia) atau tempat berkumpulnya anak-anak yang tidak punya ibu bapa.

Tabel 7.1 Kegiatan NGO migran di Kota Makassar mengikuti etnik

Etnik/Kegiatan	Bugis	Makassar	Toraja	Jawa
<b>Sosial</b>	- Zikir dan doa - Majlis taklim - Kutu - Panti asuhan - Zakat Fitrah - Maulid, Isra 'Mi' raj	- Zikir dan doa - Majlis taklim - Kutu - Panti asuhan - Zakat Fitrah -Maulid, Isra 'Mi' raj	- Kebaktian <del>-Non Islam</del> -Kutu  -Panti asuhan -Hadiah Natal	- Zikir dan doa - Majlis taklim - Kutu - Panti asuhan - Zakat Fitrah -Maulid, Isra 'Mi' raj
<b>Ekonomi</b>	- Modal usaha kecil - Bantuan kena musibah - Maklumat perniagaan	- Modal usaha kecil - Bantuan kena musibah - Maklumat perniagaan	- Modal usaha kecil - Bantuan kena musibah - Maklumat perniagaan	- Modal usaha kecil - Bantuan kena Musibah - maklumat perniagaan
<b>Persekitaran</b>	- Kerjabakti - Keamanan/ ketertiban	- Kerjabakti - Keamanan/ ketertiban	- Kerjabakti - Keamanan/ ketertiban	- Kerjabakti - Keamanan/ ketertiban

Sumber : Temubual pengerusi NGO migran 2011 dan 2012

Kunjungan itu untuk memberikan wang sama ada pakaian mahupun makanan kepada mereka yang tinggal di kolej. Kegiatan ini dijalankan sebelum atau selepas memperingati hari jadi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia oleh keempat-empat etnik, walaupun masa kegiataannya tidak secara bersamaan dijalankan, disesuaikan situasi dan keadaan masing-masing NGO. Kadangkala juga kegiatan ini dijalankan sebelum atau selepas hari

Idul Fitri/Idul Adha bagi ummat Islam dan hari Natal bagi ummat Kristian.

Dari segi kegiatan lain di bidang ekonomi, NGO juga berperanan dan bertanggungjawab membantu anggotanya yang memerlukan aset usaha kecil misalnya penjual bakso, penjual jamu, penjual aiskrim, tukang servis tilam, tukang servis kasut/selipar, tukang beca, perniagaan di pasar tradisional dan lain-lainnya. Bantuan aset wang yang diberikan itu bervariasi jumlahnya antara Rp. 500,000 – 1 juta rupiah. (RM 166,5 – 333). Bantuan berupa wang yang diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diambil pada mulanya tanpa ada bunga dengan masa tempoh pengembalian wang itu kira-kira satu tahun. Selain daripada itu bantuan modal adalah berupa barang atau bahan yang diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan yang diceburi. Kegiatan ini merupakan salah satu peranan dan tanggungjawab NGO etnik membantu kerajaan dalam mengatasi bidang pekerjaan di sektor tidak formal.

Satu lagi kegiatan kerukunan di bidang ekonomi, ialah maklumat perniagaan. Maklumat perniagaan yang dimaksudkan ini adalah memberikan maklumat jika ada syarikat atau orang perseorangan yang memerlukan tenaga kerja sesuai dengan keahlian tertentu diperlukan oleh syarikat atau orang perseorangan tersebut. Kadangkala maklumat ini disampaikan melalui majlis taklim atau kutu-kutu atau antara individu dengan individu. Selain daripada kegiatan itu juga ada kegiatan dalam bentuk bantuan kena musibah seperti kebakaran dan banjir. Kegunaan bantuan ini bukan sahaja untuk anggota NGO etnik tetapi termasuk juga masyarakat yang kena musibah ini. Ini merupakan partisipasi dan keprihatian NGO etnik sebagai anggota masyarakat. Kegiatan ini juga membantu kerajaan dalam

meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk atau masyarakat yang terkena musibah.

Sementara kegiatan NGO dalam bidang persekitaran, ialah kegiatan kerjabakti atau gotong royong secara bersama-sama dengan pihak kerajaan yang diwakili oleh pengerusi Organisasi Rukun Tetangga (ORT) dan pengerusi Organisasi Rukun Wilayah (ORW), dan penduduk yang tinggal di tempat kerjabakti, seperti pembersihan rumah ibadah, (masjid, gereja dan lainnya), pembersihan saluran pembuangan air kotor (longkang) dan sampah. Kesemuanya ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keindahan dan kebersihan persekitaran dan dapat menimbulkan banjir kerana longkang tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini membuktikan peranan dan tanggungjawab NGO etnik membantu kerajaan dalam menjalankan program pembangunan yang sedang digalakkan, juga menciptakan perhubungan baik secara mesra antara NGO etnik, kerajaan dan etnik lainnya yang ada di persekitaran itu.

### **Impak Transformasi Sosial**

Kehadiran migran di Kota Makassar akan menimbulkan impak baik impak positif mahupun negatif. Sehubungan dengan itu bahagian ini akan dibincangkan impak transformasi sosial yang memberikan kesan sama ada kesan positif mahupun kesan negatif yang berlaku di Kota Makassar. Impak yang dimaksud adalah impak positif dan negatif yang ditimbulkan sebagai akibat transformasi sosial migran di Kota Makassar, terutamanya yang berkaitrapat dengan penduduk, pendidikan dan perhubungan, kawasan kumbahan, dan gejala sosial atau jenayah.



## **Impak positif**

Bahagian ini dibincangkan impak positif yang berkait rapat dengan pertambahan penduduk, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan meningkatkan hubungan erat migran.

### **a) Penambahan Penduduk**

Penduduk Kota Makassar tahun 2000 tercatat seramai 1,100,019 orang meningkat kepada 1,352.136 orang pada tahun 2012. Ini bererti ada peningkatan penduduk seramai 252,117 orang atau 22.20 peratus selama tempoh 12 tahun dari tempoh 2000 - 2012 atau purata penambahan penduduk setiap tahun seramai 21,019 orang termasuk di antaranya sumbangan daripada jumlah migran yang ada di Kota Makassar masa kini. Dengan jumlah penduduk seramai itu, semakin menambah komuniti dan memperkukuh perhubungan persaudaraan antara individu dengan individu atau antara kumpulan dengan kumpulan dalam komuniti etnik yang berbeza-beza dalam kawasan Kota Makassar, termasuklah di antaranya terbentuklah perkumpulan kerukunan (NGO) daripada masing-masing etnik. NGO itu menjadi wadah bagi migran dalam menyalurkan segala aspirasinya dan masalah-masalah yang dialami masing-masing migran dapat dimaklumkan melalui NGO itu.

NGO ini dapat juga membantu pihak Pemerintah Kota Makassar (PKM) dalam menangani isu-isu yang terjadi di kota seperti membantu masyarakat yang kena musibah kebakaran dan kematian, menangani sampah yang mengganggu saluran longkang untuk menghindari banjir, menjaga ketertiban keamanan penduduk dan persekitaran sehingga program-program

pembangunan di Kota Makassar yang telah dirancang dan dijalankan dapat berjalan lancar dan berjaya.

Di samping itu terdapat juga kampung-kampung NGO dalam wilayah Kota Makassar seperti kampung Makassar, kampung Bugis, kampung Toraja (Foto 1), kampung Jawa dan kampung etnik lainnya. Kampung ini muncul pada mula ketibaan daripada masing-masing etnik tinggal di tempat itu, lama kelamaan semakin ramai diduduki oleh etnik kerana migran yang lebih awal tinggal mengajak keluarganya atau kawan dari daerah asal yang sama untuk tinggal berkumpul di tempat itu, akibatnya terbentuklah komuniti etnik.



Gambar 7.1. Pintu gerbang petempatan etnik Toraja di Kota Makassar

Dengan pertambahan penduduk daripada pelbagai daerah asal yang berbeza etnik, bahasa, agama, adat istiadat dan lain-lain sehingga amat penting untuk saling memahami dan menghargai perbezaan itu menyebabkan timbulnya keharmonian

dan kemesraan dalam hidup bermasyarakat sebagaimana yang di simbolkan “Bhenika Tunggal Ika” ertinya berbeza-beza tetap satu, Indonesia. Hal ini sama dengan Malaysia, iaitu “1 Malaysia” yang terdiri daripada pelbagai etnik, bahasa, agama, resam dan lain-lain.

Selain daripada itu pembangunan digalakkan secara berterusan dengan menyediakan pelbagai fasiliti perkhidmatan yang semakin banyak untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin ramai dan meningkat dalam era globalisasi ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk Kota Makassar termasuk di dalamnya migran.

Dari sudut lain jumlah migran daripada masing-masing etnik yang berkualiti, merupakan modal asas pembangunan bagi pihak PKM. Kota Makassar akan semakin berkembang dan maju dengan menyatukan potensi sumber daya manusia daripada penduduk tempatan, migran dan pihak PKM. Impaknya pelbagai penghargaan yang telah di terima oleh Wali Kota Makassar daripada Pemerintah Pusat mahupun dari lembaga lain atas keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh PKM masa kini.

## **b) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan**

Salah salah indikator mengukur Human Development Indeks (HDI) adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh KIR migran keempat-empat etnik, lebih ramai pada peringkat SMA ke atas, terutama yang terjadi perubahan peningkatan tingkat pendidikan migran selepas berhijrah pada peringkat diploma dan sarjana.

Pencapaian tingkat pendidikan KIR migran merupakan modal bagi pihak PKM, kerana dengan pendidikan yang tinggi bagi migran mampu dan mudah memahami program-program yang dirancang dan dijalankan oleh pihak PKM. Manakala program itu direalisasikan di warga kota, maka bagi migran tidak sukar untuk menjalankan program itu kerana memiliki wawasan atau pengetahuan yang mudah memahami makna yang terkandung di dalam program itu sehingga realisasinya cepat dan lancar.

Dari sudut lain, KIR migran dengan pendidikan yang diperoleh dapat memberikan bantuan kepada sesiapaupun yang memerlukan berkaitan dengan tenaga mahir yang dia miliki untuk dapat diajarkan kepada sesama migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan untuk mencapai kejayaan bersama, terutamanya kepada migran keempat-empat etnik.

Selain daripada itu, dengan ramainya penduduk Kota Makassar, maka fasiliti prasarana dan sarana pendidikan juga meningkat baik kuantiti mahupun kualiti sehingga timbul persaingan sihat antara satu sekolah dengan sekolah lain untuk menarik simpatan penduduk atau masyarakat agar anak didik dapat mendaftar masuk ke sekolah tersebut.

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Kota Makassar, pihak PKM tahun 2008 telah menyiapkan prasarana dan sarana pendidikan yang terdiri daripada jumlah sekolah rendah seramai 463 unit, sekolah pertama 165 unit, sekolah menengah 106 unit. Ini bermakna untuk menampung usia sekolah bagi penduduk Kota Makassar. Oleh itu kerajaan Kota Makassar tahun 2014 merancang untuk : (1), mengoptimalkan pembiayaan pendidikan; (2), meningkatkan perluasaan dan

pemerataan pendidikan; (3) meningkatkan mutu tenaga pendidikan dan anak didik; (4), meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, (5), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (Pemerintah Kota Makassar 2014).

### **c) Meningkatkan hubungan sosial migran**

Perhubungan sosial (interaksi) merupakan satu perkara yang penting dalam membentuk perpanduan dalam negara atau daerah. Interaksi yang baik di kalangan anggota masyarakat mewujudkan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan. Interaksi boleh bermula dari peringkat individu kepada seorang individu yang lain dan berkembang keluar daripada persekitaran kepada komuniti. Keharmonian dalam interaksi bermula daripada interaksi antara individu dan seterusnya berkembang kepada interaksi dalam kerukunan.

Perhubungan sosial merupakan kunci dari semua kehidupan, oleh kerana itu tanpa perhubungan sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Proses sosial merupakan bentuk umum dari perhubungan sosial. Bagi Soerjano Soekanto (2007) perhubungan sosial diertikan sebagai perhubungan sosial yang dinamis, menyangkut perhubungan antara individu, antara kumpulan, mahupun antara individu dengan kumpulan.

Sehubungan dengan perhubungan KIR migran keempat-empat etnik diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, organisasi masyarakat dan persekitaran telah berjaya dalam mewujudkan kerjasama itu dengan baik antara sesama migran, penduduk tempatan mahupun sesama pekerja. Malah kerjasama KIR migran masa kini semakin lancar

dalam perhubungan antara satu keluarga dengan keluarga lain atau antara kerukunan satu dengan kerukunan lain, malah antara kampung satu dengan kampung lain. Ini maknanya, impak daripada perhubungan sosial ini menyebabkan interaksi semakin meluas dan semakin ramai migran yang terbabit di dalamnya.

Manakala ada kegiatan yang akan dijalankan pada tempat di mana migran tinggal dengan memerlukan tenaga untuk bersama-sama mengerjakan kegiatan itu dengan mudah dapat diselesaikan kerana dikerjakan secara gotong royong seperti halnya dalam memperingati hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Kota Makassar, pembersihan rumah ibadah, pembersihan longkang dan persekitaran lain yang memerlukan tenaga cukup banyak.

Kegiatan yang dijalankan secara gotong royong kerana keterlibatan secara aktif NGO etnik dan penduduk persekitaran, merupakan wujud peranan dan tanggungjawab sebagai masyarakat yang peduli akan pentingnya kebersamaan dalam menyokong pembangunan yang digalakkan oleh kerajaan. Ini menunjukkan perhubungan sosial berjalan dengan lancar dan merupakan modal asas bagi kerajaan dalam menjalankan program-program yang telah dicadangkan sehingga pihak kerajaan terbantu dalam menjalankan program, terutamanya untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar.

### **Impak negatif**

Bahagian ini menghuraikan impak negatif transformasi sosial yang berkaitan dengan kesesakan penduduk dan tekanan persekitaran, kawasan kumbahan dan kerawanan sosial.

## a) Kesesakan Penduduk

Sukri Nyompa et al. (2012a) menyampaikan bahawa kadar pertumbuhan penduduk kota pada dua dekad terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia sekitar 65 peratus disebabkan kerana migrasi dan reklasifikasi, hanya seramai 35 peratus disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara natural. Seperti halnya penduduk Kota Makassar yang berterusan bertambah dari tahun ke tahun dari pelbagai daerah dan pelbagai etnik, mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk. Tahun 2000 kepadatan penduduk seramai 6,330 orang kilometer bujursangkar meningkat kepada 6,790 orang kilometer bujursangkar tahun 2005, dan tahun 2010 meningkat lagi kepada 7,590 orang kilometer bujursangkar. Manakala keluasan kawasan Kota Makassar tidak bertambah hingga masa kini.

Dengan bertambahnya penduduk dari luar kota ke Kota Makassar untuk menetap secara kekal, maka kota akan semakin padat dan akhirnya memberi impak dengan munculnya fenomena fizik, dan sosial. Kesemuanya ini akan mengakibatkan tekanan persekitaran kotor, tercemar dan sanitasi tak berfungsi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan pelbagai penyakit pada masyarakat. Padatnya penduduk tidak menutup kemungkinan menimbulkan keresahan dan gangguan sosial bahkan peluang akan terjadi konflik antara penduduk dengan penduduk lain atau antara etnik satu dengan etnik lain yang ada dalam kawasan kota dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembangunan yang semestinya berjalan dengan lancar tetapi terhambat kerana pelbagai persoalan yang muncul di masyarakat padahal pembangunan yang digalakkan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

Penduduk merupakan salah satu komponen yang ada dalam pembangunan, tanpa ada penduduk pembangunan tak ada maknanya, manakala penduduk tanpa pembangunan juga tak ada maknanya. Oleh yang demikian, penduduk yang banyak dan padat sangat berkait rapat dengan pembangunan, malah penduduk yang berkualiti menjadi modal asas dalam pembangunan, tetapi penduduk yang tidak berkualiti akan menjadi beban pembangunan. Pembangunan semestinya tidak lepas daripada penduduk yang banyak, sebab pembangunan untuk penduduk bererti pembangunan matlamat untuk kesejahteraan penduduk.

Sehubungan dengan kepadatan penduduk termasuklah di dalamnya migran di kota, jika tidak ditangani secara serius akan menjadi beban bagi pihak PKM dalam pembangunan. Oleh itu, mestilah disediakan pelbagai perkhidmatan seperti fasiliti pendidikan, kesihatan, perumahan, dan fasiliti sosial lainnya, malah akan muncul jenayah dimana-mana di Kota Makassar, manakala keperluan tidak dapat dipenuhi sama sekali. Selain itu taburan penduduk tidak seimbang, kadang bertumpuk pada suatu tempat tertentu dan menimbulkan kepadatan dan kesesatan sehingga persekitaran kurang bersih, indah dan sihat, malahan menimbulkan permukiman kumbahan.

## **b) Kawasan Kumbahan**

Salah satu kesan negatif akibat migrasi ke kota adalah terbentuknya kawasan sesak dan melarat. Migrasi yang tidak terkawal boleh menyebabkan wujudnya kawasan kumbahan di tengah kota yang sesak dan tidak terurus yang akan menjejaskan keadaan kesihatan dan juga kualiti hidup.



Suatu kota yang besar tidak lepas daripada kawasan kumbahan. Ini salah satu ciri kota yang berkembang menuju ke arah kota yang lebih maju. Penduduk Kota Makassar yang terus bertambah dari tahun ke tahun daripada pelbagai daerah dan etnik, mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk. Dengan pertambahan penduduk, maka kota akan semakin padat dan akhirnya memberi impak dengan turut terbentuk penempatan kotor dengan membangun kawasan kumbahan disekeliling kota yang menempati tanah-tanah kosong. Bagi Cangara (1999) menyatakan bahawa penempatan kotor mereflesikan tiga fenomena, iaitu; (1) aspek yang bobrok dan berserabut; (2) posisi sosial ekonomi penghuninya yang melarat; dan (3) aspek jenayah dan keamanan.

Kawasan kumbahan merupakan gejala sosial di kota yang besar sehingga perlu menggubal dasar baru untuk menyusun semula penempatan setingan. Kemudahan fasiliti perumahan murah perlu dibina untuk penduduk termasuk bagi para migran dan menciptakan daya dukung persekitaran yang lestari. Oleh kerana itu pihak kerajaan melalui Perumahan Nasional (Perumnas) telah membangun rumah murah tipe 21, tipe 36 tipe 45, dan tipe 54. Selain itu pihak kerajaan bekerjasama dengan pihak swasta telah membangun rumah susun di beberapa tempat di Kota Makassar untuk mengatasi kawasan kumbahan.

### c) Gejala sosial

Penduduk yang ramai dan padat, perumahan yang tidak teratur dan tersusun, persekitaran yang kurang penyokong kehidupan yang selesa, perhubungan sosial kurang rapat bahkan tidak rapat. Kesemuanya ini dapat menimbulkan impak kehidupan penduduk atau masyarakat akan terganggu,

kerawanan sosial dapat terjadi seperti bahaya kebakaran, jenayah, konflik antara individu dengan individu, antara individu dengan kumpulan atau antara kumpulan dengan kumpulan sehingga stabiliti keamanan dan kehidupan sosial masyarakat tidak terjadi keharmonian dan mesra dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Nurmala (2004) daripada hasil kajiannya mendapati bahawa migran di Kota Makassar berimpak terhadap keadaan persekitaran kerana prilaku migran seperti mabuk, perkelahian secara kelompok, perjudian dan lainnya. Sehubungan dengan itu Norimah Rambeli & Fauziah Che Leh (2010) menjelaskan bahawa migrasi mewujudkan pelbagai budaya, resam dan bahasa akan tetapi dapat juga mewujudkan ketegangan atau konflik budaya yang akan membawa kepada prasangka. Hal ini dapat memungkinkan kerana keadaan kehidupan di kota amat mencabar dan tingkat pendidikan yang kurang memadai, ketrampilan kurang cukup, aset yang terbatas, kurangnya persiapan mental dalam menghadapi masalah di kota (Sukri Nyompa et.al 2012a).

Secara keseluruhan huraian bab ini telah menyetengahkan tentang transformasi sosial yang berlaku terhadap keempat-empat etnik di Kota Makassar. Dari aspek demografi, jumlah penduduk Kota Makassar meningkat 22.2 peratus pada tahun 2012 kerana kelahiran dan migrasi masuk yang ramai.

Bab ini turut membincangkan tingkat pendidikan yang menunjukkan perubahan tingkat pendidikan sebelum dan selepas berhijrah. Daripada tiga kumpulan peringkat pendidikan, iaitu: 1) peringkat TS dan SD; 2) peringkat SMP dan SMA; dan 3) peringkat

diploma dan ijazah. Secara keseluruhan kumpulan peringkat SMP dan SMA keempat-empat etnik yang paling ramai berbanding dengan peringkat pendidikan lainnya. Perubahan peringkat pendidikan SMA ke peringkat pendidikan diploma dan ijazah meningkat terutamanya daripada etnik Toraja diikuti etnik Bugis, Makassar dan etnik Jawa.

Dari segi perhubungan migran dalam kerjasama bidang ekonomi, budaya, organisasi masyarakat dan persekitaran keempat-empat etnik terjalin kerjasama yang lancar terhadap sesama migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan. Selain daripada itu, seramai 86.50 peratus KIR migran merasa selesa tinggal di Kota Makassar dan intensiti perhubungan migran dengan keluarga di daerah asal lancar.

Peranan dan tanggungjawab NGO amat penting bagi migran dalam menjalin perhubungan yang semakin mesra antara migran dari daerah asal yang sama mahupun migran dari daerah lain sehingga perhubungan sosial yang terjadi semakin berkembang dan meluas. Kesemuanya itu dapat mencegah munculnya berbagai konflik atau pertikaian antara migran dengan migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan migran.

Dengan adanya transformasi sosial migran dapat menimbulkan impak positif mahupun impak negatif. Impak positif termasuklah penambahan jumlah penduduk, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan interaksi sosial. manakala impak negatif adalah kepadatan penduduk, permukiman kumuh dan kerawanan sosial.

## BAB VIII

# PERANAN PEMERINTAH DALAM TRANSFORMASI SOSIAL

Bab ini membicarakan peranan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar (PKM) dalam autonomi daerah dan akta pentadbiran kependudukan yang berlaku di Kota Makassar. Selain itu dihuraikan juga cabaran PKM dalam pembangunan untuk kepentingan penduduk Kota Makassar termasuk di dalamnya migran. Walaupun asasnya tiada polisi khusus untuk migran, namun dalam pembangunan di Kota Makassar secara langsung dan tidak langsung telah memberi manfaat kepada KIR migran dan keluarga.

Perkembangan terkini dalam politik pemerintahan dan pentadbiran negara memberi kesan yang besar terhadap aspek kependudukan wilayah-wilayah pinggir seperti Sulawesi Selatan. Salah satu kesan perubahan dasar pemerintahan di peringkat pusat yang memberi impak kepada wilayah pinggir ialah pengenalan undang-undang autonomi daerah melalui desentralisasi kuasa. Undang-undang ini memberi kesan pula ke atas penduduk terutamanya yang berkaitan dengan migrasi. Bahagian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya peranan akta autonomi daerah dan akta pentadbiran

kependudukan kepada penduduk terutamanya migran di Kota Makassar.

## **Peranan Akta Autonomi Daerah Dalam Pembangunan Kota Makassar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahawa kerajaan di peringkat daerah berfungsi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas autonomi daerah. Undang-undang autonomi daerah memberi peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha memberi kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan, pemberdayaan dan penglibatan masyarakat, serta peningkatan daya saing pemerataan, keadilan dan keistimewaan sesuatu daerah di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Autonomi Daerah Republik Indonesia 2009).

Jika diperhatikan desentralisasi urusan wajib seharusnya dijalankan oleh kerajaan daerah dengan semaksimal mungkin bagi memanfaatkan potensi sumber alam dan sumber manusia yang ada dengan ketersediaan kewangan yang mencukupi, maka peluang penduduk tempatan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan kesihatan yang lebih baik, memudahkan mendapatkan pekerjaan sama ada di sektor formal mahupun informal, dapat mengurangi pengangguran, menciptakan persekitaran yang nyaman dengan perancangan pembangunan yang teratur, pengadaan pembangunan yang berorientasi projek, penyediaan perumahan yang murah, pembinaan jalan yang lebar dan baik untuk melancarkan pergerakan, seterusnya memesatkan pertumbuhan ekonomi dan penduduk tempatan dapat mencapai kehidupan serta kesejahteraan yang lebih baik. Namun demikian tidak semua kerajaan daerah dapat melakukan

hal tersebut kerana keterbatasan kewangan, sumber alam dan sumber manusia. Salah satu kesan autonomi daerah adalah terjadinya migrasi keluar dari daerah tersebut.

Manakala kerajaan kabupaten/kota belum mampu memenuhi keperluan dan keinginan penduduknya secara keseluruhan, maka penduduk yang tidak terpenuhi keperluan dan aspirasinya, akan melakukan penghijrahan yang tidak dapat dihalangi (Ida Bagus Mantra 2013). Apatah lagi jika terjadi perbezaan faktor yang sangat ketara antara satu daerah dengan daerah lain, khususnya antara desa dan kota seperti halnya di Kota Makassar. Istilahnya di mana ada gula di situ ada semut. Maknanya selama Kota Makassar memberikan ruang dan peluang untuk beraktiviti dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, maka akan selalu terjadi penghijrahan ke Kota Makassar. Ini selari dengan apa yang dikatakan oleh Lee (1976) bahawa proses terjadinya penghijrahan kerana adanya faktor tolakan di kawasan asal, faktor tarikan di kawasan destinasi, faktor rintangan dan faktor individu untuk mengambil keputusan berhijrah atau tidak berhijrah.

Ketakseseimbangan yang terjadi antara satu daerah dengan satu daerah lain menyebabkan penduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan penghijrahan dari satu daerah ke satu daerah lain. Oleh kerana itu pembangunan daerah perlu diarahkan untuk lebih mengembangkan dan memesatkan kadar pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta mampu membuka daerah terpinggir dan mempercepat pembangunan kawasan yang tertinggal. Sebagai contoh berlakunya migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan mencerminkan perbezaan pertumbuhan dan ketakmerataan

kemudahan pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Selama masih terdapat perbezaan tersebut, migrasi penduduk desa ke kota akan terus berlangsung.

Berasaskan daripada pasal 14 point 1 dan 2, serta pasal 22, maka diharapkan peranan autonomi daerah d bawah pemerintahan Wali Kota Makassar atau pihak PKM, memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) secara maksimal dengan perkhidmatan yang optimal daripada segala aspek kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk, supaya penduduk yang sudah menetap termasuklah migran mendapat ruang dan peluang dalam beraktiviti dalam bidang sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menggunakan dana daripada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang berpunca daripada kerajaan pusat, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berpunca dari kerajaan daerah.

Untuk mewujudkan secara nyata peranan autonomi daerah pihak PKM bekerjasama dengan pihak swasta telah melakukan pelbagai upaya dalam pembangunan Kota Makassar. Di antaranya mengembangkan wilayah kota dengan membangun fasiliti perumahan, membangun pasaraya, kedai-kedai, membuka lapangan kerja, penataan persekitaran, dan fasiliti sosial lainnya untuk keperluan bagi penduduk yang ada di sekitar kawasan itu termasuk migran kerana pembangunan yang dijalankan oleh pihak PKM bukan untuk penduduk kota sahaja, juga kepada pendatang untuk menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak PKM, apatah lagi tiada Undang-Undang yang melarang orang datang ke Kota Makassar untuk bermastautin yang penting memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak PKM.

Sehubungan itu untuk menghindari ramainya penduduk ke pusat kota, mengatasi kesesatan di kota, maka pembangunan diarahkan ke kecamatan yang memiliki ruang, peluang untuk dikembangkan, akibatnya muncul pusat-pusat kota kecil dalam wilayah Kota Makassar. Ini dilakukan secara berterusan dalam membangun Kota Makassar yang lestari dan berdayahuni sesuai persekitaran fizikal, potensi SDA, SDM, dan anggaran kewangan yang tersedia sebagaimana yang diharapkan akta autonomi daerah.

### **Peranan akta pentadbiran kependudukan di Kota Makassar**

Bahagian ini dibincangkan realisasi akta pentadbiran kependudukan di Kota Makassar. Disamping itu diuraikan juga peranan dan strategi pihak PKM dalam memberi maklumat secara meluas kepada sesiapa yang berkenaan dengan akta pentadbiran kependudukan di Kota Makassar. Selain itu diuraikan peranan akta pentadbiran kependudukan dalam menyusun dan mengatur penduduk tempatan dan pendatang ke Kota Makassar agar data kependudukan itu dapat dijadikan asas dalam rancangan pembangunan yang akan dijalankan oleh PKM.

Dalam merealisasikan pelaksanaan akta pentadbiran kependudukan di Kota Makassar secara lebih terperinci, telah dibuatkan suatu aturan berupa Peraturan Daerah Kota Makassar Nombor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pentadbiran Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nombor 9 Tahun 2009 terdiri daripada 19 Bab, 54 pasal. Di antara pasal itu yang akan dikaji hanya berkaitan dengan pendaftaran kependudukan bagi penduduk yang baru datang dengan maksud menetap di Kota



Makassar. Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus didaftarkan kerana membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kad keluarga, kad tanda penduduk dan/atau warkah, alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal kekal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nombor 9 Tahun 2009, pada Bab VI, Pasal 12 dijelaskan bahawa setiap penduduk yang baru datang dengan maksud untuk tinggal menetap di Kota Makassar wajib daftarkan diri kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Wilayah (RW). Lurah tempatan dalam masa selambat-lambatnya 14 hari sejak tarikh kedatangan penduduk dengan membawa warkah hijrah dari daerah asal kerana Lurah wajib daftarkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Camat selambat-lambatnya tarikh 4 setiap bulannya dan Camat wajib daftarkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Wali Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selambat-lambatnya tarikh 7 setiap bulannya, demikian pula Wali Kota wajib daftarkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selambat-lambatnya tarikh 10 setiap bulannya sesuai dengan ayat pada Bab VI Pasal 16.

Untuk memudahkan proses dan tata cara pendaftaran penduduk yang datang di Kota Makassar, maka kerajaan Kota Makassar membuatkan satu aturan, iaitu Peraturan Wali Kota Makassar Nombor 01 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nombor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pentadbiran kependudukan dan Catatan Sivil di Kota Makassar.

Di dalam Peraturan Wali Kota Nombor 01 tahun 2010, salah satu yang dihuraikan adalah klasifikasi penghijrahan penduduk yang ada di Kota Makassar. Klasifikasi tersebut untuk membezakan penduduk yang datang berasaskan sempadan daerah. Untuk jelasnya klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi a : dalam satu kelurahan
- Klasifikasi b : antara kelurahan dalam satu kecamatan
- Klasifikasi c : antara kecamatan dalam kota
- Klasifikasi d : antara kota dalam satu provinsi
- Klasifikasi e : antara provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Klasifikasi f : antara negara

Klasifikasi tersebut di atas yang pengkaji maksudkan adalah klasifikasi d dan e, yang berasal daripada etnik Makassar, Bugis dan Toraja. Ketiga-tiga etnik ini berada di dalam kawasan kabupaten/kota dalam satu provinsi, iaitu Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan etnik Jawa berasal dari provinsi lain di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari kabupaten/kota dan provinsi ke Kota Makassar harus daftarkan diri kepada Lurah tempatan dengan menunjukkan warkah Keterangan Penghijrahan dari daerah asal. Untuk kelancaran pendaftaran penduduk di daerah destinasi dengan mengikuti beberapa tahapan dijelaskan sebagai berikut:

### 1).Tata Cara Di Kelurahan

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani borang permohonan hijrah datang;
- b. Petugas pendaftaran mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Lurah menandatangani dan meneruskan borang permohonan hijrah datang kepada Camat.

### 2).Tata Cara Di Kecamatan

- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- b. Camat menandatangani borang/formulir permohonan hijrah datang dan menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Hijrah Datang.


### 3).Tata Cara Di Dinas

- a. Petugas Dinas menerima borang/formulir permohonan hijrah datang yang telah ditandatangani oleh Camat;
- b. Petugas Dinas mencatat permohonan hijrah datang penduduk;
- c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Hijrah Datang;
- d. Surat Keterangan Hijrah Datang digunakan sebagai dasar dalam proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
- e. Petugas Dinas merekod ke dalam Database Kependudukan terhadap Hijrah Datang penduduk dimaksud.


Berasaskan realisasi pelaksanaan daripada Akta Pentadbiran Kependudukan yang berlaku di Kota Makassar, didapati hasil kajian bahawa seramai 71.67 peratus daripada 600 KIR migran keempat-empat etnik yang mendaftarkan diri untuk

meninggalkan daerah asal dan hanya 28.33 peratus yang tidak minta izin atau tidak mendaftarkan diri akan meninggalkan daerah asal tetapi pada saat penghijrahan ke Kota Makassar telah meningkat seramai 83.5 peratus mendaftarkan diri pada kerajaan tempatan dan selebihnya 16.5 peratus yang tidak mendaftarkan diri (Gambar 6.3), kerana berbagai alasan di antaranya, tidak perlu daftarkan diri; kerana tidak faham; pengurusan sulit atau susah, tidak sempat datang mendaftar dan malas; faktor kos; dan pejabat tempat mendaftar jauh dari tempat kediaman. Alasan ini sama juga yang berlaku pada daerah asal bagi penduduk yang akan meninggalkan daerah asalnya. Hal ini semua kerana ketidakfahaman sebahagian penduduk tentang pentingnya peranan pentadbiran kependudukan.


Oleh yang demikian, pihak PKM dengan strategik mengsosialisasi Akta Pentadbiran Kependudukan yang dilakukan kepada penduduk kota melalui pelbagai cara seperti dimaklumkan melalui masjid, maklumat itu di letakkan pada setiap pejabat lurah, camat dan wali kota (gambar 8.1a & b). Juga maklumat itu diletakkan di jalan-jalan strategik dalam wilayah Kota Makassar yang mudah ditemukan oleh sesiapa yang membacanya (gambar 8.2). Ini bermakna bahawa setiap penduduk yang ada di dalam wilayah Kota Makassar harus faham dan taat memenuhi hukum yang berlaku yang berkaitan dengan Akta Pentadbiran Kependudukan. Akibatnya penduduk mulanya tidak faham menjadi faham akan pentingnya peranan Akta Pentadbiran Kependudukan agar data kependudukan dapat tersusun, dikemas dan ketepatan.



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN dan  
H. SUPOMO GUNTUR  
Wakil Kota Makassar dan  
Wakil Walikota Makassar



**PERATURAN DAERAH KOTA  
MAKASSAR  
NOMOR : 9 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL**



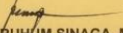
Drs. MARUHUM SINAGA, MBA  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Makassar

**BAB. XIII PASAL 45**


1. PENERBITAN **AKTA KELAHIRAN** YANG PELAPORANNYA TIDAK MELEBIHI WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK KELAHIRAN **DIGRATISKAN**, LEWAT 1 (SATU) TAHUN DIKENAKAN BIAYA Rp. 50.000,- ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) .
2. PENERBITAN **KARTU KELUARGA (KK) DIGRATISKAN**, YANG RUSAK ATAU HILANG DIKENAKAN BIAYA Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH).
3. **PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)** BAGI USIA 17 TAHUN ATAU BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH KAWIN ATAU PERNAH KAWIN DIBERI TOLERANSI PENGURUSAN **GRATIS SELAMA 6 (ENAM) BULAN**, LEWAT 6 (ENAM) BULAN DIKENAKAN BIAYA RP. 50.000,- ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
4. **PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)** YANG HABIS MASA BERLAKUNYA DIBERI TOLERANSI PENGURUSAN **GRATIS SELAMA 6 (ENAM) BULAN**, LEWAT 6 (ENAM) BULAN DIKENAKAN BIAYA RP. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
5. **PENGGANTIAN KTP** YANG RUSAK ATAU HILANG DIKENAKAN BIAYA Rp. 25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).
6. PENERBITAN **AKTA KEMATIAN DIGRATISKAN**.
7. SURAT **KETERANGAN PINDAH DIGRATISKAN**.

Makassar, 10 Mei 2010

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR**



Drs. MARUHUM SINAGA, MBA  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19531108 197403 1 002



Gambar 8.1a Maklumat ini di letakkan pejabat kerajaan

**HIMBAUAN !**  
No. 474.4/01/Dukcapil/ 2009

PEMBERIAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN  
AKTA-CATATAN SIPIL SECARA GRATIS

**Dasar :** Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar

**DIHIMBAU KEPADA SELURUH WARGA KOTA MAKASSAR UNTUK SEGERA MENGURUS DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA-CATATAN SIPIL YANG DIGRATISKAN ANTARA LAIN :**

1. AKTA KELAHIRAN
2. AKTA KEMATIAN
3. KARTU KELUARGA (KK)
4. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
5. SURAT KETERANGAN PINDAH

**UNTUK PENGURUSAN KK DAN KTP :**

- Membawa pengantar RT/RW dari tempat domisili (tempat tinggal)
- Mengisi formulir yang telah disediakan masing-masing kelurahan
- Membawa kartu keluarga bagi yang akan mengurus KTP
- Membawa Foto Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan ( Bagi yang sudah menikah / kawin)
- Membawa Foto Copy Akta Kelahiran
- Membawa KTP lama bagi yang memperpanjang KTP
- Membawa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian bagi yang akan melakukan penggantian KTP/ KK

**UNTUK PENGURUSAN PINDAH / DATANG PENDUDUK**

- Membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
- Mengisi Formulir Pindah Penduduk yang telah disediakan di masing-masing kelurahan
- Membawa KTP Asli bagi penduduk yang akan pindah ke luar Kota Makassar
- Membawa Foto Copy Kartu Keluarga ( KK )
- Membawa Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar

**UNTUK PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN**

- Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit atau dari Kantor Kelurahan
- Foto Copy Akta Nikah atau Perkawinan Orang Tua
- Foto Copy KK dan KTP Orang Tua / Pelapor

**UNTUK PENGURUSAN AKTA KEMATIAN**

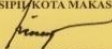
- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Kantor Kelurahan / Yayasan
- Foto Copy KK dan KTP bagi yang meninggal


Pengurusan KTP, KK dan SURAT PINDAH dilakukan di Kecamatan tempat berdomisili, sedangkan pengurusan AKTA KELAHIRAN dan AKTA KEMATIAN dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Program gratis berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2009 \_\_\_\_\_ Bagi penduduk yang tidak mengurus Dokumen Kependudukan sampai batas akhir yang telah ditentukan akan dikenakan biaya sesuai PERDA yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Jl. Sultan Ajudin Komplek Teduh Bersinar No. 295 Telp. (0411) 866520.

Makassar, 14 September 2009  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

  
**Drs. MARUHIUM SINAGA, MBA**  
Fungsikan : Pembina Utama Muda  
NIP. 19531108 197403 1 002



Gambar 8.1b Maklumat ini di letakkan pejabat kerajaan



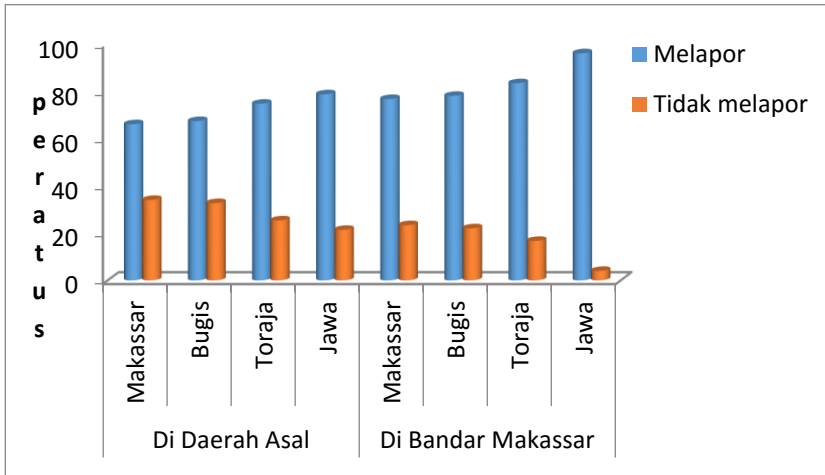
Gambar 8.2 Maklumat pentadbiran kependudukan di letak di jalan raya

Data penduduk yang tersusun dan tepat akan mudah dijadikan asas dalam perancangan polisi pihak PKM dalam peningkatan dan perluasan pembangunan lestari dan berdayahuni di Kota Makassar. Kesemuanya ini untuk memberikan kemudahan dalam perkhidmatan sosial ekonomi dalam menyokong aktiviti penduduk untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya yang lebih baik dari semula.

Gambar 8.3 juga menunjukkan bahawa KIR migran keempat-empat etnik, lebih banyak mendaftarkan diri (71.67 peratus) kepada kerajaan daerah asal untuk berhijrah ke Kota Makassar berbanding dengan tidak mendaftar diri (28.33 peratus). Pola ini turut berlaku juga kepada keempat-empat etnik selepas berhijrah ke Kota Makassar, malah telah meningkat pada saat daftarkan diri (83.5 peratus) pada kerajaan tempatan atas penghijrahannya ke Kota Makassar dan semakin berkurang yang

tidak daftarkan diri (16.5 peratus). Terutamanya etnik Jawa sangat ketara keprihatinan dalam memdaftarkan diri sebagai penduduk pendatang di Kota Makassar kerana etnik Jawalah yang paling terjauh daerahnya dari Kota Makassar berbanding dengan daerah etnik lain. Di samping itu etnik Jawa juga merasa tahu diri bahawa ia adalah pendatang di luar daripada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan itu, Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) daripada pihak PKM seringkali melakukan pemeriksaan identiti diri bagi penduduk pendatang di tempat keramaian atau hiburan, di pasar-pasar, di jalan-jalan raya. Ini bermakna bahawa pentingnya peranan Akta Pentadbiran Kependudukan disebarluaskan dan di maklumkan kepada semua penduduk agar dapat difahami. Dalam pelaksanaannya Akta Pentadbiran Kependudukan telah berjaya, walaupun belum maksimal secara keseluruhan, tetapi pihak PKM tetap melakukan sosialisasi secara berterusan dan tuntas kepada penduduk Kota Makassar.



Gambar 8.3 KIR migran yang memdaftarkan diri dan tidak di daerah asal dan di Kota Makassar 2011



Dari sudut lain, kandungan akta ini didapati bahawa penduduk dengan sengaja memalsukan warkah dan/atau dokumen dalam pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, maka mereka di hukum dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp. 50,000,000 (RM 16,667.00), sesuai Ketentuan Denda Bab XII pasal 93, sedangkan pasal 96 dikatakan bahawa setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan borang dokumen kependudukan di hukum penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda paling banyak Rp.1,000,000,000 (satu billion rupiah) Selanjutnya pasal 97 di jelaskan bahawa setiap penduduk dengan sengaja daftarkan diri sebagai ketua isi rumah atau anggota isi rumah lebih daripada satu Kad Keluarga atau memiliki Kad Tanda Penduduk lebih daripada satu, maka yang bersangkutan akan dikenakan undang-undang penjara tidak lebih dua tahun dan/atau denda paling besar sebanyak Rp 25,000,000 (RM 8,333.00). Selain itu diminta mereka pulang ke daerah asal, jika di dapati tidak memiliki identiti penduduk Kota Makassar. Ini merupakan salah satu cabaran kepada penduduk pendatang untuk segera mendaftarkan diri kepada pihak PKM agar tidak terkena saman.

Berasaskan Akta Nombor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (SPPN), mengatur bahawa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota disusun dengan berpanduan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan kepentingan nasional dan provinsi sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJPDP).

RPJMD Kota Makassar Tahun 2009-2014 merupakan kelanjutan dari RPJMD Kota Makassar Tahun 2005-2010 dalam kerangka RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 yang bukan hanya merupakan lanjutan dari ke dalam program-program pembangunan dengan pendekatan urusan kerajaan yang akan dijalankan oleh PKM, tetapi juga merupakan program pembangunan yang akan dijalankan oleh semua pihak yang terbabat dalam proses pembangunan di Kota Makassar.

Rancangan utama pembangunan di bidang sosial, bidang ekonomi, dan persekitaran yang disusun pihak PKM cukup banyak, tetapi hanyalah sebahagian sahaja yang dijelaskan pada bagian ini, meliputi :

### **Keutamaan peningkatan bidang sosial**

1. Peningkatan kualiti dan pemerataan pendidikan adalah sekolah percuma untuk SD, SMP dan SMA, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah;
2. Peningkatan kesihatan masyarakat secara percuma;
3. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, dibutuhkan:

1. Penyediaan sistem informasi yang memadai, peningkatan fasiliti kegiatan ekonomi masyarakat dan perkhidmatan dunia usaha berbasis teknologi informasi;
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pengembangan sentral industri rakyat, pembinaan kelompok-kelompok usaha produktif dan pembentukan klinik bisnis kecamatan;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, peningkatan

latihan dan kursus bagi pencari kerja serta peningkatan pola kemitraan pemerintah dengan pelaku usaha.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam (SDA) dan persekitaran hidup dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Membangun kesedaran masyarakat agar peduli pada isu persekitaran hidup dan berperanan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualiti persekitaran hidup;
3. Pengembangan kawasan dan penataan ruang kota yang terpadu;
4. Mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
5. Meningkatkan upaya pengendalian impak persekitaran akibat kegiatan pembangunan;
6. Ketersediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

### **Polisi PKM dalam pembangunan Kota Makassar**

Berasaskan rancangan arah polisi dan matlamat utama program pembangunan yang telah dibuat dan dijalankan oleh pihak PKM semasa kini dengan menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp. 160,431,745,000 billion (RM 53,423 billion) pada tahun anggaran 2009 telah meningkat kepada Rp. 229,87 billion (RM 76,546 billion) pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 43.28 peratus. Dana guna pakai ini belum termasuk dana perimbangan dan dana pendapatan yang sah. Manakala dana secara keseluruhan yang di proyeksikan akan

diterima oleh pihak PKM pada tahun 2014 akan mencapai sebanyak Rp. 1,57 trilyun (RM 522,81 billion) lebih. Ini bermakna bahawa dana itu dapat memberikan sumbangan dalam menjalankan rancangan arah polisi dan matlamat prioritas program pembangunan di Kota Makassar sesuai harapan autonomi daerah, pemanfaatan kewangan yang dimiliki oleh kerajaan Kota Makassar untuk diguna pakai dalam peningkatan pembangunan ke arah peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Makassar yang lebih baik pada masa hadapan.

Pembangunan yang dijalankan di Kota Makassar adalah berorientasi pembangunan lestari dan berdayahuni. Di samping itu ruang dan peluang terbuka bagi penduduk melakukan aktiviti di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu pihak PKM dalam pelbagai polisi memberikan perkhidmatan secara percuma kepada penduduk tempatan mahupun penduduk pendatang yang sudah terdaftar sebagai penduduk kekal di Kota Makassar. Polisi pihak PKM memberikan perkhidmatan secara percuma kepada penduduk yang memenuhi persyarat termasuklah di antaranya memiliki kad identiti demografi, perkhidmatan sosial dan bantuan ekonomi.

Sebagaimana yang telah dihuraikan sebelumnya didalam Bab VII ini bahawa penduduk pendatang diwajibkan mendaftarkan diri pada kerajaan tempatan sesuai dengan Akta Pentadbiran Kependudukan. Hal ini dijalankan agar pendatang benar-benar sudah terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar sehingga pangkalan data kependudukan lebih tersusun, teratur dan sah. Data kependudukan yang benar dan tepat dapat dijadikan data asas untuk pengambilan polisi dalam pelan pembangunan termasuk di antaranya polisi kemudahan-

kemudahan identiti, sosial dan ekonomi percuma (Tabel 8.1, 7.2, dan 7.3).

Berasaskan Tabel 8.1 mendapati bahawa KIR migran dan isi rumah keempat-empat etnik seramai 430 orang yang mendapatkan polisi percuma daripada kad identiti sebagai penduduk Kota Makassar. Di antaranya paling ramai mendapatkan kad tanda penduduk seramai 67 peratus mewakili 189 orang, Manakala kad warkah akte kelahiran seramai 33 peratus mewakili 141 orang daripada keempat-empat etnik. Kedua-dua kad ini amat penting diperlukan jika melakukan dengan pelbagai urusan di pejabat kerajaan Kota Makassar. Kad tanda penduduk misalnya selalu ke bawa kemana-mana kerana kad itu dapat diguna pakai di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara warkah akte kelahiran pada mulanya percuma selepas itu ada bayaran. Ini merupakan salah satu langkah yang dijalankan pihak PKM untuk menghadkan jumlah kelahiran.

Tabel 8.1 Kemudahan identiti percuma yang didapat KIR migran dan isi rumah semasa di Kota Makassar

Polisi Percuma	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
Warkah akte kelahiran	35	30	37	34	33	32	36	36	141	33
Kad tanda penduduk	82	70	73	66	69	68	65	64	189	67
Jumlah	117	100	110	100	102	100	102	100	430	100

Nota : Bil adalah Bilangan

Sumber : Kerja lapangan 2011

## BAB IX

# KEMUDAHAN SOSIAL DAN TRANSFORMASINYA

Seramai 1,194 orang dari 2,662 orang KIR dan isi rumah migran keempat-empat etnik memanfaatkan polisi fasiliti percuma ini sesuai keperluannya. Di antara polisi percuma yang paling banyak digunakan adalah dalam bidang pendidikan seramai 44.7 peratus mewakili 534 orang. Ini membuktikan bahawa penduduk amat memerlukan polisi ini kerana amat membantu penduduk mengurangi kos perbelanjaan dalam bidang pendidikan. Pendidikan percuma diperuntukkan bagi pelajar peringkat Sekolah Rendah (SR), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Maksudnya mula mendaftar masuk di SR hingga SMA percuma pendaftaran dan pembayaran yuran sekolah tiap bulan. Ini berlaku mula masuk hingga tamat, kesemuanya ditanggung oleh kerajaan, kecuali pakaian sekolah, kos lain yang diperlukan oleh pelajar ditanggung sendiri. Malahan bas sekolah secara percuma (Foto 7.3) disediakan bagi pelajar SR – SMA sesuai haluan yang dilalui bas sekolah tersebut. Walaupun tidak semua pelajar menggunakan bas sekolah ini kerana haluan bas sekolah sudah ditentukan jalan raya yang harus dilalui. Bagi sekolah yang letaknya tidak dilalui bas sekolah bererti pelajar tersebut tidak menggunakan bas itu.

Tabel 9.1 Kemudahan sosial percuma yang didapat KIR migran dan isi rumah semasa di Kota Makassar

Polisi Percuma	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Total	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
Pendidikan SR – SMP,SMA	135	44.4	138	45.5	124	41.9	137	47.1	534	44.7
Kesihatan	124	40.8	129	42.6	138	46.6	125	43	516	43.2
Kereta mayat	25	8.22	12	3.96	17	5.74	10	3.44	64	5.36
Bas sekolah	20	6.58	24	7.92	17	5.74	19	6.53	80	6.7
Bantuan urusan mahkamah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	304	100	303	100	296	100	291	100	1194	100

Nota : Bil adalah Bilangan

Sumber : Kerja lapangan 2011



Gambar 9.1 Bas sekolah percuma bagi pelajar SR hingga SMA

Dari sudut kesihatan migran keempat-empat etnik banyak yang terbabit menggunakan polisi fasiliti kesihatan ini seramai 43.2 peratus yang mewakili 516 orang. Manakala yang memanfaatkan kesihatan percuma bagi penduduk yang tidak mampu di buktikan warkah rasmi dari pemerintah tempatan. Kesihatan percuma ini terhad hanya pengobatan biasa yang tidak menggunakan operasi besar.

Malahan jika penduduk meninggal disiapkan kereta mayat untuk digunakan menghantar ke tempat terakhir (kuburan), tetapi ini terhad hanya dalam wilayah Kota Makassar, jika melewati sempadan Kota Makassar maka dikenakan bayaran sesuai jarak destinasi. Secara keseluruhan tidak banyak migran yang menggunakan fasiliti kereta mayat iaitu hanya seramai 5.36 peratus mewakili 64 orang. Di antara keempat-empat etnik yang paling banyak menggunakan polisi ini, iaitu etnik Makassar seramai 8.22 peratus, diikuti etnik Toraja seramai 5.74 peratus dan paling sedikit etnik Jawa hanya 3.44 peratus.

Sementara lembaga bantuan hukum tidak ada satupun migran menggunakan bantuan ini kerana migran tiada masalah yang berkaitan dengan perkara mahkamah masa kini. Ini bermakna bahawa kedatangan KIR bersama isi rumah migran ke Kota Makassar matlamatnya adalah untuk peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi mereka dan berupaya menghindari masalah yang berkait rapat dengan perkara di mahkamah.



## Bantuan ekonomi

Berasaskan Tabel 9.2 mendapati bahawa KIR migran seramai 325 orang memanfaatkan polisi ekonomi untuk kelangsungan kehidupan di Kota Makassar. Di antara bantuan ekonomi yang banyak diberikan kepada migran, iaitu Beras Rakyat Miskin (BRM) seramai 54 peratus mewakili 176 orang, diikuti dapur dan gas seramai 21 peratus mewakili 69 orang, selebihnya itu bantuan pelebaran jalan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masing-masing 13 peratus dan 11 peratus. Pola penerima bantuan polisi ekonomi bagi KIR migran hampir sama jumlah antara keempat-empat etnik ini.

Tabel 9.2 Kemudahan ekonomi percuma yang didapat KIR migran dan isi rumah semasa di Kota Makassar

Polisi Percuma	Makassar		Bugis		Toraja		Jawa		Jumlah	
	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%	Bil	%
Dapur dan gas	20	22	18	22	17	20	14	21	69	21
Bantuan langsung tunai	10	11	12	14	8	9	7	10	37	11
Beras rakyat miskin	45	51	43	52	49	58	39	57	176	54
Pelebaran jalan	14	16	10	12	11	13	8	12	43	13
Jumlah	89	100	83	100	85	100	68	100	325	100

Nota : Bil adalah Bilangan

Sumber : Kerja lapangan 2011

Dari segi polisi percuma dapur dan gas hanya sekali dapat kerana polisi pada masa itu harga minyak tanah cukup tinggi perliter (Rp. 15.000 – Rp. 25.000 atau setara RM 5 – RM 7).

Sementara Beras Rakyat Miskin (BRM) hanya sekali dalam sebulan bagi penduduk yang tidak mampu. Selanjutnya polisi percuma Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa wang sebanyak (Rp. 150.000 atau RM 50) perbulan, hanya sekali diterima dalam tempoh 3 bulan atau 4 kali dalam setahun sebanyak (Rp. 1,800.000 atau setara RM. 600).

Sehubungan dengan polisi percuma yang berkaitan pelebaran jalan untuk kelancaran haluan yang dilalui oleh penduduk pejalan kaki sama ada kereta sorong perniagaan, motorsikal mahupun kereta. Pihak PKM telah membuat haluan yang lebar dengan menggunakan cor beton dan paving blok untuk kelancaran haluan terutama pada wilayah kampung.

Keseluruhan rancangan polisi percuma yang telah diprogram oleh pihak PKM untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penduduk, termasuk migran keempat-empat etnik. Walau bagaimanapun tidak semua migran memanfaatkan polisi percuma ini kerana sebahagian migran tidak termasuk dalam syaratan itu. Alasannya kemampuan ekonomi migran dianggap cukup dan tak boleh menerima polisi percuma itu, apatah lagi penduduk Kota Makassar cukup banyak yang memerlukan polisi percuma itu.

### **Cabaran Pkm Dalam Pembangunan Kota Makassar**

Berasaskan kepada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Republik Indonesia tahun 2011, BAB Penutup berbunyi :

*“Berhasil pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila bergantung pada peranan aktif masyarakat serta pada*

*sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonseia”*

Jika disemak dengan saksama kandungan GBHN tersebut, ternyata bahawa kejayaan pembangunan nasional negara Indonesia akan ditentukan oleh peranan aktif masyarakat, ertinya dengan terbabitnya seluruh rakyat Indonesia yang terdiri daripada kumpulan etnik dan beraneka ragam dan corak resam dan budaya yang bersatu padu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonseia secara harmonia yang digelar “Bhenika Tunggal Ika”, namun dalam pembangunan tidak menutup kemungkinan penduduk dan kakitangan kerajaan menghadapi cabaran dalam memajukan pembangunan yang sedang digalakkan di masa kini.

Pembangunan sesebuah kota sangat menentukan perhatian serius kerajaan dalam rangka peningkatan pembangunan kota menuju ke arah peningkatan kesejahteraan penduduk dari pelbagai aspek kehidupan. Kota sebagai enjin pertumbuhan menjadi fokus perbincangan kalangan pengkaji kota, termasuklah aspek demografi, sosioekonomi, sosiobudaya dan pentadbiran (Mohd Yusof Hussain 2013).

Kota Makassar sebagai pusat pentadbiran provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai perkhidmatan asas pendidikan, perniagaan, industri, pelancongan dan pelbagai perkhidmatan fasiliti lainnya. Inilah yang menyokong penduduk pelbagai etnik dari pelbagai daerah di luar kota beramai-ramai mengalir ke kota menyebabkan kota terjadi penumpukan penduduk yang sesat dan padat, menciptakan persekitaran yang kumuh yang dapat menimbulkan jenayah, kesesakan jalan raya dan lain-lain. Kesemuanya ini menjadi tanggungjawab kerajaan dengan

melibatkan masyarakat dan swasta untuk turut menanganinya secara wajar problem yang terjadi di Kota Makassar.

Kehadiran migran di Kota Makassar jelas akan menimbulkan cabaran bagi pihak PKM dalam menjalankan pembangunan yang semakin berkembang dan maju masa kini. Berdasarkan hasil temubual pengkaji dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (Drs. Maruhum Sinaga, MBA) bahawa ada beberapa cabaran yang perlu usaha menangani secara wajar baik bagi pihak kerajaan Kota Makassar.

1. Penduduk Kota Makassar semakin ramai dan padat dari tahun ke tahun. Salah satunya kerana penghijrahan. Walaupun tidak ada larangan, penduduk luar kota untuk tinggal menetap di Kota Makassa. Oleh itu untuk menghalau migran ke kota, Wali Kota Makassar maklumkan agar penduduk luar kota tidak bermalam tanpa identiti. Selain itu penduduk Kota Makassar yang pulang ke kampung diminta tidak membawa keluarga lain selepas kembali ke Kota Makassar terutamanya pada selepas lebaran Idul Fitri/Adha. Manakala jika ada pendatang baru selepas lebaran bermalam lebih daripada tiga hari, maka pihak Pengurus Rukun Tetangga (TR) dan Rukun Wilayah (RW) perlu dimaklumkan kepada Wali Kota. Kesemuanya ini untuk menertibkan pentadbiran kependudukan, menjaga keamanan sosial untuk menghindari timbulnya jenayah.
2. Masalah kesesakan penduduk kota semakin ramai terutamanya di pusat kota. Oleh itu pembangunan di arahkan ke pinggir kota untuk perluasan dan pemerataan pembangunan terutama pada kecamatan yang perlu dimajukan pembangunannya kerana memiliki keluasan yang

lebih berbanding dengan kecamatan lainnya. Seperti Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalate, sehingga akan muncul kota-kota kecil di dalam Kota Makassar;

3. Penduduk Kota Makassar memerlukan pekerjaan tetapi mereka tidak memiliki kemahiran khusus, kurang aset bahkan tidak ada aset tetapi ia mempunyai tenaga dan semangat untuk bekerja. Oleh itu pihak kerajaan Kota Makassar melalui pihak swasta memberi peluang bagi yang tidak ada aset untuk bekerja sebagai tenaga buruh pada kegiatan projek pembangunan perumahan, pertokoan, pembangunan saluran longkang dan lain-lain. (sila rujuk Bab VI foto 6.7). Selain itu, bagi migran dan penduduk yang memiliki aset, diberikan peluang menjalankan perniagaan di beberapa tempat seperti di halaman masjid, di tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat pelancongan atau dipinggir pasar tradisional dan lainnya (sila rujuk Bab VI foto 6.1 hingga foto 6.5);
4. Munculnya kawasan kumbahan di pelbagai tempat dalam kota yang semakin ramai sehingga kota nampak kurang indah, dan kotor, berimpak juga terhadap pembuangan sampah dimana-mana, walaupun sudah ada letak sampah di sediakan oleh pihak kerajaan, namun kesedaran penduduk masing kurang akan pentingnya pemeliharaan persekitaran. Oleh itu, pihak kerajaan akan memberi peranan aktif kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) dan pengurus Rukun Wilayah (RW) sebagai wakil kerajaan untuk menangani isu-isu yang ada wilayahnya masing-masing dibawah koordinasi Camat dan Lurah. Sebagai sokongan kepada pengurus RT dan RW akan ditingkatkan gajinya daripada Rp. 250.000

kepada Rp. 1 juta rupiah (RM 333.00) setiap bulan bermula tahun 2016;

5. Isu banjir merupakan isu lama yang perlu segera ditangani kerana hampir setiap tahun terjadi banjir di beberapa titik di Kota Makassar sehingga beberapa jalan raya utama digenangi air pada musim hujan bahkan ada wilayah seperti kecamatan Manggala digenangi air sehingga ketinggian mencapai 2 meter diatas permukaan laut. Hal ini terjadi kerana pesatnya pembangunan yang semakin maju sehingga tempat penyimpanan air sudah berkurang. Selain itu saluran longkang tidak berfungsi dengan baik kerana rosak dan penuh dengan sampah akibat perbuatan manusia yang kurang faham atau kurang prihatin tentang pentingnya menjaga kebersihan persekitaran. Oleh itu pihak kerajaan melalui Dinas Tata Kota & Pembangunan, Camat dan Lurah melaksanakan pengawasan projek pembangunan yang dijalankan untuk memastikan bahawa projek pembangunan itu dilaksanakan sesuai yang sebenarnya.
  
6. Oleh itu, pihak kerajaan telah menyusun program MTR (Makassar Tidak Rantasa) ertinya “Makassar Tidak Kotor”. Untuk menyokong program ini dengan menggunakan istilah LISA ( Lihat Sampah Ambil), LIMPO (Lihat Macet Photo), LILUNG (Lihat Lurah(bermasalah) Langsung Ganti). Selain itu program berikutnya melibatkan semua pelajar yang ada di wilayah Kota Makassar dimaklumkan bahawa setiap tarikh 9 hari bulan berjalan, pukul 09 hingga 09.30 menjalankan gotong royong LISA (Lihat Sampah Ambil) di persekitaran sekolah masing-masing. Kegiatan ini diberi nama “AKU DAN SEKOLAHKU TIDAK RANTASA”. Selanjutnya program ini berkembang kepada “AKU DAN RESTORAKU TIDAK

RANTASA”, AKU DAN RUMAHKU TIDAK RANTASA”. Program berikutnya setiap hari jumaat kakitangan kerajaan sebelum masuk pejabat terlebih dahulu kerjabakti lebih awal selama 1 hingga 2 jam pada tempat yang telah ditentukan. Bagi kakitangan yang bekerja di bidang kebersihan menjalankan kebersihan pada saluran longkang ukuran besar didalam pusat kota dan di sokong oleh kakitangan Camat dan Lurah di wilayah masing-masing.

7. Demikian pula halnya dengan kesesakan jalan raya hampir tiap hari terjadi kerana banyaknya kenderaan yang bergerak setiap hari. Tahun 2010 sebanyak 824 unit meningkat kepada 2.4 juta unit setiap hari. Pertumbuhan motorsikal setiap tahun sebanyak 13 hingga 14 peratus, kereta sebanyak 10 peratus pertahun, belum termasuk bentor (motorsikal beca) dan beca. Manakala pertumbuhan jalan hanya 0.01 peratus pertahun (Surak Akbar Tribun Timur 2013). Ini bererti ketidakseimbangan yang sangat ketara antara pertumbuhan kenderaan dengan pertumbuhan jalan raya, sehingga tidaklah hairan jika Kota Makassar terjadi kesesakan. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengambil polisi dengan jalan bagi kereta lori yang menggunakan tayar 10 lewat hanya boleh bergerak di dalam kota pada malam hari, bagi bentor (motorsikal beca) dan beca hanya boleh bergerak pada wilayah had yang sudah ditentukan. Kesemuanya ini dijalankan untuk kemudahan dan kelancaran haluan lalu lintas kenderaan agar tidak terjadi kesesakan di jalan raya.
8. Isu-isu tersebut perlu ditangani secara serius, berterusan dan komprehensif. Oleh itu, pihak kerajaan Kota Makassar melibatkan pelbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang amat berkaitan dengan isu tersebut untuk segera berkoordinasi menentukan langkah-langkah polisi

menangani keadaan tersebut. Diantaranya dijalankan secara tepat autonomi daerah tentang kewangan misalnya menyokong untuk meningkatkan pajak pendapatan daerah, perlakuan secara tepat dan tegas akta pentadbiran kependudukan, penyediaan prasaranan dan sarana perkhidmatan umum yang cukup, penyediaan dan perluasan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, menciptakan persekitaran yang selesa dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang selamat, damai dan tenang.

Pentingnya penerapan autonomi daerah secara baik oleh pihak kerajaan tempatan kerana akta autonomi daerah memberi peluang kerajaan peringkat daerah untuk meningkatkan usaha memberikan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat, serta peningkatan daya saing pemerataan dan keadilan. Dalam hal ini jelaslah bahawa kerajaan di peringkat daerah mempunyai sempadan wilayah yang berkuasa mengatur dan mengurus urusan kerajaan dan kepentingan masyarakat tempatan dan migran yang lebih baik, sehingga amat penting peranan aplikasi pentadbiran kependudukan yang tersusun, dikemas dan teratur dengan baik, dan ini merupakan modal asas dalam perancangan dan polisi yang telah dibuat oleh pihak kerajaan Kota Makassar.

Perancangan dan polisi yang dijalankan oleh pihak PKM memberikan ruang, peluang dan kemudahan bagi penduduk termasuk migran amat membantu dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka terutama yang berkaitan sosial dan ekonomi.



Pencapaian transformasi sosial dan ekonomi migran di Kota Makassar telah berjaya, tetapi bagi pihak PKM merupakan cabaran dalam menangani peningkatan dan perluasan pembangunan daripada pelbagai aspek kehidupan yang digalakkan masa kini untuk kesejahteraan penduduk Kota Makassar pada masa hadapan.

# BAB X

## DAMPAK TRANSFORMASI SOSIAL PADA MASA DEPAN

Sejak awal Kota Makassar telah menjadi tumpuan penduduk kerana salah satu faktornya adalah penghijrahan. Penghijrahan bagi penduduk Sulawesi Selatan merupakan sebahagian daripada budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi sejak beberapa abad lalu terutamanya dalam kalangan etnik Makassar, Bugis dan etnik yang lainnya.

Kota mampu menjamin pelbagai peluang sosial dan ekonomi yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih baik dan selesa, sebaliknya menyedari bahawa luar kota tidak dapat menjamin keadaan mereka seperti di kota.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sosial dan ekonomi migran dari kalangan etnik Makassar, Bugis, Toraja dan Jawa yang berhijrah ke Kota Makassar; dan mengkaji rancangan polisi serta cabaran Pemerintah Kota Makassar (PKM). Kaedah kajian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 600 orang responden dipilih secara purposif dari 32 kelurahan. Sampel setiap etnik masing-masing 150 orang. Data primer dan sekunder kajian diolah dengan menggunakan Mikrosop Excel dan

MapInfo 8. Analisis data menggunakan statistik deskriptif yang dipersembahkan dalam bentuk taburan kekerapan, tabel silang dan gambar. Selain itu digunakan analisis kualitatif dari pemerhatian dan temubual dalam membincangkan kajian dengan pihak kakitangan kerajaan yang berkaitan dengan polisi dan cabaran PKM dan kes kepada 4 (empat) migran yang berjaya di Kota Makassar.

Bab ini membincangkan tentang rumusan hasil kajian, implikasi dan sumbangan kajian dan cadangan kajian masa hadapan dan penutup.

Penghijrahan merupakan isu yang tiada hentinya dibincangkan dari dulu hingga masa kini kerana penghijrahan mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dalam memberikan sumbangan terhadap pemkotaan, perubahan kependudukan, sosial dan ekonomi di destinasi.

Perbezaan antara kehidupan desa dan kota tercermin dalam taraf pembangunan sehingga mendorong aliran penghijrahan ke wilayah yang lebih maju dan berkembang. Penghijrahan sebagai strategi untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang lebih baik, walaupun dapat juga menyebabkan pelbagai masalah kompleks yang berkaitan dengan demografi, sosial, ekonomi, politik dan persekitaran.

Dari segi ciri migran, kajian mendapati bahawa umur KIR migran mula daripada 20 tahun hingga lebih 65 tahun. Jika umur itu dibahagikan menjadi kumpulan umur sela 5 tahun didapati bahawa kumpulan umur 20 - 49 tahun paling banyak, manakala kumpulan umur lebih 50 tahun kurang sedikit. Pola ini turut berlaku untuk migran keempat-empat etnik hanya saiz yang

berbeza. Kumpulan umur KIR migran termasuklah umur produktif. Selain itu KIR migran lelaki lebih ramai berbanding dengan perempuan. Ini menunjukkan bahawa lelaki lebih ramai melakukan penghijrahan berbanding dengan perempuan. Selanjutnya status perkahwinan didapati bahawa secara keseluruhan keempat-empat KIR migran majoriti berkahwin, diikuti belum berkahwin, selebihnya balu (janda) dan duda. Hasil perkahwinan KIR migran dan isi rumah telah melahirkan anak seramai 1007 orang semasa tinggal di Kota Makassar. Jumlah KIR migran dan isi rumah memberikan sumbangan kepada 0.20 peratus daripada jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2011.

Berasaskan tahun kedatangan migran di Kota Makassar menunjukkan bahawa secara umumnya penghijrahan terjadi pada beberapa tempoh, iaitu tempoh 1950-an; tempoh 1960-an; tempoh 1970-an; tempoh 1980-an; tempoh 1990-an; dan tempoh 2000-an. Daripada beberapa tempoh tersebut membuktikan bahawa KIR migran mula ramai pada tempoh 1980-an dan semakin ramai pada tempoh 2000-an. Ini bererti daya tarikan Kota Makassar semakin maju dan di jangka migran akan semakin berterusan pada masa hadapan. Selain daripada itu, pola kedatangan KIR migran ke Kota Makassar majoriti bersama dengan isteri; KIR migran seorang diri, dan bersama-sama isteri dan anak. Tambahan pula bahawa KIR migran mulanya mendapatkan maklumat tentang Kota Makassar melalui keluarga/kawan, melalui surat akbar, televisyen dan datang sendiri ke Kota Makassar. Kedatangan KIR migran di Kota Makassar mulanya tinggal dengan menumpang kepada keluarga atau kawan, sebahagian besar menyewa rumah, dan selebihnya tinggal di kolej kerajaan.

Kajian ini juga menghuraikan aliran migran dari kabupaten/kota asal migran. paling ramai terutamanya etnik Makassar dari Kabupaten Jeneponto, etnik Bugis dari Kabupaten Bone, etnik Toraja dari Kabupaten Tanah Toraja dan etnik Jawa dari Provinsi Jawa Timur. KIR migran di Kota Makassar bertaburan ke tujuh kecamatan. terutamanya di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini dan selebihnya di kecamatan lainnya.

Selain dari itu, hasil kajian ini menunjukkan bahawa penghijrahan terjadi di Kota Makassar kerana dua faktor utama, iaitu faktor tolakan sama ada faktor tarikan sosial dan ekonomi di daerah asal mahupun di destinasi. Faktor itu terutamanya pekerjaan, pendapatan, sokongan keluarga/kawan. pendidikan, gangguan keamanan, pindah tugas dan lainya. Sementara itu tekanan dari daerah asal turut memberi sumbangan kepada migran untuk berhijrah seperti Kabupaten Jeneponto kerana keadaan alamnya yang kering, Kabupaten Bone karena penduduk, dan Kabupaten Tanah Toraja karena salah satu adanya upacara resam yang memerlukan wang untuk membeli hewan kerbau dan babi bagi keluarga yang akan melaksanakan upacara itu. Ini merupakan salah satu tekanan di daerah asal bagi migran untuk berhijrah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di destinasi.

Hasil kajian menunjukkan bahawa transformasi sosial di Kota Makassar mengalami perubahan seperti penduduk yang bertambah banyak, peningkatan tingkat pendidikan dan interaksi sosial yang semakin rapat antara migran dengan sesama migran, sesama pekerja dan penduduk tempatan.

Sebaliknya Transformasi sosialmigran mengalami pula perubahan pola jenis pekerjaan, peningkatan pendapatan, diikuti

peningkatan perbelanjaan dan juga pemilikan harta. Kesemuanya ini merupakan harapan yang di cita-cita para migran dalam melaksanakan penghijrahan ke kota untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya yang ada di kota mahupun di daerah asal dalam bentuk pengiriman wang atau barangan yang diperlukan keluarga di daerah asal.

Dengan ramainya migran di Kota Makassar merupakan cabaran bagi pihak PKM untuk menyusun rancangan polisi dalam pembangunan berdaya huni dan lestari

di wilayah kecamatan yang luasannya lebih, haruslah di pergiatkan lagi penubuhannya dengan kemudahan fasiliti perkhidmatan yang menyokong peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan tersebut. Pelbagai program polisi percuma yang dijalankan pihak PKM, termasuklah pembuatan warkah kelahiran, kad tanda penduduk, pendaftaran dan yuran pendidikan peringkat SD – SMP, Bas sekolah, pengubatan tidak sihat, penyediaan kereta mayat, pemberian dapur gas, pemberian beras miskin, pemberian bantuan tunai (BT), dan perluasan jalan raya untuk kelancaran haluan kenderaan.

Sehubungan dengan penghijrahan banyak para sarjana membincangkan teori penghijrahan termasuklah diantaranya, Ravenstein tentang undang-undang penghijrahan, Zelinsky menghuraikan lima tahap transisi mobiliti, Lee membincangkan faktor, rintangan dan individu untuk pengambilan keputusan berhijrah. Manakala Ida Bagus Mantra dengan teori penghijrahan keperluan dan tekanan yang menyebabkan orang melakukan penghijrahan. Max Weber tentang interaksi dan penyesuaian diri seseorang untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Selain itu ada juga sarjana lain yang membincangkan penghijrahan daripada pelbagai sudut keperluan yang diharapkan.

Hasil kajian menunjukkan bahawa teori sedia ada masih sangat relevan untuk digunakan dalam membincangkan penghijrahan dan transformasi sosial ekonomi, malahan teori sedia ada itu perlu mengukuhkan. Namun tidak secara keseluruhan dapat digunakan kerana keadaan masa kini sudah maju baik dari sudut pembangunan perkotaan, sarana dan prasarana infrastruktur mahupun kemajuan dan berkembang penduduk dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.

Kajian yang dilakukan tentang transformasi sosial dan ekonomi migran di Kota Makassar menunjukkan bahawa faktor tolakan mahupun faktor tarikan di daerah asal dan destinasi yang sangat berperanan adalah faktor ekonomi, faktor keluarga atau kawan diikuti faktor pendidikan. Faktor Pendidikan ini berubah posisi daripada sebelumnya berada di urutan kedua selepas faktor ekonomi tetapi posisi itu ditempati urutan kedua adalah faktor keluarga kerana faktor keluarga selalu memberikan maklumat tentang keberhasilan migran yang dicapai di destinasi sehingga memberikan semangat dan dorongan kepada keluarga di daerah asal untuk berhijrah. Konsep perubahan penghijrahan ini dari sudut pendidikan kerana pihak kerajaan daerah asal telah berusaha meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan untuk memenuhi segala keperluan bagi penduduknya dalam bidang pendidikan sebagai salah langkah menghalau penduduk untuk berhijrah.

Kajian ini yang sangat menarik adalah perhubungan antara migran dengan migran, sesama pekerja dan penduduk tempat yang berbeza asal daerah, etnik, dan agama. Namun perbezaan itu tidak menjadi penghalau untuk meningkatkan dan

merapatkan intensiti perhubungan yang harmonia dan mesra yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, organisasi kemasyarakatan, dan persekitaran seperti terbentuknya kerukunan (NGO), kutu-kutu, majlis perkahwinan, majlis kematian, majlis taklim, gotong royong dan lainnya malahan terjadi asimilasi antara migran dan penduduk tempatan. Ini bererti penduduk melakukan penghijrahan bukan hanya mencari peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan pendidikan tetapi juga untuk memperluas persaudaraan dan intensiti perhubungan yang semakin baik di destinasi. Ini namanya mobiliti sosial dalam perhubungan.

Pembangunan antara desa dan kota masih ketara ketidakseimbangan, mengakibatkan terjadi penghijrahan dari daerah kurang menawarkan faedah dari segi keperluannya ke daerah yang menawarkan faedah yang lebih baik.

Pemkotaan dengan tindakan perancangan pembangunan berkesan dan strategi dariapada pelbagai aspek kehidupan masyarakat untuk menikmati dayahuni kota nyaman, selesa dan selamat. Ini merupakan isu yang dapat menyokong penduduk semakin ramai dan sesak ke kota, walaupun dapat memberi kesan yang kurang menguntungkan bagi penduduk yang tidak dapat menyesuaikan kehidupan kota yang semakin kompleks.

Oleh yang demikian pembangunan suatu daerah yang maju dan berkembang akan mendorong penghijrahan ke arah daerah tersebut dengan kesan bahawa daerah itu akan memberi ruang dan peluang dalam kehidupan baharu yang menjanjikan peningkatan kualiti hidup yang lebih baik. Pembangunan dapat dilihat sebagai suatu proses transformasi mencapai kehidupan



yang lebih berkesan dari segi sosial dan ekonomi untuk memenuhi hidup yang lebih selesa daripada sebelumnya. Ini membuktikan kajian bahawa 87 peratus migran memperoleh kehidupan yang lebih selesa bermastautin di Kota Makassar. Malahan kehidupan migran yang tidak selesa masih berkeinginan bermastautin kekal (75 peratus) di Kota Makassar.

Kajian ini menunjukkan bahawa transformasi sosial dan ekonomi migran di Kota Makassar memberi kesan sama ada positif mahupun negatif. Kesan tersebut semakin meningkatkan penduduk untuk menjalankan penghijrahan ke kawasan destinasi. Apatah lagi ruang, peluang dan kemudahan yang disediakan oleh pihak PKM memberikan peluang kepada para migran berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini membuktikan migran selesa tetap bermastautin di Kota Makassar.

Sementara itu penghijrahan secara berantai yang diatur oleh keluarga dan kawan di destinasi, semakin meningkat. Ini merupakan faktor tarikan kedua sesudah faktor ekonomi yang menyebabkan penghijrahan ke Kota Makassar. Dari segi lain isu pembangunan kota bagi penghijrah memberi tekanan bagi kawasan destinasi dari segi keperluan akan berlaku seperti keperluan asas, perumahan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, bekalan air, elektrik, kawasan hijau, fasiliti lain dan keamanan yang harmonia dan damai bagi migran penduduk kota.

Oleh yang demikian pihak berkuasa PKM perlu merancang polisi untuk mengurangkan tekanan daripada pelbagai segi, agar migran merasakan selamat, damai dan kota juga sejahtera dengan penguatkuasaan akta auotonomi daerah dan akta pentadbiran

kependudukan, pembangunan persekitaran yang berwawasan bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk termasuk migran.

Secara umumnya, keberadaan migran di Kota Makassar, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, juga mendorong pemkotaan dimajukan dan dikembangkan dengan menyediakan pelbagai prasarana dan sarana pembangunan untuk memenuhi keperluan asas bagi migran. Pada akhirnya kota itu akan maju dan berkembang secara berterusan dan terkawal.

Rasional kajian ini adalah terletak kepada kepentingan penghijrahan bagi memahami kehadiran masyarakat etnik di Kota Makassar. Kehadiran migran ini dengan ciri-ciri yang berbeza dari sudut daerah dan etnik. Demikian pula jumlah migran yang ramai ke Kota Makassar memberikan impak yang besar ke atas corak pemkotaan dan pola ruang sosial dan ekonomi di kota tersebut. Maklumat tentang penghijrahan mereka cukup berguna kepada para penggubal polisi pembangunan, khususnya di pihak Pemerintah Kota Makassar (PKM). Terutamanya yang melibatkan petempatan dan perumahan mereka serta usaha memajukan mereka sama ada yang berada di kawasan asal ataupun yang telah berada di kawasan destinasi, iaitu Kota Makassar.

Hasil penyelidikan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu terutama yang berkaitan dengan penghijrahan; sebagai rujukan bagi para ilmuwan atau penyelidik yang menaruh perhatian untuk mendalami atau mengembangkan lagi tentang penghijrahan dan kaitannya dengan sosial ekonomi, budaya dan persekitaran. Sebagai sumbangan fikiran kepada pihak berkuasa, perancang

pembangunan dan agensi berkaitan khususnya bagi menangani masalah kependudukan dan kawasan kediaman akibat penghijrahan di Kota Makassar.

Dalam kajian ini terasa belum lengkap dan penyelidikan yang lebih terperinci perlu diteruskan. Mengkaji penghijrahan merupakan satu isu yang sangat penting dan luasan bidang pengkajiannya sangat menarik dan perlu diberi perhatian kerana penghijrahan dapat berimpak terhadap penumbuhan pembangunan sosial, ekonomi dan politik suatu kawasan dan juga terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Malahan penghijrahan tanpa terkawal merupakan bencana bagi kerajaan yang dituju sebagai destinasi. Disamping itu data penghijrahan melalui data sekunder sukar diperolehi untuk dijadikan asas dalam pengambilan rancangan polisi yang tepat dan baik dalam pembangunan. Oleh demikian, dicadangkan agar kajian yang akan datang menumpukan perhatian kepada beberapa perkara berikut:

1. Data sekunder penghijrahan sangat penting, namun datanya kurang tersusun kerana sebahagian migran tidak mendaftarkan diri atas ketibaan di destinasi. Selain itu autonomi daerah dan pentadbiran kependudukan secara maksimal belum terlaksana dengan baik. Oleh kerana itu secara khusus dicadangkan mengkaji aplikasi Akta Autonomi Daerah dan Pentadbiran Kependudukan di beberapa daerah dalam wilayah kawasan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia secara keseluruhan
2. Pengehijrahan penduduk ke Kota Makassar dari pelbagai daerah dan etnik dalam kawasan Provinsi Sulawesi Selatan mahupun di luar kawasan Provinsi Sulawesi Selatan,

dijangka akan berterusan dan menjadikan kota semakin sesak oleh migran. Di lain pihak luasan Kota Makassar tidak bertambah. Oleh kerana itu dicadangkan dikaji khusus perlunya Akta Penghijrahan di Kota Makassar bagi mengawal proses penghijrahan ke kota yang lestari.

Secara keseluruhan transformasi sosial dan ekonomi keempat-empat etnik di Kota Makassar telah terjadi perubahan dari segi demografi, sosial dan ekonomi ke arah yang lebih baik. Walaupun memberi impak positif dan negatif, namun rancangan dan polisi pembangunan dijalankan secara berterusan oleh pihak PKM untuk kepentingan kesejahteraan penduduk kota. Fenomena inilah yang berlaku begitu pantas telah membawa proses penghijrahan ke Kota Makassar.

Di jangka proses migrasi ke Kota Makassar akan berterusan selama perbezaan yang sangat ketara antara Kota Makassar dengan daerah lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mahupun di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh kerana itu pihak kerajaan pada setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya, perlulah menguatkuasa autonomi daerah untuk memajukan dan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) mahupun sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing setiap kabupaten/kota dalam rangka menggalakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini merupakan salah satu strategi polisi untuk mengurangkan migrasi keluar. Disamping itu dijalankan pentadbiran kependudukan secara serius dan berterusan ditingkatkan agar taburan penduduk liar tidak terjadi di mana-mana. Hal ini mungkin mengganggu validiti dan ketepatan data kependudukan, sehingga sukar mengambil polisi yang tepat dan

baik untuk kepentingan pembangunan berwawasan lingkungan dan kesejahteraan penduduk yang lebih baik pada masa hadapan.

Kajian ini menunjukkan bahawa kehadiran migran berimpak positif dan negatif bagi di destinasi, namun impak positif masih sangat ketara kerana migran dapat menunjukkan peningkatan taraf kesejahteraan mereka. Selain itu, bagi pihak PKM tersedia tenaga kerja sebagai aset pembangunan, dapat meningkatkan pelbagai fasiliti yang diperlukan penduduk termasuk migran, terdapat pelbagai macam budaya dan asimilasi dapat terjadi antara etnik yang bermastautin di Kota Makassar.

Penghijrahan ke kota tidak boleh dihentikan bagi wilayah atau negara termasuk di Kota Makassar selama perbezaan yang sangat ketara antara kota dan desa. Oleh itu proses penghijrahan perlu di jadikan strategi pembangunan kota, wilayah atau negara. Proses transformasi sosial dan ekonomi dari pelbagai latar belakang berjalan dengan lancar tanpa banyak halangan atau cabaran.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 1996. *Faktor-Faktor Penentu Status Migrasi Penduduk Provinsi Lampung*. Jakarta, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2
- Abdul Haris, Nyoman Adika. 2002. *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional dari Perbudakan ke Perdagangan manusia*. Yogyakarta : Penerbit LESFI. 2
- Abdul Haris, 2005. *Gelombang Migrasi & Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. 2
- Abdul Samad Hadi. 1989. *Mobilitasi Penduduk*. Bangi : Penerbit UKM
- Abdul Samad Hadi, 2000. *Regional Labor Circulation:Indonesia Workers In Malaysia*. *Jurnal Populasi*, 11(2),2000.ISSN:0853-0262. Yogyakarta : Pusat Penyelidikan Kependudukan UGM.
- Abdul Samad Hadi, Abdul Hadi.HS, Ahmad.FM & Shahrudin I. 2006. *Mencari Kelestarian Bandar Kecil*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. <http://www.penerbit.ukm.my>
- Adewale, Gbeniga. J. 2005. *Socio-Economic Factors Associated with Urban-Rural Migration in Nigeria: A case Study of Oyo State,Nigeria*. Departement of Agricultural Economics and Extension, Faculty of Agricultural

Sciences. Negeria : Ladoké Akintola University of Tehnology, Ogrbomoso.

Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.

Aishah@Eshah Haji Mohamed. 2013. Perubahan Sosial, Kesehatan dan Kualiti Hidup di Wilayah Metropolitan Lembah Klang-Langat. *Akademika. Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Asia Tenggara, Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities*, Bilangan Number 83(1), ISSN 0126-5008, Jan.-Apr. 2013. Universiti Kebangsaan Malaysia. hal. 12.

Ambo Upe. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi, Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: Penerbit PT.RajaGrafindo Persada.

Aries Musnandar. 2012. Mengerem Laju Urbanisasi. UIN Maliki Malang.

Arif, Nasution, M. 1999. *Globalisasi & Migrasi Antar Negara*. Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI kerjasama The Ford Foundation. Bandung : Penerbit Alumni Bandung.

Aris, Ananta. 1993. *Ciri-Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Azahan Awang. 2009. Kualiti Hidup Komuniti Bandar. Dalam Yahaya Ibrahim (Pnyt). *Komuniti Pembangunan & Transformasi*. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Badan Pusat Statistik, 1990. *Penduduk Sulawesi Selatan*. Hasil Sensus Penduduk 1990 Seri: S2.23. Jakarta: BPS Indonesia.

- ....., 1994. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 1987 - 1992*. Jakarta: BPS Indonesia.
- ....., 1995. *Profil Migran Masuk di Enam Kota Besar*. Hasil Survei Urbanisasi. Jakarta : Seri :S5. BPS Indonesia.
- ....., 2000. *Penduduk Sulawesi Selatan*. Hasil Sensus Penduduk 2000 Seri: L2.2.25. Jakarta: BPS Indonesia.
- ....., 2005. *Estimasi Parameter Demografi, Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi*. Jakarta : BPS Indonesia. 1
- ....., 2008. *Makassar Dalam Angka*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama Badan Pusat Statistik Bandar Makassar. Makassar : BPS Bandar Makassar.
- ....., 2009. *Sulawesi Selatan Dalam Angka*. Makassar : BPS Sulawesi Selatan.
- ....., 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- ....., 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama Badan Pusat Statistik Bandar Makassar. Makassar : BPS Bandar Makassar.
- Bagong Suyanto, Karnaji. 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial : Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin*. Surabaya : Penerbit Airlangga University Press.



- Bambang Sumarno, Leinbach Thomas R. 1986. Migrasi Penduduk Desa Ke Kota dan Kesempatan Kerja, Survei di Tiga Kota Sumatera Utara. *Majalah Demografi Indonesia* No. 25 tahun ke XIII Juni 1986. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Beny Darmawan. 2007. *Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi terhadap Pola Migrasi Antar Provinsi di Indonesia*. Jakarta. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Djadja Saefullah. 1999. Migrasi dan Perubahan Sosial Budaya. *Dalam Jurnal Kependudukan*, Vol.1,No.1, Januari 1999, ISSN:1411-5034. Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian - Universitas Padjadjaran.
- Budi Rajab, 1991. *Gerak Penduduk Sementara di Sulawesi Selatan*. Prisma, Nomor 4, April. Jakarta : LP3ES.
- Bruner, Edward,M. 1972. Batac Ethnic Associations in Three Indonesia Cities. *Southwestern Journal of Antropology*, Volume 28, No.3 Autumn. Albuquerque : The University of new Mexico.
- Bogue, Donald, 1969. *Principles of Demography*. New York. John Wiley and Sons.Inc
- Chotif. 1997. Dinamika Mobilitas Penduduk dan Urbanisasi di Indonesia : Kajian Data SP 1980, 1990 dan Supas 1995, Penyunting (Moh. Arsyad Anwar) dalam *Widjoyo Nitiasastro 70 Tahun*. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Chotif. 1999. Migrasi : Salah Satu Faktor Penentu Dinamika Kependudukan. *Warta Demografi*, Tahun ke-29, No.3, ISSN 0125-9679.Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Chotif. 2008. Urbanisasi dan Migrasi di Kota Depok Jawa Barat. *Warta Demografi*, Tahun ke-38, No.1, ISSN 0125-9679. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Chia Lin Sien. 2003. Southeast Asia Transformed A Geography of Change. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Christian Pelras. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta : Forum Jakarta – Paris, Ecole francaise d’Extreme-Orient.
- Clarke, J.I. 19.... *Population Geography*. Oxford : Pergamon Press.
- David K, A, Manners. 2002. *Teori Budaya* (diterjemahkan oleh Landung Simatupang). Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- De Goede, William. 1963. *World Reveluation and Family Patern*. New York : The Free Pres.
- Deni Mukbar. 2009. Kebijakan Terkait Migrasi dan Pola Migrasi. *Dalam Transnational Migration and Agrarian Change in Indonesia and the Philppines* yang dilakukan Yayasan Akatika Bandung dan Depatemen of Geography University of the Philippines.
- Elsie Seckyee Ho.2004. Mental Health of Asian Immigration New Zealand : A Review of Key Issues dalam *Asian and Pacific Migration Journal (APMJ)*. Scalabrini Migration Center. Philppines, Volume 13 Nopember, ISSN 0117-1968.
- Faturochman, Bambang W, Setiadi, Syahbudin L. 2004. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Effendi, 1992. *Perilaku Mobilitasi dan Struktur Ekonomi Rumah Tangga : Kasus Dua Desa (Desa Simpangsari dan Desa*

*Luwikidang) di Jawa Barat*. Yogyakarta. Tesis, Universiti Gadjah Mada.

- Farid, Andi Zainal Abidin, 1980. *Sekelumit Kisah Daeng Ruru dan Daerng Tulolo di Perancis pada adab ke XVII: Perantau-perantau Makassar di Eropa, Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*. Vol.1 No.1
- Fazli Abd.Hamid dan Ramli Dollah. 2006. Perbandaran, Pengganguran dan Jenayah: Tinjauan Awal di Kota Kinabalu. Dalam Norhaslina Hassan (Pynt). *Dinamika Masyarakat Bandar Malaysia*. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.
- Fitri Rahmdhani Harahap. 2013. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. Dalam Jurnal Society, Vol.1, No.1, Juni 2013
- Felix A. Julimar, et al. 1986. *Migrasi Permanen Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Data Sensus Penduduk Indonesia 1971 dan 1980*. Jakarta : Lembaga Demografi Fakulti Ekonomi Universiti Indonesia kerjasama Kantor Menteri Negara KLH, Jakarta.
- Fontana, A. 1994. Interaksi Variabel Demografi dan Variabel Ekonomi. *Warta Demografi* No.2 tahun 1994. Jakarta : Lembaga Demografi Fakulti Ekonomi Univgersiti Indonesia.
- Forbes, Dean. 1981. *The Peddlars of Ujungpandang*. Makalah No.17 Monash: Centre of southeast Asian Studies, Monash University, Melbourne
- Goldstein,G. 1990. *Urbanization, Health and Well-Being: A Global Perspective*, The Statistician, Vol.39,No.2, Special Issue:Health og Inner Cities and Urban Areas.<http://links.jstor.org/sic?sici=0039o52peratus281>

990peratus2939peratus3A2peratusC121peratus3AUHA  
WAGperatus3E2.0.COperatus3B2-5.

Goldscheider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi, Struktur Sosial* (Diterjemahkan Nin bakdi Sumanto). Jakarta : Rajawali Press.

Han Redmana. R., 1977. Perpindahan Penduduk di Indonesia. *Majalah Demografi Indonesia* No.7 tahun ke IV Juni 1977. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Haning Romdiati. 1986. *Proses Migrasi Penduduk Di Sulawesi Selatan*. Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Hasil Penyelidikan Migrasi Penduduk di Provinsi Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan, LEKNAS LIPI, 4 - 6 Maret 1986. Jakarta.

Hasibuan, S. 1996. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta : LP3ES.

Haviland, William, A. 2010. *Antropologi* Jilid 2. Jakarta : Erlangga.

Hugo, Graeme J. 1981. *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Hugo, Graeme J. 2011. Migration and Development in Malaysia : An emigration perspective dalam *Asian Population Studies*, Volume 7, Number 3, Nopember 2011, ISSN 1744-1730 . Taylor & Prancis. National University of Singapore.

Jalilah Md Shah dan Ubong Imang. 2006. Imigran dan Pola Ekonomi Bandar: Kajian Kes di Bandar Raya Kota Kinabalu. Dalam Norhaslina Hassan (Pynt). *Dinamika Masyarakat Bandar Malaysia*. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.

- Jonathan Rigg. 2003. Evolving Rural urban Relations and Livelihoods. Edited By. Chia Lin Sien dalam *Southeast Asia Transformed A Geography of Change*. Singapura : Institute Southeast Asian Studies.
- Ida Bagus Mantra. 2000. Kebijakan Redistribusi Penduduk di Indonesia Dari Waktu ke Waktu. *Warta Demografi; Kebijakan Pendudukan Kini dan Masa Depan*, Tahun ke 30 No.1, ISSN 0125-9679. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ima Kusuma.,A. 2004. *Migrasi & Orang Bugis* : Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilakka Pada Abad XVIII Di Johor. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Katiman Rostam, Mokhtar Jaafar, & Noorazuan Md.Hashim. 2008. *Dinamika Sosial, Pembangunan dan Persekitaran di Malaysia*. Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Perserikatan, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Kartomo Wirosohardjo. 1979. Pola Penyebaran Penduduk dan Migrasi. *Majalah Demografi Indonesia No.12*. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Katimin Nirboyo, 1984. Analisis Migrasi Pulau Sulawesi Selatan Berdasarkan Data Sensus Penduduk 1971 dan 1980. *Dalam BPS Analisis Migrasi Indonesia*. Jakarta : Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Kerajaan Bandar Makassar. 2009. *Rencana Strategis Dinas Sosial Bandar Makassar Tahun 2009-2014*. Makassar : Kerajaan Bandar Makassar.

- Kuang, Chi Chang, Ming Wen and Guixin Wang. 2011. Social Capital and Work Among Rural to Urban Migrants in Cina. *Jurnal Asian Population Studies. Volume 7, Number 3 (November 2011)*.
- LPPKN. 2011. Laporan Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia, 2011. Kuala Lumpur, Malaysia. *Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)*, Malaysia.
- LPPKN. 2013. New Trends In Migration : Demographic Aspects. *Dalam Pinfo O Pmalaysia*, Issue No.1, Januari-June 2013, ISSN 1511-774X, Malaysia : National Population And Family Development Board, Malaysia, Ministry of Women, Family and Community Development, Malaysia.
- Lee, Yok Fee. 1999. *Satu Kajian Kes Terhadap Peranan jaringan Sosial Di Kalangan Pendatang Indonesia di Kampung Lembah Jaya Selatan, Ampa Selangor*. Bangi :Tesis (Ph.D) Fakultas Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan UKM, Malaysia.
- Leo, Chavez. 1988. *Settlers and Sojour Ners : The Case Of Mexicons in The United States*. Human Organization.
- Lucas, David, dkk. 1995. *Pengantar Kependudukan*. (diterjemahkan Nin Bakdi Sumanto & Riningsih Saladi). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Luh Kitty Katherina. 2014. Dinamika Urbanisasi Pada Kota Kedua di Indonesia Periode tahun 1990 – 2010. Dalam *Journal of Urban Society's Arts*. Vol.14, No. 2 Oktober 2014, Hal 149-161.
- Maddatuang. 1999. *Perantau Jawa di Sulawesi Selatan: Kajian Tenaga Kerja Sektor Informal*. Makassar : Laporan

Penyelidikan Institut Keguruan Ilmi Pendidikan (IKIP)  
Ujungpandang.

Mattulada, 1982. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Ujungpandang: Bhakti Baru – berita Utama.

Mita Noveria. 2001. Menjadi Pekerja Migran di Malaysia dan Saudi Arabia: Pilihan Ditengah Keterbatasan Kesempatan Kerja di Dalam Negeri. *Jurnal Penduduk & Pembangunan XII (3) 2001*. Yogyakarta : Pusat Penyelidikan Kependudukan Universiti Gajah Mada.

Mohd Yusof Hussain. 2013. Dinamika dan Kualiti Hidup Bandar. *Akademika. Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Asia Tenggara, Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities*, Bilangan Number 83(1), ISSN 0126-5008, Jan.-Apr. 2013. Universiti Kebangsaan Malaysia. hal. 3.

Mohd Fareed & Mohd Yusof Hussain. 2013. Keberkesanan Program Bandar Selamat: Persepsi Komuniti di Bandar Kulaijaya, Malaysia *Akademika. Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Asia Tenggara, Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities*, Bilangan Number 83(1), ISSN 0126-5008, Jan.-Apr. 2013. Universiti Kebangsaan Malaysia. hal. 28.

Nur Hadi Wiyono. 2003. Migrasi Internasional Tenaga Kerja: Perspektif Negara Pengirim dan Negara Penerima. *Warta Demografi*, Tahun ke-33, No.4, ISSN 0125-9679. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universiti Indonesia, Jakarta.

Nurhaslina Hasan. 2009. Issues and Challenges of Sustainable urban Development in Malayasia. Edited by Nurhaslina Hasan dalam *Sustainable Urban Development Issues in*

*Malaysia. Penerbit. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.*

- Norris, Robert E, 1966. Migration as Spatial Interaction in Indonesia. Descriptive Note. Indonesia no.5
- Peraturan Daerah dan Walikota Bandar Makassar. 2009. *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk*. Makassar: Penerbit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Makassar.
- Philip, F.Kelly and T.G.McGee. 2003. Changing Spaces Southeast Asian Urbanization in an Era of Volatile Globalization. Edited By. Chia Lin Sien dalam *Southeast Asia Transformed A Geography of Change*. Singapore : Institute Southeast Asian Studies.
- Prasetyoadi Warsono. 2005. *Arus Balik Kependudukan*. Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Pryor, Robin J. 1979. South-East Asia : Migration and Develeopment. Edited by Robin J. Pryor dalam *Migration And Development In South-East Asia, A Demographic Perspective*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, Oxford New York Melbourne.
- R. H. Pardoko, 1986. *Mobilitas, Migrasi dan Urbanisasi*. Bandung : Penerbit Angkasa Bandung.
- Rohadi Haryanto. 2002. Adminitrasi kependudukan Dalam Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Aplikasinya. *Dalam Warta Demografi*, Th-32, No.4, 2002. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ritzer, George. 2010 *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Penerbit PT.RajaGrafindo Persada.



- Riwanto, Tirtosudarmo 1996. Mobiltasi Penduduk dan Konflik : *Analisis dan Prospek Menjelang Abad ke-21 dalam Aris Ananta dkk. Mobilitas Penduduk di Indonesia*. Jakarta. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKN.
- Riwanto, Tirtosudarmo. 1999. Mobiltasi Penduduk dan Otonomi Daerah. *Dalam Jurnal Kependudukan*, Vol.1,No.1, Januari 1999, ISSN:1411-5034. Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian - Universitas Padjadjaran.
- Riwanto, Tirtosudarmo. 2000. Mencari Indonesia. Aspek Sosial Budaya dan Politik. Mobiltasi penduduk dalam *Konteks Otonomi Daerah*. Warta Demografi No.3. Lembaga Demografi Universiti Indonesia
- Rusli Muchtar, Ernany Dwi Astuti. 1986. *Ciri-ciri Migrasi Dan Non Migrasi di Sulawesi Selatan*. Lokakarya Hasil Penyelidikan Migrasi Penduduk di Provinsi Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional. Jakarta : LIPI.
- Rusli Lutan. 2009. Transformasi. Dalam *Leading and Outstanding Chronicle*, Edisi Sembilan Tahun Ke-03, 20 Oktober 2009, Bandung: Universiti Pendidikan Indonesia (UPI).
- Santoso Soeroso. 2005. *Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*. Editor : Palupi Widyastuti. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sharifah Zaleha Syek Hassan. 1997. *Cultures and Urbanisation in Malaysia*. Cultures In Asean And The 21 ST Century : Second Seminar. Kuching, Serawak Malaysia, 13 - 16 Mey 1997.

- Sirin Saracoglu, Terry L.Roe..... *Rural-Urban Migration and Economic Growth in Developing Countries*. (Tanpa tahun).
- Syarifuddin. 1996. *Urbanisasi Di Indonesia*. Kertas Kerja Karya untuk Lokakarya Mobilitas Penduduk. Yogyakarta : Pusat Penyelidikan dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2001. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2001. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Sukri Nyompa, Mohd Fuad Mat Jali, Noraziah Ali, Katiman Rostam. 2012. Migran dan Akta Pentadbiran Kependudukan di Bandar Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. *Dalam Geografia Malaysian Journal of Society and Space*, Vol.8 Issue 1 (2012) ISSN/E-ISSN 2180-2491, Nop.2012. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012.
- Sri Harijati Hatmadji. 1994. Transformasi Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita. *Warta Demografi*, Tahun ke-24, No.2, ISSN 0125-9679. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universiti Indonesia.
- Theveresa W, Devasahatan, Shirlena Huang anda Brenda S.A.Yeoh. 2004. Southeast Asian Migrant Woven: Vavigating Borders Negotiating Scales dalam *Singapore Journal of tropical Geography*. Departemen Geography, National Universiti of Singapore. Volume 25 Number 2 Juli 2004.

- Trevor Brooks and Meredith Redlin., 2008. *Occupational Aspiration, Rural to Urban Migration, and Intersectionality : A Comparison of White, Black and Hispanic Male and Female Group Chances for Leaving Rural Counties*. South Dakota State University.
- Rusli Lutan. 2008. Transformasi. *Dalam Leading and Outstanding Chronicle*, Edisi Sembilan Tahun Ke-03, 20 Oktober 2009. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Undang-Undang RI. 2007. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Usman Pelly. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi (Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandaling)*. Jakarta : LP3ES.
- Yi, Jian Ho, Adam D.Tyson. 2011. Malaysian Migration to Singapore : Pathways, Mechanisms and Status. *Malaysian Journal of Economic Studies, Volume 48, Number 2, Desember ISSN 1511-4554*. Faculty of Economics and Administration, University of Malaya.

## RIWAYAT HIDUP



Drs. H. Sukri Nyompa, S.H., M.Si., Ph.D, lahir di Anabanua-Sengkang, 05 Maret 1960. Penulis bekerja sebagai asisten dosen luar biasa sejak tahun 1982 dan menjadi dosen tetap tahun 1986 sampai sekarang di Jurusan Geografi FKIPS/FMIPA UNM. Penulis menyelesaikan S1 dan meraih gelar (Drs) di Jurusan Geografi dan Kependudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (FKIPS) IKIP Ujungpandang tahun 1979 – 1984. Kemudian mengikuti pendidikan Latihan Dasar Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1989 – 1990. Penulis melanjutkan studi dan meraih gelar master sains (M.Si) pada program Pendidikan Lingkungan Hidup konsentrasi Kependudukan dan Pengembangan SDM Universitas Hasanuddin tahun 2004 – 2006. Penulis melanjutkan studi dan meraih gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Saweringading Tahun 2003-2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S3 ke luar negeri dengan meraih gelar Doktor di Jurusan Geografi (konsentrasi Geografi Penduduk) Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2009 – 2016. Selain mengajar di program S1 juga di program S2 PPs UNM (2016 – sekarang). Selain mengajar juga mendapat pekerjaan tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Geografi FPIPS/FMIPA UNM tahun 1995 – 1999, Ketua Jurusan Geografi FMIPA UNM tahun 1999 – 2003 dan tahun 2006 – 2007, Sekretaris Senat FMIPA UNM tahun 2003 – 2007, Pembantu Dekan III Fmipa UNM tahun 2007 – 2009 dan

tahun 2016 sampai sekarang. Menulis Modul Demografi, Modul Perencanaan Pengajaran Geografi dan Modul Evaluasi Pembelajaran Geograf. Selain itu beberapa tulisan dimuat dalam jurnal diantaranya jurnal GeografiA Malaysian Journal of Society and Space UKM, Perspektif A Social Sciences and Humanities Journal. Disamping itu beberapa kali mengikuti seminar nasional dan internasional baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Mendapat penghargaan sebagai Dosen Teladan I Tingkat Fakultas PIPS IKIP Ujungpandang tahun 1983, Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun pada tahun 2002 dan 2006.